

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Agustus 2007



*Disusun oleh Kelompok Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia,
berkonsultasi dengan Mitra-Mitra Pembangunan*



Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Agustus 2007

Daftar Isi

I.	Menyembuhkan Bangsa: Prioritas-Prioritas Ekonomi Sekarang	1
II.	Catatan Sektor-sektor	7
1.	<i>Catatan Sektor: Pertanian</i>	7
2.	<i>Catatan Sektor: Komunikasi</i>	11
3.	<i>Catatan Sektor: Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi</i>	15
4.	<i>Catatan Sektor: Pendidikan</i>	19
5.	<i>Catatan Sektor: Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam</i>	25
6.	<i>Catatan Sektor: Pengawasan Ekstern dan Pengendalian Intern</i>	29
7.	<i>Catatan Sektor: Gender</i>	33
8.	<i>Catatan Sektor: Kesehatan</i>	37
9.	<i>Catatan Sektor: Minyak Bumi</i>	41
10.	<i>Catatan Sektor: Tenaga Listrik</i>	45
11.	<i>Catatan Sektor: Pembangunan Sektor Swasta</i>	49
12.	<i>Catatan Sektor: Manajemen Keuangan Publik</i>	53
13.	<i>Catatan Sektor: Pengelolaan Sektor Publik</i>	57
14.	<i>Catatan Sektor: Telekomunikasi</i>	61
15.	<i>Catatan Sektor: Transportasi</i>	65
16.	<i>Catatan Sektor: Veteran</i>	69
17.	<i>Catatan Sektor: Pengadaan Air dan Sanitasi</i>	73
18.	<i>Catatan Sektor: Pemuda</i>	77

*Disusun oleh Kelompok Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia,
berkonsultasi dengan Mitra-Mitra Pembangunan*

I. Menyembuhkan Bangsa: Prioritas-Prioritas Ekonomi Sekarang

1. Pemerintah baru akan memberi prioritas paling tinggi untuk mengatasi krisis politik dan keamanan Timor-Leste. Akan tetapi untuk mencapai stabilitas juga berarti kita harus membangkitkan kembali ekonomi yang mandek dan menanggulangi masalah-masalah sosial negeri ini yang sangat mengkhawatirkan. Dokumen ini beserta lampiran-lampirannya memusatkan perhatian kepada cara bagaimana pembangkitan kembali bidang sosial dapat diprakarsai. Dokumen ini dan Catatan-Catatan Sektor yang melengkapinya disusun oleh Kelompok Bank Dunia (termasuk Bank Dunia dan IFC) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) sebagai layanan jasa kepada Pemerintah yang baru, dan dipersembahkan dengan semangat persahabatan serta komitmen terhadap masa depan Timor-Leste.

2. Ekonomi tidak akan bangkit kembali tanpa keamanan yang lebih baik dan pemulihan kepercayaan rakyat terhadap para pemimpinnya. Ini berarti reformasi radikal dalam tubuh kepolisian dan tentara. Ini berarti menghentikan kekerasan dalam masyarakat supaya para pengungsi (IDP) merasa cukup aman untuk pulang. Ini berarti menjalankan keadilan yang tepat, dan menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang melanggar hukum pada tahun 2006. Subyek-subyek ini akan disikapi secara detil dalam laporan singkat yang sedang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan tetapi kepentingan mendasar daripadanya perlu diakui di sini.

3. Asalkan Pemerintah menanggulangi keadaan keamanan dengan tegas, kemajuan ekonomi pasti dapat dicapai. Akan tetapi, untuk mengubah kemungkinan menjadi kenyataan memerlukan kepemimpinan dan fokus yang kuat. Dalam Laporan Singkat ini kami menyarankan enam bidang prioritas ekonomi, yang bila maju, dapat memimpin transformasi ekonomi Timor-Leste yang masih berprestasi jauh di bawah kemampuan dan yang dapat menolong memulihkan kepercayaan rakyat akan masa depan dimana mereka bisa mendapat pekerjaan, memberi nafkah kepada keluarganya dan menikmati kehidupan yang bermartabat.

4. Ada kebutuhan memayungi bagi Pemerintah untuk menyampaikan tujuan dan programnya lebih jelas kepada penduduk daripada di masa lalu. Jika warga tetap diberi informasi yang jujur, mereka akan mengembangkan kepercayaan yang lebih besar terhadap para pemimpin mereka. Jika mereka diminta untuk membantu merancang dan memantau program-program pembangunan yang dampaknya terasa oleh mereka, komitmen mereka terhadap program-program tersebut akan meningkat dan mereka akan memberi sumbangan besar untuk mewujudkannya dengan sukses.

Prioritas Pertama--- Pengelolaan Transparan Pendapatan Negara dari Minyak Bumi

5. Cadangan minyak bumi Timor-Leste merupakan pokok untuk kesejahteraan dan kemerdekaan negara. Total simpanan minyak bumi berjumlah US\$ 1,4 milyar pada tanggal 30 Juni 2007, dengan sekitar US\$ 100 juta pendapatan baru setiap bulan. Mengingat masalah yang dialami sejumlah negara yang kaya akan sumber daya alam – pemborosan, korupsi yang tersebar luas --- Pemerintah yang lalu telah menciptakan struktur manajemen minyak bumi yang dianggap sebagai teladan “praktek terbaik” internasional. Pertama, pendapatan minyak

bumi dimasukkan ke dalam Dana Minyak Bumi yang dikelola oleh Otoritas Perbankan dan Pembayaran, atau BPA (*Banking and Payments Authority*). Oleh karena cadangan minyak dan gas bumi tidak akan ada selama-lamanya, kemudian BPA menginvestasikan semua penghasilannya untuk memastikan bahwa Timor-Leste akan memelihara nilai dolar riil dari penghasilan minyak bumi secara lestari; dan penghasilan bunga dari Kekayaan Minyak Bumi disalurkan ke Anggaran Pemerintah. Saat ini, lebih dari US\$ 300 juta tersedia secara berkesinambungan untuk Anggaran tiap tahun.

6. Melestarikan pengaturan pendapatan minyak bumi yang telah ada merupakan hal yang sangat menentukan. Sama pentingnya juga bahwa pendapatan yang dialokasikan kepada anggaran pemerintah diinvestasikan ke dalam program-program yang membangun modal bangsa dan meningkatkan produktivitas di sektor-sektor selain sektor perminyakan ---artinya, di bidang infrastruktur dan pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial---(paragraf 15), meningkatkan layanan jasa.

7. Direkomendasikan untuk melestarikan kebijakan simpanan minyak bumi dan terus memperkuat kerangka yang ada sekarang untuk memastikan transparansi lebih lanjut serta pelestarian kekayaan minyak Timor-Leste.

Kemandekan Ekonomi

Mulai tahun anggaran 2004-5, pertumbuhan ekonomi telah berubah menjadi positif, dan kestabilan makro-ekonomi telah tercapai melalui manajemen fiskal yang sehat. Kabupaten-kabupaten terpencil mengalami gangguan pasokan, kehilangan hasil panen kopi yang cukup besar, serta kegagalan sistem angkutan. Hampir semua penduduk Timor-Leste mencari nafkah di sektor-sektor non-minyak, dan penghasilan per kapita telah mandek dalam arti riil sejak tahun 2002. Harga-harga konsumen juga telah naik sekitar 13% sejak bulan Maret 2006. Perusahaan dan perorangan berjuang untuk membayar pinjaman, dan sekitar sepertiga portfolio pinjaman nasional sekarang sedang macet. Investasi swasta sangat rendah, diikuti ketidakpastian yang menyebabkan iklim usaha paling tidak menarik di dunia (paragraf 11). Akibatnya, penciptaan lapangan kerja terhenti --diperkirakan bahwa sekitar 15.000 pemuda memasuki pasar tenaga kerja tiap tahun, sedangkan hanya diciptakan 400 pekerjaan formal. Menurut sensus tahun 2004, pengangguran di Dili diperkirakan 23%, dan pengangguran pemuda 40%, naik menjadi 58% untuk golongan usia 15-19 tahun. Dengan separuh penduduk di bawah usia 18 tahun, pengangguran pemuda perkotaan serta masalah-masalah yang terkait dengannya, cenderung meningkat kecuali dapat diciptakan pertumbuhan gencar di sektor-sektor non-minyak. Kemiskinan di Timor-Leste---didefinisikan sebagai kemampuan untuk membeli pangan dan keperluan konsumsi non-pangan setara dengan penghasilan kurang dari US\$ 0,55 per hari---telah menimpa sekitar 39,7% dari penduduk dalam tahun 2001 dan sedang menanjak.

Catatan: US\$ 0,55 sen di Timor-Leste sama dengan US\$ 1,5 dalam internasional menggunakan ukuran Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*).

Prioritas Kedua---Pelaksanaan Anggaran

8. Pada saatnya nanti, sektor swasta yang bergairah seharusnya menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Untuk saat ini, mengingat sifat sektor swasta yang belum berkembang, belanja Pemerintah harus menjalankan peranan ini. Akan tetapi, sekarang Pemerintah tidak mampu membelanjakan sumber daya yang tersedia baginya, akibat lemahnya kemampuan dan sistem yang tidak praktis dan terpusat. Pada akhir triwulan ketiga tahun fiskal 2006-7, baru US\$ 81 juta telah dibelanjakan dari Anggaran Pemerintah Pusat sebesar US\$ 20 juta. Khususnya pelaksanaan Anggaran Modal cukup lemah, dengan hanya 2,6%, atau US\$ 3 juta dari US\$ 120 juta, dibelanjakan pada akhir triwulan ketiga.

9. Akan tetapi masalah ini dapat diatasi, dan langkah-langkah dapat diambil segera untuk memperbaiki pelaksanaan anggaran. Langkah-langkah tersebut termasuk:

- Program terpadu Kementerian Keuangan untuk pelatihan pegawai inti kementerian struktural dalam prosedur-prosedur manajemen keuangan dasar;
- Akses ke sistem informasi manajemen keuangan, *Freebalance*, untuk kementerian-kementerian struktural dan badan-badan pemerintah;
- Menaikkan ambang pengadaan yang dilimpahkan kepada kementerian-kementerian struktural dari US\$ 100.000 menjadi paling sedikit US\$ 250.000; dan
- Memperkenalkan kembali rekening **imprest** untuk semua badan pemerintah dan kementerian untuk memperlancar pembelian ukuran kecil yang mendesak.

Belanja Pemerintah untuk infrastruktur dan layanan jasa akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di masa depan yang dapat terasa segera akibatnya. Adalah penting untuk memperhatikan dengan cermat komposisi belanja ---khususnya, kenaikan berlebihan dalam upah sektor publik dapat menaikkan juga tarif upah kerja Timor-Leste yang relatif tinggi.

Prioritas Ketiga---Menyikapi Krisis Pemuda

10. Citra lazim tentang pemuda Timor-Leste adalah gerombolan anak jalanan, sengaja menyulut kebakaran dan anarki ---namun inilah generasi yang akan membangun bangsa yang baru: golongan usia 15-29 tahun sangat mungkin akan mewakili sekitar 40% dari seluruh penduduk Timor-Leste menjelang tahun 2010. Terlampau banyak pemuda sekarang tidak mempunyai pekerjaan, dan hanya sedikit yang memiliki ketrampilan yang dapat dipasarkan. Banyak di antaranya menderita kekerasan dalam keluarga, peminum (minuman alkohol) berat, merasa terasing dari komunitas mereka dan tidak percaya kepada Pemerintah dan generasi yang lebih tua. Ambruknya pengendalian masyarakat sejak April 2006 juga telah mendorong beberapa anak muda untuk bertindak tanpa khawatir akan dihukum.

11. Untuk memperbaiki isu kritis tersebut dan mengerahkan energi positif dari pemuda Timor-Leste dibutuhkan komitmen tinggi dari pihak Pemerintah dan pendekatan komprehensif jangka panjang. Mengubah anak muda yang kecewa masa kini menjadi perintis ekonomi masa datang memerlukan strategi nasional menyeluruh dan suatu kantor Pemerintah yang kuat untuk memimpin strategi tersebut. Komponen-komponen pokok strategi tersebut perlu mencakup

- Upaya untuk memastikan anak-anak tetap bersekolah (paragraf 15), oleh karena berbagai manfaat diperoleh secara pribadi dan bagi masyarakat bila pemuda menyelesaikan pendidikan mereka; program 'kesempatan kedua' yang mendorong anak-anak yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah juga diperlukan;
- Menanggulangi pekerjaan untuk pemuda, terutama karena pemuda pengangguran sangat mudah dimanipulasi dan ditarik ke dalam dunia kekerasan serta perilaku yang berisiko. Dengan memperhitungkan kapasitas kelembagaan, Bank Dunia yakin bahwa layak untuk menetapkan program pekerjaan umum berskala nasional yang akan memberi pekerjaan kepada paling sedikit 50.000 pekerja selama 50 hari per tahun semula, meningkat menjadi 100.000 pekerja selama 75 hari dengan biaya per tahun sekitar US\$ 25 juta. Program ini dapat diarahkan kepada pemuda maupun ke penduduk miskin (paragraf 15).
- Menghubungkan pemuda dengan komunitas mereka melalui memacu kembali pusat-pusat pemuda, dan mencari jalan untuk melibatkan anak muda dalam pembangunan bangsa, misalnya dengan membentuk dewan pemuda yang representatif yang akan diberikan tanggungjawab penting dalam proses pembangunan.

Prioritas Keempat---Menciptakan Lingkungan untuk Investasi Swasta

12. Timor-Leste mempunyai reputasi sebagai negara terburuk kedua di dunia dalam kemudahan berbisnis, menduduki ranking yang memalukan yakni ke-174 dari 175 negara yang dibuatkan profil dalam laporan-laporan Bank Dunia/International Finance Corporation *Doing Business*. Banyak prosedur administrasi tidak praktis dan mahal; pengadilan-pengadilan kelebihan beban dan tidak efektif, dan penyelesaian sengketa tentang kontrak dan buruh nyaris tidak mungkin; infrastruktur buruk dan biaya operasi bisnis sangat tinggi (biaya telekomunikasi empat kali lipat dibandingkan dengan Indonesia, dan upah beberapa kali lipat upah di negara-negara tetangga); layanan jasa penunjang bisnis seperti akuntansi, audit dan praktek hukum swasta nyaris tidak ada.

13. Sementara kekayaan minyak Timor-Leste mulai diinvestasikan, para kontraktor dan investor akan tertarik untuk mendatangnya ---tetapi hanya dengan ketentuan bahwa lingkungan bisnis telah mantap. Langkah-langkah yang dapat diambil segera, termasuk

- Ratifikasi UU Pertanahan, yang dirancang pada tahun 2005, yang memperjelas kepemilikan dan memudahkan penjualan tanah; begitu diundangkan, undang-undang ini akan mendorong penggunaan tanah sebagai agunan dan sangat mungkin akan memacu investasi di bidang pembangunan pertanian dan konservasi sumber daya. Direktorat Pertanahan dan Properti di Kementerian Kehakiman juga harus memulai membina suatu daftar tentang kepemilikan tanah dan pemetaan, didukung bantuan teknis donor yang tepat;
- Perubahan undang-undang yang tidak konsisten dan luar biasa rumit akan mengurangi hambatan birokrasi dan mendorong investasi baru; contoh-contoh perundang-undangan yang perlu direvisi termasuk UU Masyarakat Komersial (UU Perusahaan), UU Daftar Komersial (pendaftaran usaha) dan undang-undang investasi. Usulan untuk memudahkan prosedur untuk memulai suatu

- usaha dipertimbangkan oleh Dewan Menteri pada akhir tahun 2006, akan tetapi belum disetujui dan dilaksanakan;
- Menunjang pertumbuhan pembiayaan mikro: langkah-langkah penunjang akan termasuk ketentuan-ketentuan untuk mentransfer uang tunai dengan aman ke seluruh pelosok negeri, penetapan catatan kredit, dan menelusuri pilihan untuk menyediakan asuransi. Bersamaan dengan itu Pemerintah sebaiknya menghindari menyediakan jaminan kredit atau mendirikan bank-bank baru: akses terhadap modal investasi diperlukan, tetapi lebih baik disediakan dengan syarat-syarat komersial oleh bank dan badan pembiayaan mikro yang telah mapan.

Prioritas Kelima---Meningkatkan Layanan Jasa

14. Pada bulan Oktober 2006, Dewan Menteri telah menyetujui kebijakan desentralisasi di mana wewenang dan sumberdaya akan dipindahkan kepada 30-35 kotamadya otonom baru. Inisiatif ini patut dipertimbangkan kembali. Walaupun desentralisasi pada saatnya dapat memberdayakan masyarakat lokal dan lebih mendekatkan layanan jasa publik kepada penduduk, akibat langsung dalam konteks Timor-Leste bisa merupakan layanan jasa dan akuntabilitas keuangan yang lebih lemah pada saat Pemerintah perlu menyampaikan layanan jasa yang efektif dan bersih di seluruh negeri. Mencari staf untuk struktur-struktur baru yang diusulkan juga akan membebani persediaan personil trampil yang sekarang masih terbatas. Oleh karena itu disarankan pendekatan yang lebih hati-hati.

- Langkah awal dapat terdiri dari pemetaan sistem layanan jasa yang ada pada tingkat daerah dan identifikasi kesenjangan-kesenjangan layanan jasa;
- Kesenjangan yang diidentifikasi maupun rencana untuk perluasan layanan jasa serta peningkatan mutu kemudian dapat disikapi dengan pengalihan wewenang lebih besar untuk perencanaan, pengadaan dan manajemen keuangan sampai kepada tingkat kabupaten dan kecamatan, digabung dengan tingkat keterlibatan masyarakat lebih besar dalam penyusunan program dan pemantauan layanan jasa;
- Bersamaan dengan itu, mekanisme yang memberi harapan seperti inisiatif anggaran kabupaten yang baru, Program Pembangunan Lokal dan proyek-proyek Dewan Suco dapat diperkuat, dan diberi dukungan lebih sistematis dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam manajemen keuangan;
- Pendekatan ini akan memberi waktu untuk menelusuri dan menguji model-model desentralisasi yang sesuai, namun tanpa risiko kemunduran dalam layanan jasa yang akan digunakan oleh masyarakat untuk menilai seberapa efisien Pemerintah yang baru.

Prioritas Keenam ---Melindungi Pihak Yang Paling Rapuh

15. Kekayaan minyak bumi Timor-Leste memungkinkan program bijaksana dari subsidi yang diarahkan kepada golongan miskin dan rapuh; subsidi tersebut tidak hanya akan meningkatkan pemerataan tetapi secara material memberi sumbangan kepada pembentukan modal manusia yang mutlak untuk pertumbuhan lestari. Dalam jangka pendek, beberapa kemungkinan patut ditelusuri, selamanya dengan memperhatikan kesinambungannya sepanjang waktu. Kemungkinan tersebut termasuk

- Program pekerjaan umum yang disebut pada paragraf 11 di atas;
- Suatu program transfer sederhana kepada yang cacat, dan pensiun kepada yang lanjut usia (maupun memulai pembayaran pensiun veteran);
- Transfer Tunai Bersyarat (TTB) di bidang kesehatan dan pendidikan, yang telah mencatat manfaat jelas di sejumlah negara dan dapat dicoba di Timor-Leste. TTB memberi pembayaran tunai kepada keluarga miskin untuk memajukan tujuan kesehatan atau pendidikan, seperti vaksinasi anak-anak, menyampaikan fasilitas kesehatan, atau memasukkan anak-anak di sekolah/memastikan mereka tetap terdaftar.

II. Catatan Sektor-sektor

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

1. Catatan Sektor: Pertanian

Selayang Pandang

Pertanian mendominasi ekonomi Timor-Leste dan mata pencaharian mayoritas penduduk Timor-Leste. Pertanian mencakup 30% PDB non-perminyakan, dan 80% dari penduduk bergantung pada pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk mata pencaharian mereka. Sepertiga rumah tangga penduduk Timor-Leste mengandalkan pertanian untuk menyambung hidup seluruhnya. 98% menggunakan kayu api sebagai sumber tenaga utama mereka. Akan tetapi produktivitas pertanian rendah dan masalah mutu juga menghambat ekspor. Produktivitas yang diperbaiki, termasuk menyikapi kerugian akibat tanaman yang membusuk dan hama, meningkatkan mutu tanaman pertanian, menaikkan investasi di wilayah pedesaan dan menyikapi isu kepemilikan tanah¹ merupakan langkah-langkah pokok untuk mengurangi kemiskinan pedesaan dan memperbaiki keamanan pangan.

Persoalan-Persoalan Pokok

- ***Meningkatkan produktivitas pertanian.*** Produktivitas dapat dinaikkan melalui sistem penyuluhan pertanian yang berfungsi dengan baik. Ini termasuk pengujian dan pengenalan adaptasi varietas benih yang diperbaiki, memperbaiki manajemen air dan juga praktek-praktek pemeliharaan ternak. Mengurangi kerugian pertanian akibat pembusukan dan hama, seperti tikus dan serangga (sekarang mencapai tingkat yang sangat tinggi) juga akan memperbaiki produktivitas dan mengurangi kepekaan terhadap kekurangan pangan.
- ***Membangun pasar-pasar pertanian.*** Investasi dalam komoditas pertambahan nilai dan ekspor adalah mutlak. Penyediaan informasi yang lebih baik tentang harga dan peluang ekspor akan membantu memacu pasar-pasar pertanian. Pasar-pasar yang berfungsi dengan baik akan memberi sumbangan terhadap pengurangan kepekaan terhadap kekurangan pangan.
- ***Memperbaiki produktivitas pertanian dan mendiversifikasi sumber-sumber penghasilan pedesaan melalui iklim investasi swasta yang lebih baik di daerah pedesaan.*** Meratifikasi undang-undang pertanahan dan menciptakan sistem untuk pendaftaran tanah adalah mutlak untuk meningkatkan investasi. Infrastruktur pedesaan yang diperbaiki, termasuk transportasi dan listrik, dan akses terhadap kredit juga penting.

¹ Kepemilikan tanah juga disikapi dalam bagian Pembangunan Sektor Swasta dari Laporan Singkat ini.

- **Mengelola degradasi lingkungan hidup.** Tanah pertanian, padang rumput dan tanah kehutanan mengalami tekanan luar biasa, yang berdampak pada produktivitas pertanian. Arus jasa lingkungan hidup (misalnya di bidang hidrologi, pengendalian erosi) bisa terganggu jika tanah tidak dikelola secara lestari.

Sektor Pertanian

Tanaman pangan (jagung, padi, kacang tanah, singkong dan ubi jalar), tanaman pohon (kemiri, kelapa, kopi, kayu manis dan cengkeh) dan ternak merupakan komoditas pertanian Timor-Leste yang terpenting. Kopi merupakan ekspor non-minyak terbesar dan sekitar 28% rumah tangga mendapat sebagian penghasilan dari kopi. Perikanan pesisir luar biasa berlimpah tetapi terletak di alur terumbu karang yang sempit dan karena itu terutama peka terhadap eksploitasi berlebihan. Sumber daya lepas pantai termasuk tuna, *snapper* laut dalam, dan udang laut dalam, tetapi ukuran dan status sumber daya tersebut pada umumnya tidak diketahui.

Pekerjaan dapat diciptakan di sektor pertanian, khususnya melalui investasi sektor swasta dan pembangunan pasar ekspor. Direktorat Agrobisnis baru pada Kementerian Pertanian dan Perikanan (Kementerian of Agriculture and Forestry, atau *MAF*) memusatkan perhatian pada penghilangan kendala terhadap pembangunan agrobisnis. Akan tetapi, upaya ini tidak cukup untuk mencakup seluruh permintaan dan akan memerlukan tindakan di sektor-sektor lain, seperti perbaikan infrastruktur pedesaan.

Produktivitas pertanian di Timor-Leste rendah. Hasil panen rendah (di antara yang paling rendah di kawasan ini) dengan hasil panen jagung rata-rata sekitar 1,4 MT/ha dan hasil panen padi sawah rata-rata sekitar 1,5 MT/ha. Akses dan penggunaan masukan dan teknologi bermutu terbatas. Selanjutnya, mengingat ketergantungan berat terhadap pertanian untuk menyambung kehidupan, para petani Timor-Leste sangat peka terhadap kekurangan pangan. 70-80% dari desa-desa melaporkan kekurangan pangan antara bulan Desember dan Januari. Kepekaan ini dapat mulai disikapi dengan investasi-investasi yang menuju ke arah diversifikasi penghasilan petani di luar pertanian, memajukan sistem peringatan dini untuk memperingati para petani dalam tahun-tahun yang mengalami kekeringan, jaring pengaman untuk mereka yang paling rapuh, melakukan investasi dalam sistem pengairan yang dapat dipelihara dengan mudah, dan memajukan varitas tanaman yang resisten terhadap peristiwa cuaca yang luar biasa.

Masalah utama dalam sektor ini adalah pengelolaan lemah sumber daya alam dan degradasi lingkungan hidup yang semakin meningkat. Tantangannya adalah untuk mengintegrasikan kekhawatiran lingkungan hidup ke dalam strategi pertumbuhan pertanian. Prioritas intervensi di sektor sumber daya alam termasuk pelestarian *stock* genetik kayu cendana, pengelolaan bersama dengan masyarakat lokal daripada perkebunan kehutanan, hutan alam dan wilayah pesisir, dan memperbaiki manajemen sumber daya lepas pantai. Ini dapat tercapai melalui pengungkitan dan perbaikan sistem hukum adat dan komunitas. Pengelolaan bersama komunitas adalah layak melalui peraturan pemerintah daerah atau nota kesepakatan dengan Pemerintah. Pengelolaan sumber daya lepas pantai tetap merupakan kekhawatiran mengingat potensi tinggi untuk korupsi dan eksploitasi tak bermoral.

MAF menghadapi tantangan mendasar dalam membantu para petani untuk menyesuaikan diri dengan pasar-pasar yang sangat berbeda dari pasar-pasar sebelum tahun 1999, sementara menangani dukungan yang berkurang dari pihak pemerintah serta administrasi publik yang lebih kecil. MAF telah memusatkan sumber daya dan upaya pada penguatan kapasitas kelembagaan dalam penyampaian layanan jasa. Salah satu tantangan utama adalah kapasitas rendah dan kurang tersedianya buruh berpendidikan. Untuk menyikapi beberapa masalah tertentu, Pemerintah perlu menetapkan sistem pengetahuan dan informasi pertanian yang efisien. Juga akan perlu merumuskan kebijakan dan program yang menyikapi produktivitas dan kesehatan pertanian, dan memajukan pembangunan pasar-pasar baru dengan cara memperkuat rantai pasokan produk. Bidang prioritas dalam jangka pendek adalah (a) pelatihan profesional (pasca-sarjana) untuk staf senior di bidang-bidang seperti teknik pengairan, ekonomi pertanian, dan kesehatan ternak; (b) restrukturisasi pokokasi untuk mengintegrasikan lebih lanjut layanan jasa MAF; dan (c) membangun hubungan kemitraan dengan LSM-LSM dan sektor swasta untuk penyampaian layanan jasa pertanian.

Rencana Pembangunan Nasional Timor-Leste bermaksud untuk mempunyai industri lestari, bersaing dan makmur di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan yang menunjang standar hidup yang diperbaiki menjelang tahun 2020. Lima prioritas strategis telah dirumuskan dalam rencana tersebut: (a) memperbaiki kepastian pangan dan tingkatkan swadaya; (b) tingkatkan produksi dan pemasaran pertambahan nilai; (c) wujudkan produksi dan manajemen sumber daya alam secara lestari; (d) kuatkan neraca perdagangan dengan memajukan ekspor komoditas; dan (e) tingkatkan penghasilan dan lapangan kerja di daerah pedesaan. Ada Program-Program Investasi Sektor (SIP) untuk “Pertanian dan Peternakan”, “Kehutanan”, dan “Perikanan”. Program-program tersebut sedang direvisi.

Fakta dan Angka

Angka Pokok Sektor

Penduduk pedesaan (% dari total penduduk)	2005	73,5
Pertumbuhan penduduk pedesaan (% per tahun)	2005	4,8
Pertanian, pertambahan nilai (% PDB)	2004	31,6
Pertanian, pertambahan nilai (% pertumbuhan per tahun)	2004	10,1
Hasil panen biji-bijian (kg per hektar)	2005	1.926,2
Sumber air yang disempurnakan, pedesaan (% penduduk pedesaan yang memiliki akses)	2004	56,0
Indeks produksi pangan (1999-2001 = 100)	--	113,0
Tanah layak tanam (% dari wilayah pertanian)	--	8,2
Tanah tanaman permanen (% dari wilayah pertanian)	--	4,6

Sumber: Bank Dunia (2005)

Produksi dan nilai komoditas pertanian utama, termasuk persentase rumah tangga yang menanam tanaman

Komoditas	Nilai (US\$ 1.000)	Produksi (MT)	Rumah Tangga yang Menanam Tanaman (%)
Beras, Padi	13.938	65.433	26 ²
Kopi, Hijau	11.446	14.000	28 ³
Daging babi dalam negeri	10.208	10.080	--
Jagung	8.154	70.175	81
Akar dan umbi	5.149	43.000	--
Sayuran segar	3.002	16.000	--
Singkong	2.992	41.525	68
Ubi Jalar	2.613	26.000	44

Sumber: FAO (2005) untuk data produksi; Survei Rumah Tangga Timor Lorasae (2002) untuk persentase rumah tangga yang menanam tanaman

² Semua ekosistem (tidak terbatas pada sawah).

³ Termasuk buah dan biji kering.

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

2. Catatan Sektor: Komunikasi

Selayang Pandang

Komunitas-komunitas Timor tidak dilayani secara memadai oleh media, telekomunikasi, dan upaya informasi Pemerintah, yang mengakibatkan akses informasi yang tidak mencukupi. Saluran komunikasi antar lembaga-lembaga negara, antar Pemerintah dan masyarakat madani, dan Pemerintah dan masyarakat tetap belum berkembang. Komunikasi yang tidak efektif antara Pemerintah dan masyarakat telah diidentifikasi sebagai pemberi sumbangan kepada has been krisis tahun 2006, sementara membatasi kemampuan lembaga-lembaga negara untuk menyikapi krisis. Penyebaran informasi secara sistematis oleh Pemerintah kepada masyarakat adalah pusat untuk implementasi efektif daripada program-program Pemerintah, akuntabilitas, dan untuk membantah desas-desus serta salah informasi. Informasi juga merupakan hak azasi manusia. Sekarang kebanyakan badan negara mempunyai ketrampilan yang kurang dikembangkan, mekanisme dan sistem untuk berbagi informasi secara teratur, intern atau dengan masyarakat.

Persoalan-persoalan pokok

- ***Menetapkan badan-badan negara sebagai sumber informasi teratur.*** Dalam jangka pendek ini dapat termasuk pengangkatan juru bicara-juru bicara terlatih untuk Parlemen, kantor Presiden, kantor Perdana Menteri, kehakiman, polisi dan tentara, bergerak ke arah penetapan satuan-satuan media di setiap badan negara. Budaya berbagi informasi dapat dicerminkan di dalam suatu kebijakan informasi dan protokol-protokol yang mendorong pembagian informasi tentang rencana, program dan kegiatan Pemerintah. Ini akan memajukan komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat madani dan masyarakat umum dan akan memperbaiki keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.
- ***Arus informasi antar- dan antara badan-badan negara.*** Memperbaiki informasi sistematis di dalam lembaga-lembaga adalah mutlak untuk memberi informasi kepada masyarakat umum. Di dalam kebanyakan instansi informasi tersentralisasi, tidak mempunyai sistem untuk memastikan seluruh staf memiliki informasi memadai tentang tujuan, program dan kegiatan. Menetapkan mekanisme, protokol dan ketrampilan, maupun budaya keterbukaan antara staf senior dapat mengantar pada gerakan informasi yang ditingkatkan.
- ***Memperkuat kerangka hukum untuk media.*** Ada sejumlah bidang di mana kerangka hukum yang menunjang media dapat diperkuat, termasuk legislasi RRTL perizinan siaran, dan pendaftaran, yang dapat disikapi melalui satu undang-undang media tunggal, atau serangkaian undang-undang tertentu. Sekarang rancangan kitab undang-undang hukum pidana menetapkan fitnah sebagai kejahatan. Diskusi umum yang lebih luas

tentang masalah ini mungkin berguna, mengingat dampak yang mungkin menakutkan bagi media Timor-Leste yang baru mulai muncul akibat penetapan fitnah sebagai kejahatan.

Sektor Komunikasi

Berbagi informasi oleh badan-badan negara dengan masyarakat madani dan masyarakat umum tidak sistematis. Lembaga negara tidak memiliki juru bicara yang diangkat atau mekanisme untuk memberi informasi mutakhir secara teratur kepada masyarakat umum. Memperbaiki penyebaran informasi akan tergantung pada pembangunan ketrampilan-ketrampilan komunikasi, kebijakan, manajemen dan protokol, termasuk menambahkan tanggungjawab komunikasi kepada uraian tugas staf pokok. Pekerjaan Kantor Informasi Pemerintah (*Government Information Office* atau GIO), suatu satuan pelatihan komunikasi di bawah kantor Perdana Menteri, menyediakan landasan untuk membangun. Mulai beroperasi sejak tahun 2004, GIO melatih staf kementerian untuk berinteraksi dengan media dan masyarakat umum. GIO telah melatih staf dari 15 kementerian dan lembaga negara, akan tetapi mekanisme untuk menggunakan ketrampilan tersebut belum dilembagakan secara sistematis selintas kementerian-kementerian. Langkah-langkah lain dapat termasuk peningkatan situs web Pemerintah dan memperbaiki akses terhadap berita negara, *Journal da Republica*.

Siaran umum nasional, Radio Televisaun Timor-Leste (RTTL), merupakan sumber informasi paling penting di negeri ini. Mempertahankan independensi RTTL dan memperbaiki jangkauan dan mutu adalah mutlak untuk memperbaiki arus-arus informasi. Sejak akhir tahun 2006, jangkauan radio setiap minggu adalah 78% di Dili tetapi jauh lebih rendah di daerah kabupaten, yaitu 28% di Viqueque.⁴ Untuk membantu memperbaiki hal ini RTTL belum lama ini memperkenalkan liputan televisi dan perlengkapan transmisi FM baru kepada tujuh ibu kota kabupaten, yang dalam waktu dekat akan diperluas pada lima kabupaten lain. Di samping itu sedang dipasang transmitter AM baru, yang akan memastikan hampir 100% liputan selintas negeri.

Sebagai penyiar layanan jasa umum nasional, RTTL didanai oleh anggaran negara tetapi seharusnya tetap independen. Hanya negara yang memiliki sumber daya memadai untuk mendukung suatu stasiun radio dan televisi dengan liputan nasional. Stasiun radio komunitas berperan dalam menyediakan berita lokal dan program dalam bahasa lokal tetapi memiliki kapasitas terbatas untuk menyediakan berita nasional. RTTL sekarang diatur oleh UU 2002/6 tentang Pembentukan Jasa Siaran Umum untuk Timor Timur, yang diubah pada tahun 2004. Undang-undang sekarang dapat diperkuat dengan kejelasan lebih besar tentang hubungan penyiar dengan Pemerintah dengan lebih banyak pengaman untuk menjaga independensinya.

Terdapat kesenjangan-kesenjangan dalam kerangka peraturan untuk media. Tidak ada badan untuk mengeluarkan izin atau mengatur stasiun radio dan TV, termasuk kriteria untuk pembentukan, struktur tata kelola, atau penunjukan dan pengelolaan frekuensi. Akuntabilitas tenaga profesional media dapat sangat diperkuat dengan menggunakan berbagai pilihan pengaturan dengan pemberlakuan sanksi-sanksi. Ini dapat ditangani oleh legislasi atau melalui pengaturan sendiri oleh suatu badan profesional, seperti dewan pers. Pengaturan sendiri melalui

⁴ Yayasan Hirondele, *Timor-Leste National Media Survey, Final Report*. Mei 2007

dewan pers mungkin merupakan penyelesaian paling praktis untuk Timor-Leste. Ini dapat ditunjang dengan gugatan perdata ketimbang kriminalisasi. Dalam proses merancang undang-undang, atau beberapa undang-undang media, konsultasi dengan media, masyarakat madani, dan masyarakat umum merupakan hal yang mutlak.

Memperluas jangkauan media dan informasi umum Pemerintah sampai ke daerah pedesaan akan memerlukan kreativitas. Misalnya, dapat digunakan pesawat-pesawat TV dan DVD yang ditempatkan di setiap *sucu* sebagai bagian dari program pemberantasan buta huruf Kementerian Pendidikan. Pemerintah juga dapat meneliti kemungkinan untuk memberi subsidi kepada penyebaran surat kabar harian ke semua sekolah, rumah sakit dan kantor Pemerintah.

Fakta dan Angka

Asosiasi Wartawan: Associaaun Journalista Timor-Lorosa’e, Sindicato, Associaaun Radio Kommunitade Timor-Leste, Press Club

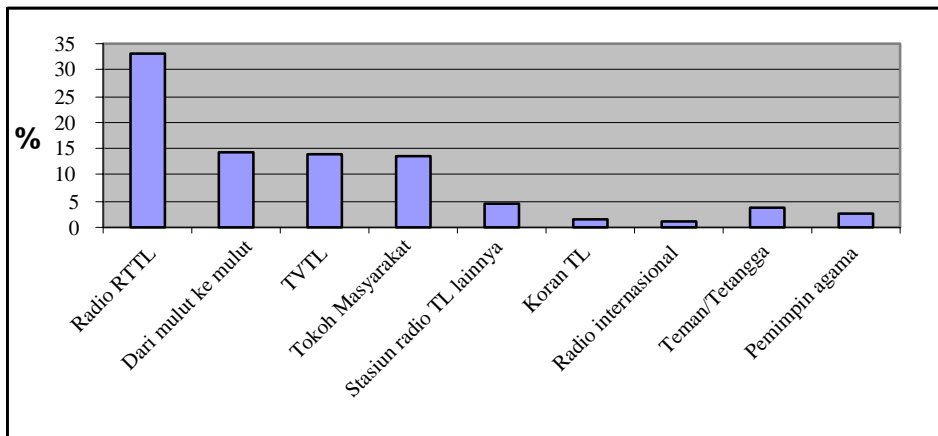
Suratkabar Harian: Timor Post, Suara Timor-Lorosa’e, Diario Nacional

Suratkabar Mingguan: Tempo Semanal, Journal Labarik, Seminario Nacional, Lifau Post

Stasion Radio –Stasion-stasion Radio Komunitas Dili (6): Radio Lourico Lian, Radio Rakambia, Radio Klibur, Radio Falintil, Radio Voz, Radio Atauro; **Radio Komunitas**

Kabupaten (13): RC Povo Viqueque, RC Lifau Atoni, RC Café Ermera, RC Baucau, RC Covalima (sejak Juni 2007 tidak mengudara), RC Ainaro, RC Aileu, RC Maliana, RC Los Palos, RC Manatuto, RC Ainaro, RC Bobonaro, Radio Liquica; **Station Gereja (2):** Radio Timor Kmanek, Baucau

Tabel 1 - Sumber Informasi Terpenting



Tabel 2 – Stasiun Radio Terkemuka

Stasiun	Jangkauan per minggu	Kesadaran Spontan
RTTL	35%	58,7%
Radio Timor Kmanek	16%	27,2%
Radio Rakambia	8,9%	14,4%
Radio Falintil	5,5%	9,6%
Radio Povo Viqueque	6,5%	3,1%
Radio Klibur	4%	4,7%
Radio Australia	3,6%	5,4%
BBC	3,4%	3,8%
Radio Lorico Lian	3,3	3,6%
Radio Baucau	2,4	5,2%

Sumber:: Yayasan Hirondele, *Timor-Leste National Media Survey, Final Report, Mei 2007.*

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

3. Catatan Sektor: Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi

Selayang Pandang

Sejak kemerdekaannya, Timor-Leste telah mencapai kemajuan luar biasa dalam menciptakan lembaga-lembaga negara yang mutlak untuk menjalankan perekonomian. Akan tetapi, prestasi ekonomi dalam arti pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan mengecewakan. Dengan prospek terbatas untuk investasi swasta segera, belanja Pemerintah merupakan sumber pertumbuhan ekonomi utama dalam jangka pendek. Dengan meningkatnya pendapatan minyak bumi, negara tidak lagi begitu terbatas seperti semula di bidang investasi dan belanja publik. Akan tetapi, kapasitas terbatas tetap merupakan hambatan pokok untuk melaksanakan investasi-investasi yang direncanakan dan penggunaan sumber daya yang produktif. Langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan bersama-sama dengan upaya untuk membangun jaring keamanan sosial akan penting dalam jangka pendek untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memberi dukungan kepada mereka yang rapuh. Untuk memajukan pertumbuhan dalam jangka menengah, langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan untuk investasi dan kewirausahaan swasta akan perlu.

Persoalan-persoalan pokok

- ***Pertumbuhan dalam pendapatan minyak bumi.*** Timor-Leste sekarang mempunyai surplus anggaran dan eksteren yang besar dan akumulasi tabungan dalam dana minyak bumi yang jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan semula. Ini memberi landasan sumber daya penting untuk membangun ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan pendapatan minyak bumi berarti belanja anggaran yang “lestari” – belanja yang dapat berlangsung selamanya – sekarang diperkirakan lebih dari US\$ 300 juta per tahun. Angka ini sangat mungkin akan bertumbuh begitu sumber daya dari pangsa Timor pada lapangan *Greater Sunrise* mulai mengalir, akan tetapi bisa bervariasi sesuai dengan harga energi dunia.
- ***Hasil-hasil ekonomi selama lima tahun terakhir kurang.*** Ekonomi non-minyak telah mandek dan tingkat pengangguran dan kemiskinan tinggi dan meningkat. Nyaris semua orang Timor mencari nafkah di sektor-sektor perekonomian non-minyak. Akan tetapi, pendapatan per kapita dalam ekonomi non-minyak mandek dalam arti riil sejak tahun 2002. Pada waktu yang sama, pendapatan nasional per orang, termasuk sektor minyak, telah berlipat ganda akibat pendapatan yang meningkat dari minyak bumi (Tabel 1). Sekitar 40% penduduk diperkirakan miskin pada tahun 2001, dan mungkin sekali telah bertambah secara signifikan, mengingat merosotnya pendapatan per kapita riil non-minyak selama tahun 2001-2006.
- ***Kurangnya investasi publik atau swasta telah mengakibatkan sedikit sekali kesempatan kerja baru.*** Pada tahun 2005, pengangguran menyeluruh di Dili diperkirakan 27%, sedangkan pengangguran pemuda (usia 15-24) diperkirakan 40%. Dengan sekitar separuh

jumlah penduduk di bawah usia 18, pengangguran perkotaan dipastikan akan naik kecuali pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dapat ditunjang. Menurut laporan belum lama ini dari FAO/WFP, sejumlah 220.000 penduduk Timor akan memerlukan bantuan pangan selama bulan-bulan gersang antara Oktober 2007 sampai Maret 2008.

Sektor Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi

Mekanisme utama untuk memicu ekonomi dalam jangka pendek adalah belanja Pemerintah yang ditingkatkan. Dalam keadaan sekarang dengan kerapuhan sosial, investasi swasta dalam ekonomi lokal (y.i. di luar sektor energi lepas pantai) tidak dapat diharapkan secara realistis untuk memimpin ekonomi.

Dengan demikian Pemerintah perlu secara substansial memperbaiki kemampuannya untuk melaksanakan prioritas belanja sebagaimana dicerminkan dalam anggaran tahunannya. Anggaran-anggaran yang lalu sayang sekali ditandai oleh pelaksanaan lemah khususnya di bidang pembelanjaan modal. Misalnya, pada akhir triwulan ketiga TF2006-07, kurang dari 3% pengeluaran modal atas dasar komitmen sesungguhnya dicairkan, menggagalkan sasaran-sasaran pembangunan yang sah. Pelaksanaan anggaran yang lebih kuat akan memungkinkan pembangunan infrastruktur dan rekonstruksi maju sebagaimana dimaksudkan, dan dengan demikian menyediakan landasan untuk menaikkan penghasilan melalui penciptaan pekerjaan. Rekomendasi-rekomendasi khusus telah diberikan oleh badan-badan internasional tentang percepatan pelaksanaan anggaran.⁵ Yang terutama penting ialah mengalihkan tanggungjawab tertentu, terutama dalam hal pengadaan, baik selintas dan di dalam kementerian-kementerian sejalan dengan kapasitas yang ada untuk mendobrak kemacetan. Upaya-upaya untuk memperkuat kapasitas dengan mengisi lowongan jabatan manajemen dan penasihat dengan tenaga lokal atau tenaga asing juga harus ditelusuri. Membuat ketentuan untuk akses lebih besar terhadap, dan penggunaan, perangkat lunak manajemen keuangan oleh kementerian-kementerian struktural dan menggunakan Kantor Manajemen Proyek yang didanai dari luar untuk memacu kapasitas lokal dalam jangka pendek, merupakan langkah-langkah tambahan yang menentukan. Pelelangan internasional untuk proyek infrastruktur besar juga seharusnya dipertimbangkan, dan kepiawaian luar negeri seharusnya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan investasi dan penciptaan pekerjaan.

Ada keperluan mendesak untuk membangun jaring pengaman sosial untuk memberi tunjangan segera kepada rakyat miskin dan segmen-segmen rapuh di antara penduduk. Dalam jangka pendek, program-program berikut patut dipertimbangkan: (i) program pekerjaan umum untuk menawarkan pekerjaan dengan upah rendah kepada mereka di antara yang miskin yang bisa kerja; (ii) program transfer untuk yang cacat; (iii) program penyediaan makanan di sekolah atau program transfer tunai bersyarat yang dapat memperbaiki angka pendaftaran dan pertahanan untuk anak-anak usia sekolah; dan (iv) program transfer tunai menyeluruh yang sederhana untuk membagi sebagian kecil dari keuntungan pendapatan minyak bumi yang meningkat dengan penduduk. Program-program tersebut tidak saja dapat menghasilkan keuntungan langsung dalam arti pengurangan kemiskinan, tetapi juga dapat memberi sumbangan langsung kepada peningkatan resapan buruh dalam perekonomian, meningkatkan

⁵ Lihat, misalnya, Aide Mémoire Bank Dunia tgl 26 Juli 2006.

keamanan pangan rumah tangga, dan membangun modal manusia yang akan sangat diperlukan untuk pertumbuhan di masa datang.

Dalam jangka menengah, ekonomi Timor-Leste hanya bisa makmur jika kondisi untuk investasi dan kewirausahaan swasta menjadi lebih menguntungkan. Dalam hubungan ini, lingkungan usaha yang diperbaiki juga perlu ditelusuri. Dilihat dari segi posisi dan prospek fiskal yang nyaman, mengurangi dan menyederhanakan tarif impor dan pajak penghasilan untuk ekonomi non-minyak (tetapi bukan biaya pemakai dan kegunaan) dapat dibenarkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk memperbaiki daya tarik Timor-Leste sebagai tujuan investasi swasta. Ini juga lebih diinginkan daripada insentif atau preferensi pajak yang rumit, dan sulit untuk dilaksanakan, terutama mengingat hambatan-hambatan kapasitas.

Fakta dan Angka

Tabel 1. Timor-Leste: Indikator-Indikator Ekonomi Pokok

	2002	2003	2004	2005	2006 e/
Keluaran dan Harga					
Angka pertumbuhan riil PDB (non-minyak), %	-6.7	-6.2	0.3	2.3	-1.6
Inflasi, % perubahan	9.5	4.2	1.8	0.9	5.7
INB, berdasarkan harga sekarang, juta \$	352	349	507	692	847
PDB Non-minyak	343	336	339	350	356
Penghasilan Minyak dan Gas Bumi	9	13	168	342	492
Penduduk, ribuan	892	922	952	983	1015
PDB Non-minyak per Kapita, \$	385	364	356	356	351
INB per Kapita, \$	395	378	532	704	835
Sektor Ekstern, juta \$					
Ekspor Barang Dagangan	6	8	8	9	8
Impor Barang Dagangan	218	194	163	137	141
Neraca Perdagangan	-211	-186	-154	-127	-133
Jasa, bersih	-44	-37	-32	-27	-33
Penghasilan Luar Negeri, bersih atau dengan: Royalti minyak dan gas bumi dan bunga	4	4	43	83	117
Transfer berjalan, bersih Atau dengan pendapatan minyak dan gas bumi	2	2	39	79	115
Transfer berjalan, bersih Atau dengan pendapatan minyak dan gas bumi	123	134	246	363	460
Atau dengan: bantuan Internasional	7	11	129	264	377
Saldo Rekening Koran	116	123	118	100	82
Rekening Modal dan Keuangan	-128	-85	103	292	411
Atau dengan: transfer modal resmi	148	103	18	49	71
Saldo Menyeluruh	59	44	41	41	44
	20	18	121	341	482

Operasi Fiskal (Anggaran Pemerintah Pusat, dasar tunai, tahun fiskal (July-June)), \$ juta

	TF02-03	TF03-04	TF04-05	TF05-06 p/	TF06-07 Triw1- Triw3
Pendapatan Total, termasuk hibah	81.3	105.4	336.7	485.0	702.1
Pendapatan Minyak dan gas bumi	30.9	40.3	261.0	448.0	674.3
Pendapatan dalam negeri	19.3	29.2	36.9	33.4	27.8
Pengeluaran	68.5	68.4	71.4	93.0	80.8
Pengeluaran berjalan	53.3	53.1	56.4	66.3	75.2
Pengeluaran Modal 1/	4.7	2.4	2.8	15.7	5.6
Saldo Fiskal Menyeluruh	12.8	37.0	265.3	392.1	621.3
P.M: Tabungan Kumulatif Minyak dan Gas Bumi	10.5	13.9	70.1	649.8	1,218.0

e = estimate (perkiraan), p = preliminary (sementara);

1/ \$10.5 juta dari \$15.7 juta pengeluaran modal untuk TF2005-06 adalah untuk permodalan BPA

Sumber-sumber: Instansi pemerintah Timor-Leste, IMF, dan Bank Dunia

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

4. Catatan Sektor: Pendidikan

Selayang Pandang

Pendidikan mengalami sekedar kemajuan sejak kemerdekaan. Kenaikan jumlah total anak yang terdaftar di sekolah diimbangi dengan perlunya menampung penduduk usia sekolah yang meningkat dengan deras, guru yang kurang siap, infrastruktur fisik yang tidak memadai atau buruk, pelaksanaan anggaran yang lemah, dan tidak ada akses terhadap buku pelajaran dan bahan pengajaran dan pembelajaran lain. Tingkat putus sekolah dan mengulang kelas tinggi – hanya 46% dari anak-anak yang masuk sekolah dasar mencapai kelas 6, 80% dari anak-anak yang masuk pendidikan menengah pertama mencapai kelas 9. Kementerian Pendidikan sedang melaksanakan Rencana Strategis untuk Penyelesaian Pendidikan Dasar Menyeluruh yang dirancang untuk menciptakan kesempatan, menjelang tahun 2015, untuk setiap anak di Timor-Leste untuk menyelesaikan pendidikan dasar bermutu. Kementerian Pendidikan masih perlu menggariskan strategi untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Persoalan-persoalan pokok

- ***Membentuk angkatan pengajar yang kuat:*** Langkah pertama sebaiknya artikulasi strategi pelatihan guru yang menggambarkan bagaimana Pemerintah akan membentuk, memelihara dan melatih guru yang mampu. Tindakan-tindakan konkrit yang diperlukan adalah: (i) penentuan kebutuhan (jumlah menurut tingkat/lokasi) selama jangka menengah sampai jangka panjang; (ii) membentuk program pelatihan pra-layanan jasa dan dalam pelayanan jasa dan membangun lokasi-lokasi untuk pelatihan; (iv) menyetujui kerangka kompetensi mengajar; dan (iii) program insentif untuk mendukung penempatan guru dan pembangunan profesional/karier berlanjut.
- ***Menaikkan ambang pengadaan sekarang menjadi US\$ 250.000:*** Sekarang, Kementerian Pendidikan mempunyai wewenang untuk memproses intern kontrak sampai dengan US\$ 100.000, akan tetapi jumlah itu sekarang tidak cukup mengingat bahwa kebanyakan kontrak pembangunan sekolah lebih tinggi. Menaikkan ambang menjadi US\$ 250.000 akan membantu Kementerian Pendidikan tetap meneruskan rencana pembangunan rehabilitasi 120 gedung sekolah pada tahun 2007/08. Hal ini menentukan karena 83% dari ruangan kelas memerlukan rehabilitasi atau penggantian.
- ***Memperbaiki cara pengajaran bahasa-bahasa resmi kepada para guru dan di sekolah-sekolah:*** Mengkaji bagaimana bahasa Portugis dan bahasa Tetum sedang diajar sekarang, dengan dukungan bahasa ibu, di sekolah-sekolah akan merupakan langkah penting pertama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bahwa semua anak harus lancar berbahasa Portugis dan bahasa Tetum pada akhir kelas 6. Strategi pengajaran efektif dari kedua bahasa resmi tersebut harus mempertimbangkan bahwa sekitar 60% anak-anak tidak menggunakan kedua bahasa tersebut di komunitas mereka.
- ***Akses terhadap buku pelajaran bermutu tinggi:*** Kebanyakan sekolah tidak mempunyai buku pelajaran dan bahan pengajaran lain. Untuk mendukung tujuan ini, Kementerian Pendidikan seharusnya menetapkan prosedur yang efektif dan transparan untuk

membangun, memilih, mengadakan, dan menyalurkan buku, dan bahan pengajaran/pembelajaran lain. .

- **Melanjutkan dan memperbaiki Skema Hibah Sekolah:** Program ini dimulai menjelang akhir tahun 2006. Sejauh ini sekitar US\$ 900.000 telah dicairkan kepada sekolah-sekolah. Ada bukti bahwa rancangan program Kementerian Pendidikan perlu dikuatkan, bahwa pengaman-engan program, pemantauan program, dan pengkajian kebutuhan sekolah semuanya dapat diperbaiki.

Sektor Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi

Dengan angka kesuburan yang termasuk salah satu paling tinggi di dunia, masyarakat Timor sangat muda dengan sekitar 50% penduduk di bawah usia 15 tahun. Hal ini akan membebani Pemerintah untuk terus menerus menambah jumlah ruangan kelas, buku dan guru untuk peningkatan jumlah anak yang masuk sekolah tiap tahun.

Kompetensi guru merupakan masukan paling penting terhadap sekolah. Jika mutu pendidikan ingin ditingkatkan secara substansial, adalah mutlak bahwa Kementerian Pendidikan memperkuat pelatihan guru pra-layanan jasa dan dalam pelayanan jasa dan menegakkan standar-standar untuk penyampaiannya, pengawasan dan pengkajian dampak. Suatu kerangka kompetensi guru, yang menguraikan standar-standar minimal yang diperlukan seorang guru di Timor-Leste, telah dikembangkan. Kerangka tersebut dimaksud sebagai alat untuk Kementerian Pendidikan untuk memastikan bahwa semua pelatihan guru yang diberikan memenuhi standar yang memadai dan dirancang dan disampaikan sebagaimana mestinya.

Semua sekolah di Timor-Leste tidak memiliki bahan belajar yang memadai. Satu-satunya bahan yang diterima saat ini oleh semua siswa sekolah dasar dan pra-sekolah menengah adalah majalah *Lafaek*. *Lafaek* diproduksi dan disalurkan oleh CARE. Kementerian Pendidikan membiayai majalah tersebut dan memiliki pengendalian redaksi menyeluruh. Di samping itu, bahan belajar-mengajar yang dirancang di Timor Leste untuk kelas 1 disalurkan dalam tahun 2006/07 untuk mendukung kurikulum pendidikan dasar yang baru. Bahan-bahan untuk kelas-kelas lain akan menyusul dalam tahun-tahun mendatang ketika kurikulum pendidikan dasar yang baru digulirkan. Diperlukan lebih banyak bahan – baik buku pelajaran maupun bahan belajar-mengajar. Kementerian perlu menetapkan kriteria seleksi dan proses pengadaan transparan yang akan memastikan mutu maupun efektivitas biaya. Kementerian juga perlu membangun kapasitas untuk pengembangan bahan maupun pengkajian dan seleksi sumber daya dari luar. Yang penting juga adalah bahwa buku-buku pelajaran mencerminkan kurikulum baru yang tidak selamanya terjadi.

Kurang dari 50% anak sekolah menggunakan Tetum sebagai bahasa ibunya. Jauh lebih sedikit menguasai bahasa Portugis ketika mereka mulai bersekolah. Anak-anak mungkin akan menghadapi masalah kebahasaan dan konseptual di dalam kelas, ketika mereka mencoba transisi dari bahasa ibunya ke bahasa Tetum dan/atau bahasa Portugis di kelas-kelas awal. Mungkin mereka tidak belajar membaca dan menulis dengan baik dalam kedua bahasa tersebut dan kemungkinan lebih besar bahwa mereka akan putus sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa ketrampilan dasar melek huruf dan berhitung dipelajari paling baik bila diajarkan dalam bahasa ibu dan bahwa bahasa tambahan dipelajari paling baik bila anak-anak memulai proses belajar dalam bahasa ibunya. Penelitian juga menunjukkan bahwa bahasa (bahasa) tambahan dipelajari paling baik bila praktek-praktek pengajaran yang dibangun atas pengetahuan bahwa bahasa-bahasa tersebut bukan merupakan bahasa ibu. Untuk memajukan sistem pendidikan

bermutu, sangat menentukan untuk mengkaji bagaimana Tetum dan Portugis diajarkan di sekolah-sekolah, dan juga mendasar bahwa Kementerian Pendidikan dan semua Mitra Pembangunan bekerja sama erat tentang pembangunan mendesak daripada suatu pelatihan guru terencana dan berlanjut yang akan memungkinkan mereka memperoleh kompetensi-kompetensi tertentu dalam kedua bahasa resmi.

Prestasi siswa rendah. Sebagai contoh, survei tahun 2006 menemukan bahwa 80% siswa kelas 3 gagal mencapai tingkat minimum pembelajaran matematika. Sangat besar kemungkinan bahwa mutu rendah pendidikan merupakan penyumbang utama terhadap angka tinggi di bidang pengulangan dan putus sekolah. Ada kebutuhan akan sistem pengkajian yang komprehensif dan standar untuk menentukan kinerja sistem dan perorangan.

Pada akhir tahun 2006, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memulai program hibah sekolah berskala nasional untuk menggantikan “caixa escolar”. Dana dicairkan kepada sekolah melalui kepala kabupaten. Sekolah membelanjakan hibah tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing (misalnya, reparasi kecil), walaupun banyak kepala sekolah tidak jelas untuk tujuan apa mereka diizinkan membelanjakan hibah tersebut. Hibah sekolah merupakan wahana yang baik untuk mentransfer dana pada tingkat sekolah, untuk melibatkan orang tua dan akibatnya dapat menyumbang terhadap pendidikan sekolah yang lebih baik. Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) membangun landasan untuk melibatkan komunitas ke dalam proses pendidikan. Melibatkan komunitas ke dalam persekolahan, misalnya untuk memantau hibah sekolah, sangat penting sebagai alat mobilisasi sosial, partisipasi, dan meningkatkan akuntabilitas sekolah terhadap orang tua murid.

Walaupun ada sekitar 16 lembaga yang menyediakan pendidikan tinggi, tidak ada sistem akreditasi atau pengendalian mutu. Tidak adanya pengaturan ini berarti bahwa mutu semua lembaga tidak diketahui. Menanggapi keadaan ini Kementerian Pendidikan telah mulai mengembangkan pengaturan pemastian mutu untuk bagian pendidikan tinggi dan merancang peraturan dan undang-undang yang mengatur standar dan kerjasama di bidang pendidikan tinggi.

Fakta dan Angka

Tahun Pembelajaran	2003/04	2004/05	2005/06
Pendidikan Dasar			
Sekolah ¹	744	761	762
Siswa	169,958	169,341	151,393
Guru	4,862	5,415	5,087
Rasio Siswa-Guru	36	33	37
Pendaftaran kotor	101	98	87
Pendaftaran bersih	77	77	69 ²
Angka Pengulangan Kelas (%)		11	16
Angka Putus Sekolah (%)		12	25
Pendidikan Menengah Pertama			
Sekolah	120	129	135
Siswa	40,368	41,516	44,651
Guru	1,135	1,652	1,289
Rasio Siswa-Guru	36	25	35
Pendaftaran kotor	59	59	62
Pendaftaran bersih	33	31	32
Pendidikan Menengah			
Sekolah	55	76	65
Siswa	20,23	24,493	26,433
Guru	670	725	585
Rasio Siswa-Guru	31	34	45
Pendaftaran kotor	36	40	41
Pendaftaran bersih	21	34	33

Catatan: ¹ Walaupun peningkatan jumlah sekolah relatif kecil angka-angka ini menyembunyikan peningkatan substansial dalam jumlah ruangan kelas yang telah terjadi selama lima tahun terakhir dan kenyataan bahwa sejumlah besar sekolah telah direhabilitasi sepenuhnya.

² Perhatikan bahwa pendaftaran pada tahun 2005 substansial lebih rendah dibandingkan dengan kedua tahun sebelumnya. Ini hampir pasti merupakan penyimpangan akibat konflik sipil ekstensif dan tersebar luas pada tahun 2005/06 dan seharusnya jangan dilihat sebagai bukti tentang tren menurun. Ini juga telah mempunyai akibat menurunkan indikator Angka Pendidikan Kotor dan Angka Pendidikan Bersih untuk tahun 2005. Bila data siswa pengungsi (IDP) untuk tahun 2006/07 dimasukkan dan diproses tingkat pendaftaran untuk tahun 2005/06 dapat disesuaikan dan keakuratan rangkaian waktu dapat dipelihara. Kendati dengan penyesuaian tersebut, pada tahun 2003/04 dan tahun 2004/05 pendaftaran total sebenarnya turun walaupun ukuran kohort usia sekolah dasar bertumbuh lebih dari 2% selama jangka waktu tersebut. Kecuali bila laju pertumbuhan pendaftaran melebihi laju pertumbuhan penduduk usia sekolah, indikator-indikator akses dan partisipasi tidak akan membaik.

Ukuran Prestasi Pembelajaran:**Persentase Siswa Yang Gagal Memperagakan Tingkat Pembelajaran Minimal**

Kelas	Mata Pelajaran	Persentase
3	Tetum	86%
3	Portugis	96%
3	Matematika	79%
5	Tetum	83%
5	Portugis	90%
5	Matematika	76%

Tingkat pembelajaran minimal ditetapkan sebagai akuisisi yang diperagakan dari 50% kurikulum, di mana 50% tersebut terdiri dari ketrampilan-ketrampilan yang ternyata diakuisis paling mudah.

Pendaftaran Pendidikan Tinggi di Timor-Leste

	<i>2005/06</i>	<i>2006/07</i>
1. Universidade Timor-Lerosa'e	10,461	10,467
2. Universidade Dili	1,414	450
3. UNPAZ (Dili)	1,476	1,591
4. Universitas Oriental (UNITAL Dili)	550	858
5. Universidade Mau Lear (UNMA, Dili)	388	340
6. Universidade Comunidade Matebian (UCM, Baucau)	175	176
7. Universidade Dom Matinho Lopes (UNIMAR, Dili)	191	360
8. Universidade Jupiter (UNTER, Dili)	150	N/A
9. Boa Venura Pertanian University (Same)	112	N/A
10. Dili Institute of Technology (DIT, Dili and Oecussi)	493	205
11. Escola Catolica de Formacao de Professores de Baucau	153	150
12. Intituto Superior de Formacao de Professores e Ciecncias	435	
13. ISUFPROCED Aileu - Teachers Training Branch	72	N/A
14. ISUFPROCED Los Palos-Teachers Training Branch	45	N/A
15. Intituto de Ciencias Religiosas (ICR, Dili)	135	150
16. Profissional de Canossa (INTEC, Dili)	113	148
17. The Institute of Business (IoB, Dili West)	222	150
18. East Timor Kopi Academy (ETICA, Gleno)	150	207
19. Akademi Computer Manajemen Sistem (CLICK, Dili)	374	110
20. Academy for International Relations (Instituto Superior de Ciencias-Politica e Letras, Dili)	180	NA

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

5. Catatan Sektor: Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Selayang Pandang

Negara berpenghasilan rendah secara khas ditandai oleh kekayaan per kapita yang sangat rendah dan bagian yang sangat besar daripada kekayaan tersebut dalam bentuk sumber daya alam. Dengan demikian, Timor-Leste sangat mengandalkan modal alam – yaitu sumber daya di bawah tanah, tanah pertanian dan hutan – untuk mata pencahariannya. Cadangan minyak bumi merupakan bagian terbesar dari kekayaan alam Timor-Leste. Akan tetapi kekayaan tanah juga penting, dengan 73,5% penduduk hidup di daerah pedesaan, di mana pertanian merupakan 95% produk. Kebanyakan kepunyaan penduduk miskin pedesaan diberi oleh alam (misalnya kayu api, produk hutan bukan kayu, tanaman), daripada dalam bentuk aset buatan manusia (misalnya, bangunan dan infrastruktur). Deboisasi dan degradasi tanah disebabkan terutama oleh pertanian babat dan bakar dan ekstraksi kayu api mengancam kekayaan alam negara dan sumber mata pencaharian. Degradasi tanah dalam berbagai bentuknya sangat mungkin akan berdampak pada air (melalui erosi yang berdampak pada badan-badan air), keanekaragaman hayati (melalui kehilangan habitat darat, terumbu karang, dan degradasi perikanan pesisir), dan tanah (melalui kehilangan tanah). Di samping itu, bentuk-bentuk sumber daya alam lain seperti perikanan laut dalam bisa tunduk pada eksploitasi berlebihan. Sebagian dari investasi Timor-Leste di masa datang bisa memperbaiki lembaga lingkungan hidup Timor-Leste dan kerangka hukum, yang kurang berkembang. Negeri ini tidak mempunyai kapasitas untuk menghadapi tantangan-tantangan lingkungan hidup dan dengan demikian menggunakan kekayaannya secara lestari.

Persoalan-persoalan pokok

- ***Menghentikan deboisasi dan degradasi tanah.*** Timor-Leste memiliki salah satu tingkat deboisasi paling tinggi di kawasan ini dan sedang kehilangan daerah hutan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi. 53.7% dari bumi Timor-Leste ditutupi hutan, akan tetapi laju deboisasi sekitar 1,2% per tahun.
- ***Melakukan investasi dalam program lingkungan hidup dan sumber daya alam.*** Timor-Leste mempunyai peluang unik untuk mentransformasikan modal alam yang dapat dihabiskan ke dalam bentuk-bentuk modal lain yang dapat dieksploitasi secara lestari untuk pembangunan negara. Agar hal ini bisa terjadi, adalah penting untuk melakukan investasi ke dalam program lingkungan hidup dan program sumber daya alam untuk menghentikan degradasi lingkungan hidup. Program-program tersebut bisa bersifat padat karya dan disasarkan pada daerah pedesaan, misalnya reboisasi dengan spesies asli, pembasmian rumput siam dan mengendalikan erosi. Memperhatikan pelestarian dan kesinambungan jangka panjang dalam perencanaan dan pembangunan juga penting. .

- ***Menciptakan kerangka kelembagaan dan hukum lingkungan hidup yang sesuai.*** Kebanyakan peraturan yang telah diundangkan dan dirancang didasarkan atas undang-undang dari negara-negara lain dan telah diterima tanpa analisis kritis apakah mereka sesuai dengan kondisi di Timor-Leste. Ini menghasilkan peraturan-peraturan yang memberatkan secara berlebihan di beberapa bidang seperti undang-undang pengkajian dampak lingkungan hidup yang diusulkan, yang melibatkan proses-proses luar biasa rumit. Di bidang-bidang lain terdapat kesenjangan penting, seperti kehutanan, air, tanah, undang-undang nasional tentang lingkungan hidup antara lain.

Sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Jauh lebih banyak perlu diketahui tentang keadaan lingkungan hidup di Timor-Leste, termasuk sebab-sebab penghabisan hutan dan degradasi lingkungan hidup. Ekstraksi kayu api tampaknya tidak mungkin merupakan sebab utama penghabisan hutan. Kebutuhan kayu api oleh rumah tangga dan kegiatan komersial di bawah pertumbuhan alami hutan-hutan yang bisa diakses. Konversi hutan menjadi lahan pertanian lebih besar kemungkinannya merupakan pemacu deboisasi utama. 76% angkatan kerja di Timor-Leste bertekun di pertanian sebagai penyambung hidup. Dengan asumsi bahwa tidak ada pertumbuhan dalam produktivitas dan pertumbuhan penduduk di daerah pedesaan sekitar 5%, perluasan lahan pertanian untuk memelihara kepadatan pedesaan konstan bisa terjadi dengan laju sekitar 15.000 hektar per tahun. Jika perluasan terjadi di daerah berhutan, ini akan mewakili penurunan daerah hutan sekitar 1,8% per tahun. Konversi hutan menjadi lahan pertanian ini tidak dapat didukung.

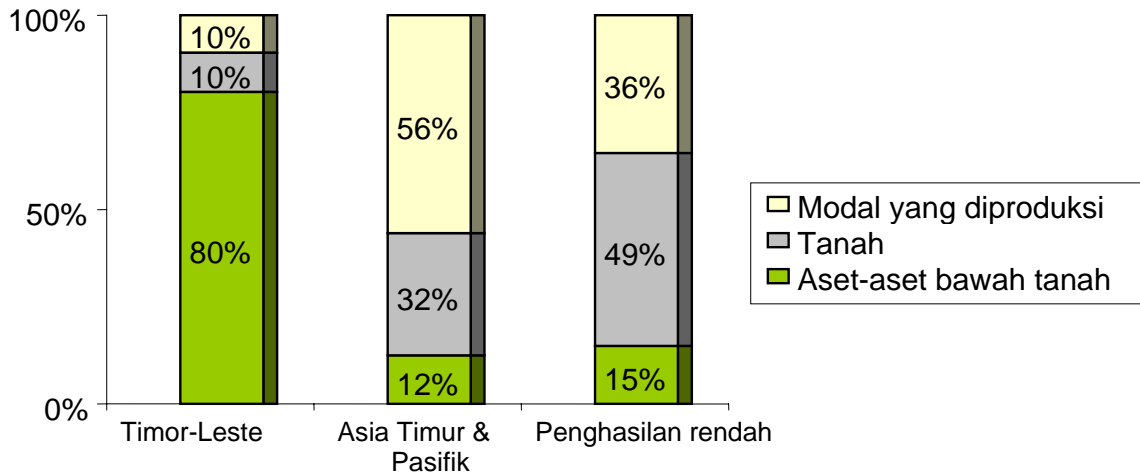
Walaupun sebab-sebab sosial yang tepat masih harus ditentukan, ada kemungkinan bahwa degradasi lingkungan hidup dengan hak kepemilikan yang tidak ditetapkan dengan baik bisa memberi insentif untuk mendegradasi lingkungan hidup. Paling sedikit dua faktor berkaitan dengan kepemilikan tanah tampaknya memacu pembabatan tanah hutan di berbagai bagian negeri. Hutan tidak dilihat oleh komunitas-komunitas sebagai sumber daya yang langka dan oleh karena itu hanya sedikit pengendalian komunal dilaksanakan terhadap pemakaiannya. Hak milik alternatif atas tanah hutan mungkin tidak ditetapkan sama jelasnya seperti untuk tanah pertanian, dan rezim akses terbuka mungkin dominan. Untuk rumah tangga-rumah tangga manfaat lahan pertanian tambahan bisa melebihi manfaat hutan yang berlimpah. Sistem adat untuk menatausahakan tanah dan menyelesaikan sengketa penguasaan tanah mungkin tidak begitu cocok untuk memastikan bahwa ekosistem-ekosistem pokok dilestarikan menghadapi tekanan penduduk. Walaupun UUD mengakui kepemilikan negara terhadap sumber daya hutan, sumber daya tersebut secara tradisional dianggap sebagai sumber daya komunal yang tersedia untuk kebutuhan-kebutuhan komunitas. Karena tidak ada penegakan hukum, ini menciptakan *de facto* insentif untuk mengkonversikan tanah hutan menjadi lahan pertanian dan dengan demikian memastikan hak eksklusif untuk menggunakan tanah tersebut.

Konservasi dan pengaturan lingkungan hidup karena sifatnya adalah multi-sektoral. Sampai sekarang, di Timor-Leste, tanggungjawab sumber daya alam dan lingkungan hidup dibagi melintasi bekas Kementerian Kebijakan Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi, bekas Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan bekas Menteri Negara untuk Koordinasi Lingkungan Hidup, Peraturan Teritorial dan Pembangunan Fisik. Tanggungjawab yang dibagi tersebut mencerminkan sifat lintas-sektor isu ini, tetapi juga menciptakan sekedar

kebingungan dan tumpang tindih. Penting untuk memelihara pemisahan antara fungsi-fungsi pengaturan dengan fungsi-fungsi sektoral standar untuk menghindari benturan kepentingan. Demikian pula, penting bahwa fungsi-fungsi tersebut menerima bobot yang sama. Sebelumnya, beberapa fungsi regulasi lingkungan hidup berada di bawah Menteri Negara Lingkungan Hidup, yang tidak mempunyai status yang sama seperti Kementerian-kementerian dalam Dewan Menteri. Penting untuk memberi tingkat penting yang sama kepada fungsi-fungsi regulasi lingkungan hidup seperti kementerian-kementerian sektoral yang dianggap diatur olehnya.

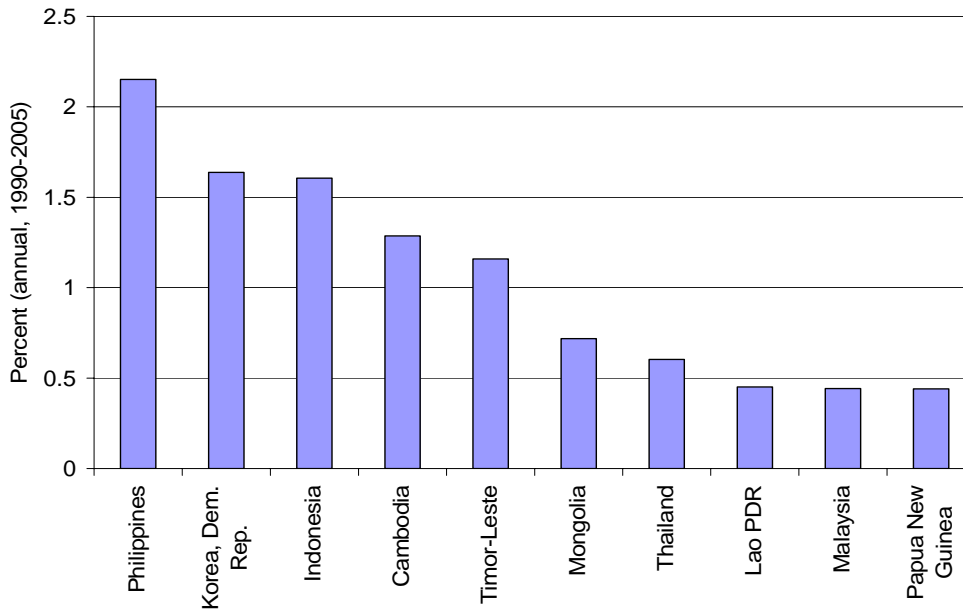
Fakta dan Angka

Kekayaan Nyata di Timor-Leste



Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia (draft)

Sepuluh Laju reboisasi tertinggi di Asia Timur dan Pasifik



Sumber: Indikator-Indikator Pembangunan dunia

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

6. Catatan Sektor: Pengawasan Ekstern dan Pengendalian Intern

Selayang Pandang

Timor-Leste telah membentuk lembaga-lembaga pokok dan mekanisme pengawasan ekstern dan pengendalian intern. Lembaga dan mekanisme tersebut dapat memastikan bahwa sumber daya nasional dan kekuasaan negara digunakan sebagaimana mestinya, tetapi diperlukan lebih banyak kerja untuk membuatnya efektif sepenuhnya. Penting untuk memperkuat pengawasan parlemen, mengkonsolidasikan peranan badan-badan independen, dan jelas mengisyaratkan komitmen Pemerintah terhadap tata kelola ekonomi. Langkah-langkah penting bisa termasuk pembentukan daftar aset dan penghasilan, gerakan ke arah transisi audit ekstern ke manajemen Pengadilan Tinggi, dan penciptaan kantor-kantor audit intern dalam kementerian-kementerian struktural yang didukung dan dikoordinasikan oleh Kantor Inspektur Jenderal. Tindakan efektif dalam kasus-kasus korupsi, penyelewengan administratif dan penyalahgunaan kekuasaan adalah mutlak untuk kepercayaan masyarakat umum terhadap negara.

Persoalan-persoalan pokok

- ***Memperkuat peranan Parlemen.*** Parlemen bisa memperkuat pengawasannya atas Pemerintah melalui penelitian dengan cermat daripada akun dan audit Pemerintah, dan pemantauan pelaksanaan anggaran. Diskusi terbuka komisi parlemen dan sidang paripurna dapat menyediakan forum untuk menindaklanjuti hasil-hasil dengan kementerian-kementerian. Pemantauan ketaatan terhadap pengaturan manajemen pendapatan minyak bumi, termasuk melacak penarikan dari Dana Minyak Bumi, juga seharusnya merupakan prioritas bagi Parlemen.
- ***Memberdayakan Kantor Provedor.*** Mengubah undang-undang pokok Kantor *Provedor* (PDHJ) untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan berlebihan tentang penggunaan bahan yang dikumpul selama penyidikan sebagai bukti dalam pengusutan kriminal (bagian 47 dari UU PDHJ merujuk) akan membuat PDHJ lebih efektif. Efektivitas operasional Kantor tersebut juga akan bermanfaat bila diberi tingkat kebebasan keuangan lebih tinggi.
- ***Menciptakan daftar penghasilan dan aset.*** Mekanisme-mekanisme untuk menerima, memantau dan menyimpan pernyataan aset dari Pejabat Pemerintah senior, petugas pengadaan dan Bea Cukai, anggota dari Badan Penasihat Investasi untuk Investasi Dana Minyak Bumi, dan anggota Majelis Permusyawaratan akan memperbaiki manajemen benturan kepentingan dan menghalangi korupsi.
- ***Menyetujui UU pokok untuk Kantor Inspektur Jenderal (OIG)*** [Office of the Inspector General]. Rancangan sedang ditangguhkan pada Dewan Menteri. Persetujuan diperlukan untuk memungkinkan OIG melakukan penyidikan, audit dan pemeriksaan independen, dan

menciptakan kemampuan inspeksi dalam kementerian-kementerian dan pemerintahan kabupaten.

Sektor Pengawasan Ekstern dan Pengendalian Intern

Mekanisme pengawasan dapat menyediakan “check and balance” penting terhadap tindakan eksekutif. Parlemen, Presiden, *Provedor*, Kehakiman, dan media independen merukan beberapa mekanisme pengawasan di Timor-Leste, masing-masing berada dalam tahap pembangunan yang berbeda. Kendali-kendali intern, seperti Kantor Inspektur Jenderal dan kantor-kantor audit intern, dirancang untuk mendeteksi perbuatan salah dan memajukan praktek-praktek terbaik dalam operasi-operasi pemerintahan.

Parlemen jarang menggunakan peranan konstitusionalnya untuk meneliti dengan cermat rancangan undang-undang, kebijakan Pemerintah atau tindakan Pemerintah. Akibatnya Parlemen secara luas dianggap merupakan perpanjangan kekuasaan eksekutif. Untuk memperkuat peranannya di bidang pengawasan, Parlemen bisa secara teratur mengundang para menteri untuk menyampaikan laporan tentang program dan kemajuan dalam layanan jasa. Penelitian sangat cermat terhadap anggaran negara juga akan membantu. Parlemen juga dapat langsung mengadakan dialog dengan Majelis Permusyawaratan, yang diberi mandat untuk menasihati parlemen tentang masalah-masalah berkaitan dengan Dana Minyak Bumi. Majelis bermaksud melaporkan kepada masyarakat umum setiap triwulan tentang pengelolaan dana minyak bumi dan mengadakan konsultasi masyarakat umum tiap tahun tentang prioritas pengeluaran publik dengan maksud melaporkan kembali kepada parlemen dengan rekomendasi-rekomendasi tertentu (bagian 30, UU Dana Minyak Bumi tahun 2005).

Dibuka dalam bulan Maret 2006, PDHJ diberi mandat oleh UUD untuk memerangi korupsi, memajukan tata kelola yang baik, supremasi hukum dan hak azasi manusia, dan memperbaiki kekerasan dan ketidakadilan. Kantor ini mempunyai tanggungjawab penting untuk menyikapi tindakan negara yang tidak adil atau kurang bijaksana dan melakukan hal itu melalui pemantauan, penyidikan dan jangkauan publik. Saat ini dengan staf berjumlah 46 orang, tantangan ke depan adalah memperlancar pemrosesan pengaduan dan merampungkan laporan-laporan tentang penyidikan (dari 123 pengaduan yang diperiksa hanya satu laporan diselesaikan). Pembentukan hubungan kemitraan kolaboratif dengan Kantor Inspektur Jenderal, kepolisian dan Kantor Jaksa Agung untuk penyidikan pengaduan dan penuntutan juga penting. Operasi-operasi juga dihalangi oleh tidak adanya independensi keuangan yang akan memungkinkan kantor tersebut menjalankan urusan sehari-harinya lebih efektif.

Pengaduan yang diajukan kepada PDHJ - Juli 2007

	Pengaduan	Tindakan yang diambil	Ditanggihkan
Penyelewengan administratif	64	Tujuh dirujuk kepada PNTL untuk penyidikan lebih lanjut Satu menghasilkan rekomendasi resmi kepada Kementerian Pendidikan	56
Hak Azasi Manusia	41	Enam dirujuk kepada PNTL untuk penyidikan lebih lanjut	35
Korupsi	18	Satu kasus dirujuk kepada PDHJ oleh MSA dirujuk kepada Jaksa Agung untuk tuntutan	17
	123		108

Catatan: Delapan kasus diprakarsai atas dasar kekuasaan hukum PDHJ untuk memprakarsai penyidikan, (pasal 35 dari UU PDHJ). Kasus tersebut termasuk satu kasus HAM, dua penyelewengan administratif; tiga kasus anti-korupsi; dua gabungan kasus penyelewengan administratif /anti-korupsi cases.

Alat-alat diagnostik dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat korupsi yang ada, jabatan publik yang peka, dan badan-badan yang tidak mempunyai kepercayaan masyarakat umum. Audit ekstern daripada prosedur pengadaan khususnya bisa berguna. Survei “Melakukan Bisnis” (2006) menunjukkan bahwa korupsi merugikan lingkungan usaha, menghalangi investasi dan pekerjaan, dan menggerogoti kepercayaan publik. Akan tetapi tidak ada data tuntas yang mutakhir tentang tingkat korupsi yang ada di Timor-Leste. Mekanisme pengawasan yang lemah, tidak ada kode etik pegawai negeri profesional, dan kesulitan untuk mengenali dan menangani benturan kepentingan memberi lingkungan di mana korupsi dapat bertumbuh subur. Usaha-usaha sebelumnya untuk menanggulangi korupsi termasuk serangkaian lokakarya tentang transparansi, akuntabilitas, dan ‘integritas dalam negara’, dan reshuffle dari beberapa kedudukan Kabinet. Kode etik, dihubungkan dengan UU Pegawai Negeri, memperbaiki arus informasi, dan dialog terbuka di dalam Pemerintah dan dengan masyarakat madani dapat memberi sumbangan terhadap penguatan integritas di dalam pemerintahan. Pelatihan kepemimpinan dapat membantu pejabat tinggi untuk meneladani integritas, yang bisa lebih berpengaruh daripada aturan dan peranturan.

Audit intern dan ekstern yang tidak memadai dan mekanisme akuntabilitas fiskal mengurangi kemampuan Pemerintah untuk mengawasi belanja publik dan melindungi terhadap korupsi. Audit ekstern dikontrakkan oleh bekas Kementerian Perencanaan dan Pembiayaan (*MoPF*) kepada suatu kantor akuntan. Audit Pemerintah terhadap rekening tahunan negara untuk TF05/06 telah selesai dan audit TF2006/2007 seharusnya dibahas oleh Parlemen sebelum akhir tahun. Audit Dana Minyak Bumi juga diumumkan belum lama ini, walaupun beberapa bulan setelah diselesaikan. Pengadilan Tinggi Perpajakan dan Audit, yang bertanggungjawab untuk audit ekstern belum ada, kapasitas untuk menciptakannya tidak akan ada untuk beberapa tahun ke depan. Pengadilan Tinggi tidak dapat melayani fungsi ini dalam jangka pendek. Gerakan ke arah pengaturan yang dituangkan dalam UUD dapat termasuk pembentukan suatu Komisi Audit pengadilan untuk mengawasi manajemen Kementerian Keuangan daripada kontrak. Kajian transisi untuk menggariskan langkah-langkah yang sesuai ke arah adopsi fungsi ini oleh pengadilan pada waktunya bisa membantu. Misalnya layanan jasa dapat diberi untuk membantu Pengadilan Tinggi mengelola kontrak untuk kantor audit dan menginterpretasikan hasil audit. Mekanisme-mekanisme juga harus diciptakan untuk menerima, merujuk silang dan menyimpan pernyataan aset dan

penghasilan untuk meningkatkan transparansi dan mengelola benturan kepentingan, dan memastikan pematuhan undang-undang. Pengembangan mekanisme dan pembinaan untuk para manajer dan staf tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi benturan kepentingan juga penting. Daftar-daftar aset dan penghasilan saja tidak cukup.

Kantor audit intern utama untuk Pemerintah, Kantor Inspektur Jenderal bertugas untuk melaksanakan penyidikan dan pemeriksaan. Pemeriksaan memastikan bahwa administrasi publik dilaksanakan sesuai dengan aturan dan peraturan yang mapan, sedangkan penyidikan dilaksanakan untuk memeriksa perbuatan salah yang dituduhkan. Sejak pembentukannya pada tahun 2000, OIG telah menyelesaikan 96 audit (16), pemeriksaan (3) dan penyidikan (78) dan telah mengunggah ringkasan kasus di situs webnya. Sepuluh kasus telah dirujuk kepada Jaksa Agung untuk penuntutan kriminal walaupun tidak ada yang dituntut. UU pokok untuk OIG belum diterima oleh Dewan Menteri. Ini menangguk rencana untuk membentuk dan melatih kantor-kantor audit intern di kementerian-kementerian struktural pokok. Kantor audit intern telah dibentuk dalam MoPF, MoH, MoI, dan MSA. Pengkajian berbasis risiko daripada kementerian-kementerian struktural juga tidak bisa dimulai sampai kantor tersebut diberdayakan oleh UU pokok untuk melakukan hal tersebut. Kantor tersebut telah sangat menekankan keterlibatan publik melalui siaran pers, kunjungan kabupaten dan pemeriksaan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi-fungsi OIG dan untuk memperkuat kapasitas audit intern pemerintahan lokal. Pengumuman ringkasan kasus-kasus OIG telah terbukti efektif untuk mencapai masyarakat umum.

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

7. Catatan Sektor: Gender

Selayang Pandang

Negara manapun tidak dapat mencapai seluruh potensinya jika separuh penduduknya, perempuan dan anak gadis, tidak mendapat manfaat yang sama seperti pria dan anak laki-laki dari barang dan jasa yang ditawarkan oleh Pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Pendidikan untuk perempuan merupakan salah satu indikator yang paling dekat berkorelasi dengan pertumbuhan pembangunan dan ekonomi secara menyeluruh. Hak sama untuk semua jenis kelamin diabadikan dalam konstitusi Timor-Leste dan tercermin di dalam Rencana Pembangunan Nasionalnya. Timor-Leste telah meratifikasi CEDAW⁶ dan Protokol Opsionalnya. Sejak kemerdekaan Pemerintah Timor-Leste telah mengambil langkah-langkah penting untuk memajukan kesetaraan gender, terutama melalui bekas Kantor untuk Memajukan Kesetaraan [Office of Promotion of Equality, atau OPE] di bawah Perdana Menteri.

Persoalan-persoalan pokok

- ***Menyetujui legislasi melawan kekerasan dalam rumah tangga.*** RUU tentang kekerasan rumah tangga masih menjadi prioritas yang perlu diselesaikan. Kekerasan dalam rumah tangga dan berbasis gender merupakan isu-isu utama yang mewakili lebih dari 50% kasus kriminal yang dilaporkan kepada polisi.
- ***Melibatkan perempuan dalam pembangunan perdamaian.*** Kendati perempuan yang paling banyak merasakan dampak daripada konflik selama bertahun-tahun di Timor-Leste, mereka telah dikesampingkan dalam proses pembuatan keputusan resmi dan upaya rekonsiliasi. Misalnya, hanya sedikit saja upaya untuk melibatkan perempuan sebagai perantara pada tahap-tahap awal krisis tahun 2006. Dapat dipertimbangkan untuk membentuk komisi khusus yang melibatkan perempuan sejak awal dalam merancang dan melaksanakan prakarsa pembangunan perdamaian.

Sektor Gender

Ketidakseimbangan gender masih terjadi di Timor-Leste di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Diperlukan upaya-upaya konkrit untuk menyikapinya. Perempuan hanya mencakup 23% dalam layanan jasa publik, dengan dua perempuan saja yang menduduki jabatan pada tingkat paling tinggi (L-7). Di sektor kesehatan prioritas utama adalah pengurangan tingkat kesuburan dan kematian perempuan yang melahirkan, perluasan program keluarga berencana untuk mencakup pria dan anak laki-laki, dan menyikapi dimensi gender terhadap HIV/AIDS dan Infeksi Penularan Seksual (*STI*). Di bidang pendidikan prioritas seharusnya menanggulangi anak gadis yang putus sekolah. Hanya 29% dari guru sekolah dasar dan sekolah menengah adalah perempuan. Mengembangkan

⁶ Convention on the Elimination of Discrimination Against Women

kurikulum sekolah menengah yang peka gender dan meningkatkan jumlah guru perempuan di SMP dan SMA - termasuk berperan sebagai teladan – merupakan prioritas tambahan. Peningkatan akses terhadap pendidikan menengah dan pendidikan tinggi maupun program pendidikan non-formal untuk meningkatkan tingkat melek huruf untuk perempuan dan laki-laki diperlukan. Diimbangi dengan pelatihan kejuruan upaya tersebut dapat memajukan pemberdayaan ekonomi terutama di daerah pedesaan. Pemberdayaan ekonomi perempuan penting, terutama di sektor pertanian, meliputi keamanan pangan dan agribisnis.

Selama restrukturisasi angkatan kepolisian isu yang penting adalah pelatihan kesadaran gender, termasuk kekerasan berbasis gender dan CEDAW. Cabang-cabang pokok di mana pelatihan dan alat-alat gender diperlukan adalah Kepolisian Masyarakat, Satuan Orang-Orang Rapuh [Vulnerable Persons Unit atau VPU] dan Kepolisian Kriminal.

Dirancang pada tahun 2004, undang-undang melawan kekerasan dalam rumah tangga telah dipromosikan secara aktif sebagai prioritas oleh OPE dan pembela gender. Sampai sekarang RUU belum diajukan kepada parlemen. Harmonisasi dengan KUHP baru yang masih ditangguhkan telah mengangkat isu-isu baru. Para pembela gender telah merekomendasikan bahwa Pasal 151 (sub-paragraf 2) dari KUHP dihapus untuk membuat KUHP konsisten dengan pasal 26 dari RUU ini melawan kekerasan dalam rumah tangga yang menetapkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan umum. Karena penetapan KUHP baru masih ditangguhkan, ada peluang untuk merevisinya. Begitu UU ini diterima, perlu dibuat rencana tindakan multi-sektoral yang komprehensif untuk menyebarkan, melaksanakan dan menegakkan legislasi baru tersebut.

OPE, berlokasi di Kantor Perdana Menteri, telah mendapat dukungan dari tingkat-tingkat tinggi Pemerintah. Akan tetapi kantor itu sendiri saja tidak dapat memastikan bahwa isu gender disikapi melintasi seluruh Pemerintah. Dukungan tingkat tinggi yang jauh lebih kuat diperlukan untuk mendorong kementerian-kementerian struktural menyikapi masalah gender di dalam sektor-sektor mereka. OPE bukan merupakan badan pelaksana akan tetapi suatu badan penasihat yang peka, membela, mengkoordinasi, memantau dan menilai prakarsa-prakarsa yang diambil oleh seluruh Pemerintah. Untuk memfasilitasi proses pengarusutamaan gender, OPE telah menetapkan butir pemusatan gender (*gender focal points* atau GFP), pada tingkat 5 dan tingkat 6, di setiap kementerian dan instansi dan di kabupaten-kabupaten. Akan tetapi mekanisme GFP perlu diperkuat, melalui perumusan jelas daripada syarat-syarat acuan (TOR) dan pertemuan koordinasi teratur. Keterlibatan butir pemusatan pada tingkat perencanaan pusat dan kabupaten, yang telah terlatih dalam analisis gender dan perencanaan peka gender, dapat meningkatkan proses reflektif ini.

Selama TA06/07 proses pengarusutamaan gender telah diperkuat pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pertanian dan Perikanan dengan pengangkatan atau rencana pengangkatan penasihat gender sektoral berkoordinasi dengan OPE. Bekas Kementerian Perburuhan dan Pemulihan Masyarakat adalah yang pertama untuk membentuk satuan gender operasional dan melakukan analisis gender di dalam lingkungan Kementerian. Pekerjaan sedang berlangsung dengan sektor-sektor perdagangan dan pariwisata. Selama TA 2006, OPE diberi kursi tetap pada setiap Kelompok Kerja Sektoral dari Program Investasi Sektor (SIP) untuk mengangkat isu gender relevan di masing-masing sektor dan

memastikan pemasukan kegiatan yang responsif terhadap gender. Sejauh ini tidak diketahui betapa besar sukses masukan mereka.⁷ Memajukan kesetaraan gender merupakan bagian dari salah satu SIP: “Hak-Hak, Kesetaraan, dan Sektor Kehakiman”.

⁷ Sebagai ilustrasi, pada SIP Pendidikan dan Pelatihan, data pendidikan yang disajikan tidak ada yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, walaupun kesetaraan gender disebut pada beberapa kesempatan.

Fakta dan Angka

Indikator gender pilihan antar sektor-sektor terkait			Sumber
<i>Total penduduk: 923.198 Kepala Keluarga Perempuan: 19 % dari semua rumahtangga</i>			Sensus 2004
Perempuan dalam Parlemen Nasional 2002-2007 - 26% Perempuan terpilih 2007 - 27.7% Suara Perempuan 2007 - 47%			UNIFEM 2006 NEC 2007 NEC 2007
Partisipasi Angkatan Tenaga Kerja (usia 15+) – perempuan 52% dari perempuan; pria 69% dari pria			Sensus 2004
Perempuan merupakan 52% dari yang bekerja sendiri Perempuan merupakan 25% dari LSM, Pemerintah, dan pegawai PBB			Sensus 2004
Angka kesuburan: 7,7 anak per perempuan Angka Kematian Bayi: 90 kematian untuk 1.000 kelahiran Kematian Perempuan yang Melahirkan: 660 per 100.000 kelahiran Tempat melahirkan: 90% perempuan melahirkan di rumah, 9% di Puskesmas dan 1% di fasilitas sektor swasta			DHS 2003 Sensus 2004 DHS 2003 DHS 2003
Pemakaian alat kontrasepsi: 90% perempuan yang menikah pada tahun 2003 tidak memakai alat kontrasepsi sama sekali			HDR 2006
Kekerasan terhadap perempuan: pada tahun 2004 lebih dari 68% kasus yang dilaporkan kepada PNTL pada GBV (N=445) melibatkan wanita dan anak-anak dalam kekerasan rumah tangga.			UNMISSET
Pendidikan	<i>perempuan</i>	<i>laki-laki</i>	
Rasio pendaftaran kotor (2005)	0.97	1.00	EMIS, MoEC 2005
Rasio pendaftaran bersih (2005)	0.75	0.81	
Angka pendaftaran kotor SMP (Pedesaan) (%)	52	63	Sensus 2004
Penduduk di atas usia 6 tahun (2004)			Sensus 2004
- masuk sekolah menengah selama 6 tahun atau lebih (%)	34	39	
- dengan ijazah	34	44	
Proporsi penduduk 18-49 dengan sekedar pendidikan tinggi (%) (2004)	4	8	Sensus 2004
Angka penyelesaian sekolah menengah (2004) (%)	44	56	Sensus 2004
Angka penyelesaian perguruan tinggi (2004) (%)	25	34	
Mahasiswa Universitas Nasional Umum (2003-4) (%)	41	59	Sensus 2004
Staf universitas umum (%)	27	73	MSA 2005
Staf universitas swasta (%)	12	88	
Partisipasi dlm kampanye pendidikan orang dewasa oleh Div Pendidikan Non-formal Pendidikan (N=5,310) (2003-4) %	30	70	ADB/UNIFEM CGA 2005
Melek huruf (2004) (40% untuk perempuan miskin)	52	65	Sensus 2004

NEC - National Electoral Commission, 2007
DHS – Demographic and Health Survey, 2003
HDR – Human Development Report, 2006
EMIS – Pendidikan Management Informasi System
CGA – Country Gender Assessment, 2005

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

8. Catatan Sektor: Kesehatan

Selayang Pandang

Infrastruktur dan layanan jasa kesehatan dasar telah didirikan kembali di Timor-Leste, tetapi penduduk masih mengalami masalah-masalah kesehatan. Masalah bertahan dengan mutu yang tidak memadai dan rendahnya pemamfaatab layanan jasa kesehatan, termasuk imunisasi, perawatan sebelum melahirkan, dan kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis. Tantangan yang dihadapi oleh sektor kesehatan adalah menerjemahkan kemajuan sampai saat ini menjadi layanan jasa kesehatan yang lebih baik untuk penduduk, dan mempercepat perbaikan di bidang kesehatan dan gizi untuk penduduk Timor. Kementerian Kesehatan (*MoH*) telah mengembangkan Rencana Strategis Sektor Kesehatan baru (*HSSP*) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*MTEF*) untuk sektor kesehatan, yang akan mengganti Rencana Investasi Sektor (*SIP*) sebelumnya. Ini perlu diterjemahkan ke dalam rencana dan anggaran kegiatan tahunan, dengan pemusatan lebih besar terhadap pemantauan.

Persoalan-persoalan pokok

- ***Memperbaiki pasokan obat-obatan yang penting.*** Salah satu keluhan utama dari staf pelayanan kesehatan dan anggota masyarakat adalah kurang tersedianya obat-obatan. Memperkuat pengawasan dan memantau kinerja badan pengadaan obat nasional (*SAMES*) akan membantu menyelesaikan masalah pasokan terlambat dan tidak teratur.
- ***Meningkatkan penyaluran dan kinerja pekerja di bidang kesehatan.*** Beberapa daerah tidak mempunyai jumlah pekerja di bidang kesehatan yang memadai. Motivasi dan prestasi kerja dapat ditingkatkan secara menyeluruh. Untuk jangka pendek, skema insentif untuk mendorong layanan jasa di daerah pedesaan dan menggalakkan jasa pelayanan bermutu dapat diujicobakan. Upaya percobaan tersebut dapat mencakup fasilitas perumahan, gaji atau manfaat tambahan untuk tenaga di daerah pedesaan, atau upaya percobaan untuk memberi bonus gaji kepada staf berprestasi dalam memberi jasa pelayanan.
- ***Upaya percobaan transfer tunai bersyarat dan pendekatan-pendekatan lain untuk memperkuat permintaan layanan jasa kesehatan.*** Rendahnya pemanfaatan layanan jasa kesehatan merupakan sumbangan terhadap kesehatan dan gizi buruk. Kementerian Kesehatan merencanakan untuk mengupayakan percobaan program Perbaikan Kesehatan Keluarga. Di samping itu, transfer tunai bersyarat, dimana pembayaran tunai diberikan kepada keluarga miskin untuk memajukan perilaku sehat, seperti vaksinasi anak atau melahirkan di sarana kesehatan, ternyata efektif di negara-negara lain dan dapat diujicoba di Timor-Leste.
- ***Menyikapi halangan-halangan administrasi terhadap penyampaian jasa.*** Kekurangan pasokan utama di kabupaten-kabupaten, seperti bahan bakar, kadang-kadang berdampak

pada operasi pelayanan. Pemerintah dapat mempertimbangkan mekanisme dekonsentrasi dana kepada Kementerian Kesehatan, dan dari Kementerian Kesehatan ke dinas kesehatan kabupaten dan rumah sakit. Ini termasuk wewenang pengadaan dan komitmen anggaran.

Sektor Kesehatan

Indikator kematian anak dan ibu yang melahirkan, gizi buruk anak, dan kesuburan untuk Timor-Leste tetap termasuk yang paling tinggi di kawasan ini. Pada tahun 2003, angka kematian anak 83 per 1.000 anak, dan hampir dua pertiga jumlah anak balita berada di bawah berat badan normal. Gizi buruk meningkatkan angka kematian dan prestasi sekolah rendah. Angka kesuburan termasuk yang tertinggi di dunia, dengan perempuan rata-rata mempunyai 7,7 anak. Tingkat kesuburan yang tinggi namun dengan jumlah bidan yang tidak memadai pada saat melahirkan meningkatkan angka kematian, diperkirakan 660 per 100.000 kelahiran. Penyakit menular seperti diare, tuberkulosis (TBC), dan malaria lazim ditemukan.

Mutu perawatan kesehatan sering tidak memadai, dengan banyak keluarga kurang menggunakan layanan jasa kesehatan. Angka vaksinasi telah membaik, tetapi hanya 18% dari anak-anak diimunisasi lengkap pada tahun 2003, dan hanya 18% kelahiran dibantu oleh personil trampil. Penggunaan rendah disebabkan oleh pencakupan tidak memadai dan mutu layanan jasa kesehatan, maupun “permintaan” rendah oleh beberapa pihak akan layanan jasa kesehatan dasar. Mutu layanan jasa kesehatan dikompromikan oleh kekurangan terus menerus akan obat-obatan penting, persediaan laboratorium, atau bahan bakar untuk layanan jasa lapangan. Praktek perilaku rumah tangga tertentu memberi sumbangan terhadap keluaran kesehatan dan gizi buruk, seperti praktek menyapih bayi yang tidak tepat atau kurang pemakaian klambu. Walaupun beberapa organisasi non-pemerintah mempunyai kegiatan pada tingkat kesehatan masyarakat lokal atau kegiatan yang menciptakan permintaan, skala kegiatan tersebut dapat diperluas.

Jumlah pekerja kesehatan mulai mendekati norma-norma yang berlaku di kawasan ini, akan tetapi Timor-Leste perlu personil kesehatan yang disebarkan, dilatih dan diawasi lebih baik. 300 tenaga dokter dari Cuba telah membantu mengurangi kekurangan tenaga medis. Tetapi pekerja kesehatan belum disebarkan secara merata dan pengawasan dapat diperkuat. Institut Pelayanan Kesehatan [Institute of Health Sciences atau (IHS)] melatih perawat tetapi mempunyai kapasitas terbatas. Suatu Rencana Angkatan Kerja Kesehatan membeberkan perencanaan untuk mengisi tenaga kerja sektor ini tetapi memerlukan penyesuaian. Walaupun cakupan geografis telah diperbaiki, akses tetap sulit di beberapa daerah pedesaan. Dalam upaya memperbaiki akses, Pemerintah dapat mempertimbangkan strategi sistematis tentang pencakupan dengan puskesmas mobil.

Kementerian Kesehatan termasuk kementerian yang berprestasi terbaik dari segi pelaksanaan anggaran, akan tetapi prosedur sentralisasi tetap menghambat penyampaian layanan jasa. Bekas Kementerian Perencanaan dan Keuangan (*MoPF*) telah mengambil beberapa langkah untuk desentralisasi beberapa prosedur. Kementerian Kesehatan sekarang mengelola pengadaan untuk kontrak sampai dengan US\$ 100.000 dan mempunyai rekening kas kecil pada tingkat kabupaten, yang mengizinkan staf lebih mudah mengadakan barang-barang utama seperti bahan bakar langsung dari pemasok. Menaikkan ambang pengadaan menjadi

US\$ 250.000 akan memudahkan pelaksanaan proyek-proyek modal. Akan tetapi langkah-langkah tersebut perlu disertai pembangunan kapasitas lebih lanjut di bidang pengadaan dan manajemen keuangan. Kinerja SAMES di bidang pengadaan, manajemen keuangan dan penyaluran perlu diperkuat. Legislasi mengimbau Kementerian Keuangan yang sekarang untuk menetapkan komite pengawasan keuangan untuk SAMES, dan dapat dipertimbangkan untuk membentuk majelis direksi yang independen.

Proses perencanaan dan penganggaran dapat diperbaiki dengan memastikan bahwa rencana kesehatan kabupaten dikaitkan dengan jelas kepada anggaran. Kementerian Kesehatan, kabupaten dan rumah sakit juga semua perlu mulai menggunakan informasi yang mereka kumpulkan untuk memantau kemajuan dan untuk memperbaiki kinerja. Ini akan memerlukan pengawasan yang diperkuat dan dukungan teknis untuk tim kabupaten. Berhubungan dengan koordinasi para donatur, Kementerian Kesehatan ingin melanjutkan kemajuan ke arah pendekatan yang meliputi sektor lebih luas (SWAP), termasuk melalui misi gabungan donatur dan pengaturan pelaksanaan yang diserasikan.

Fakta dan Angka

Infrastruktur dan tenaga Kesehatan	
Jumlah pos kesehatan	155
Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas-CHC)	66
Rumah Sakit Daerah	5
Rumah Sakit Rujukan Nasional (Guido Valadares)	1
Total tenaga kesehatan (Pemerintah)⁸	1,718
Dokter	
Timor	17
Cuba	300+
Perawat	763
Bidan	255
Teknisi laboratorium/lain	33/103
Logistik/dukungan	241
Administrasi	248
Indikator layanan jasa pokok dan pencakupan	
% perempuan hamil yang mendapat paling sedikit satu kali kunjungan sebelum melahirkan	61
% anak (6-59 bulan) yang menerima suplemen vitamin A	36
% anak yang tidur di bawah kelambu yang diobati (klambu apapun)	8 %
% perempuan menikah atau hidup bersama dengan pria yang memakai alat kontrasepsi modern	10
Persentase kasus malaria yang dirawat menurut protokol yang direkomendasi	30
% bayi (0-6 bulan) yang eksklusif diberi ASI	31%
Angka pasien rawat jalan anak (U5, kunjungan per tahun per kapita)	1.4 (2006)
Angka kematian kasus anak yang dirawat untuk malaria parah di fasilitas kesehatan	10%
Total angka kesuburan (rata-rata # anak per perempuan)	7.7
% perempuan menikah atau hidup bersama dengan pria yang memakai alat kontrasepsi modern	10
Angka Pertumbuhan Penduduk tahunan	3.2%

⁸ Dari data induk Kementerian Kesehatan tahun 2005

2. Kemajuan terhadap MDG/indikator pokok

	2001/2	2006	target MDG	Target global MDG
Angka kematian bayi	88 per 1000			½ dari 1990
% anak yang diimunisasi:				
DPT3	56%	63%	90%+	90%+
Campak	47%	61%	90%+	90%+
% anak kurang berat badan	45%		31%	½ of 1990
Akses terhadap air laik minum (pedesaan)	51%		75%	2x lipat 1990
Akses terhadap sanitasi (pedesaan)	10%		40%	2x lipat 1990
Rasio kematian perempuan melahirkan	800 per 100.000 kelahiran hidup			Kurangi tingkat 1990 dengan 70%
% kelahiran yang dibantu oleh personil kesehatan trampil	24%		90%	90%
% penduduk yang mendapat perawatan malaria efektif	30%			90%
% kasus Tuberculosis yang dirawat dengan sukses	80% dari kasus yang diketahui disembuhkan melalui DOTS			90%
Jumlah orang terjangkit HIV	Perkiraan keadaan HIV 0.35%			Pertahankan keadaan tingkat rendah yang sama

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

9. Catatan Sektor: Minyak Bumi

Selayang Pandang

Penghasilan dan pengaturan penabungan hasil minyak bumi Timor-Leste akan menjamin masa depan ekonomi negara ini. Pengaturan penabungan memungkinkan digunakannya dana yang memadai dan berkesinambungan setiap tahun untuk mendanai anggaran negara, namun sampai sekarang Pemerintah mengalami kesulitan menggunakan anggaran tahunan. Penghasilan minyak bumi Timor-Leste berjumlah US\$ 1,2 milyar pada tanggal 31 Maret 2007, dan bertambah dengan kelajuan US\$ 100 juta/bulan sejak Januari 2007. Sementara menyediakan sumber daya pendanaan untuk pembangunan, penghasilan minyak bumi juga menciptakan tantangan di bidang ekonomi dan pemerintahan. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa negara-negara yang kaya akan sumber daya alam cenderung boros dalam penggunaan dana yang dan tingkat korupsi yang lebih tinggi dari negara-negara lain. Untuk menghindari “kutukan sumber daya” ini, Timor-Leste telah menerapkan pengaturan bagi pengelolaan yang baik dari penghasilan minyak bumi demi kebaikan generasi sekarang dan generasi masa depan.

Persoalan-persoalan Pokok

- ***Memelihara pengaturan pengelolaan penghasilan minyak bumi.*** Pengaturan ini adalah sebagai dasar bagi pengelolaan yang baik dari penghasilan minyak bumi. Menabung untuk masa depan penting, sebab sumber daya minyak bumi tidak akan bertahan selamanya. Pada waktu yang sama, pengeluaran secara efektif dari penghasilan ini diperlukan untuk membangun dan mengembangkan perekonomian non-minyak bumi, menyediakan layanan-layanan, dan mengurangi angka kemiskinan.
- ***Membangun Greater Sunrise.*** Melalui Perjanjian tentang Pengaturan Kelautan Tertentu di Laut Timor (Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea - CMATS), yang mulai berlaku pada bulan Februari 2007, Timor-Leste dan Australia sepakat untuk membagi 50/50 penghasilan dari tambang gas Greater Sunrise. Namun, pengaturan tentang bagaimana membangun lapangan tersebut belum tercapai. Hal ini terutama disebabkan oleh perundingan mengenai ke mana pipa tambang tersebut akan ditarik. Timor-Leste harus menentukan suatu posisi konsensus berdasarkan informasi yang tepat, tentang pembangunan Sunrise untuk menghadapi perundingan tersebut. Aspek-aspek dagang, sosial dan ekonomi perlu dipertimbangkan.
- ***Mengorganisasikan kembali Sektor tersebut.*** Pada bulan April 2007 Direktorat Minyak dan Gas Bumi menyebarkan rancangan undang-undang tentang badan pengganti dari Otorita Laut Timor yang Ditunjuk untuk memperoleh tanggapan publik. Juga disebarkan rancangan undang-undang tentang penciptaan suatu perusahaan minyak nasional. Sesuai dengan proses yang diikuti untuk perundang-undangan minyak secara keseluruhan di Timor-Leste, maka diperlukan konsultasi dan keterlibatan yang lebih luas dengan ahli-ahli hukum sektor ini tentang lingkup dan pengaturan pengurusan untuk badan-badan ini.

Sektor Minyak Bumi

Semua penghasilan minyak bumi yang masuk ke Timor-Leste disimpan dalam suatu Dana Minyak Bumi yang dikelola oleh Otorita Perbankan dan Pembayaran (BPA - Banking and Payments Authority). Dana tersebut diatur oleh Undang-Undang Dana Minyak Bumi, yang memberikan rumusan untuk menghitung jumlah “perkiraan pemasukan yang berkesinambungan” yang dapat ditransfer dari Dana tersebut guna membiaya anggaran negara. Perkiraan pemasukan yang berkesinambungan adalah jumlah yang dapat ditarik dari Dana secara abadi tanpa mengurangi harta minyak bumi negara. Setiap tahun jumlah pemasukan yang berkesinambungan diverifikasi oleh seorang akuntan yang independen. Kalau negara ini mengikuti aturan penabungan ini, maka negara akan mempunyai uang guna membiayai anggarannya untuk selamanya. Uang dari Dana hanya dapat ditransfer setelah anggaran tahunan negara disetujui Parlemen dan hanya dapat dialihkan ke anggaran.

Pengaturan pengelolaan minyak bumi Timor-Leste dirancang untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. BPA menerbitkan laporan setiap tiga bulan tentang Dana Minyak Bumi, termasuk saldonya, setiap transfer, dan investasinya. Laporan-laporan ini tersedia untuk umum. Menurut undang-undang, seorang akuntan yang diakui secara internasional harus mengadakan audit eksternal yang independen dari uang yang diterima oleh Dana setiap tahun fiskal. Laporan akuntan tersebut harus diterbitkan. Laporan Tahunan pertama, termasuk laporan-laporan keuangan Dana yang di-audit, dan laporan-laporan kwartalan, yang disiarkan kepada khalayak umum pada bulan Juli 2007, dapat diperoleh dari BPA atau pada www.bancocentral.tl/PF/Reports.asp. Suatu Badan Penasihat Investasi memberikan nasihat kepada Pemerintah tentang strategi investasi dan pengelolaan Dana. Suatu Dewan Konsultatif yang independen, termasuk wakil-wakil masyarakat madani dan sektor swasta, memberikan nasihat kepada Parlemen tentang Dana tersebut.

Kementerian Kebijakan Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi yang lama, dan sekarang mungkin Sekretaris Negara untuk Sumber Daya Alam, bertanggung jawab atas sumber daya minyak bumi di wilayah Timor-Leste. TSDA, sebuah jawatan bersama Timor/Australia, bertanggung jawab atas sumber daya minyak bumi di Wilayah Pembangunan Minyak Bumi Bersama (JPDA – Joint Petroleum Development Area) di Laut Timor. JPDA diatur oleh Perjanjian Laut Timor (TST – Timor Sea Treaty) tahun 2002, di mana Timor-Leste dan Australia sepakat untuk membagi penghasilan JPDA dengan perbandingan 90/10 demi keuntungan Timor-Leste. Menurut TST 2002, setelah tiga tahun TSDA akan dilebur menjadi Direktorat Minyak dan Gas Bumi atau menjadi direktorat Timor-Leste yang lain.

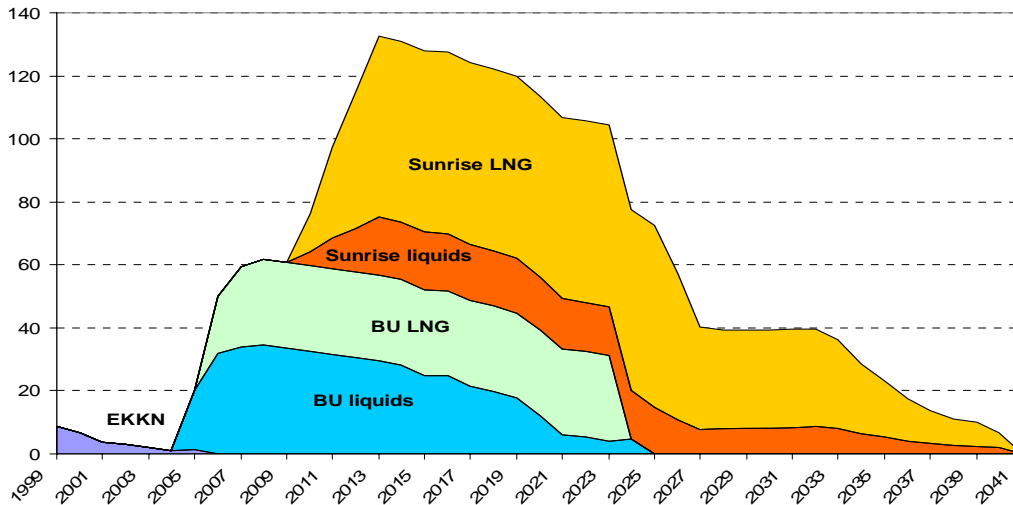
Di dalam mengembangkan Greater Sunrise, Timor-Leste menginginkan saluran pipa menuju ke pantai selatannya, bersama dengan pembangunan suatu pabrik LNG. Woodside, operator utama lapangan itu, dan Australia menginginkan suatu saluran pipa yang menuju ke Darwin (di mana sudah ada pabrik LNG). Woodside dan mitra-mitra usaha bersamanya (joint venture [JV]) yaitu Conoco Phillips, Shell, dan Osaka Gas, bermaksud untuk menyiapkan suatu rencana pembangunan sementara untuk Sunrise pada bulan September 2007. Rencana itu harus disetujui oleh Pemerintah Timor-Leste dan Australia. Jika Timor-Leste berkeras berpegang pada gagasan pembangunan yang berbeda dari apa yang JV anut demi kepentingan dagang JV, maka JV dapat meminta kompensasi dari pihak Timor-Leste.

Di samping Undang-undang Dana Minyak Bumi, Model Kontrak Pembagian Produksi (PSC – Production Sharing Contract), dan Undang-Undang Pajak Minyak Bumi mulai diterapkan tahun 2005. Ini menyelesaikan kerangka hukum yang mengatur eksplorasi dan perkembangan sumber daya minyak bumi di wilayah Timor-Leste. Semua undang-undang ini sesuai dengan praktek baik di dunia internasional. Timor-Leste juga sedang melaksanakan Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif (EITI – Extractive Industries Transparency Initiative).

Produksi minyak bumi Timor-Leste sekarang ini terutama berasal dari Bayu Undan di JPDA. Bayu Undan diperkirakan akan menghasilkan sekitar US\$ 9.4 milyar dalam penghasilan yang diakumulasi bagi Timor-Leste selama 15-20 tahun mendatang. Greater Sunrise diperkirakan, atas dasar yang sangat sementara, akan menghasilkan sekitar US\$ 24 milyar pemasukan selama masa hidup lapangan itu, yang setengah dari jumlah itu akan diterima Timor-Leste. Oleh karena Sunrise belum berproduksi, proyeksi pemasukannya tidak dimasukkan dalam perkiraan pemasukan berkesinambungan yang sekarang sedang disusun untuk anggaran. Hak eksplorasi di wilayah Timor-Leste dimenangkan pada tahun 2006 oleh ENI dan Reliance. Walaupun ini dapat merupakan sumber penghasilan minyak bumi tambahan, perlu ditemukan terlebih dahulu potensi komersial dan disepakati gagasan-gagasan pembangunan sebelum produksi dan pemasukan dimulai. Ini kelihatannya akan memakan waktu beberapa tahun.

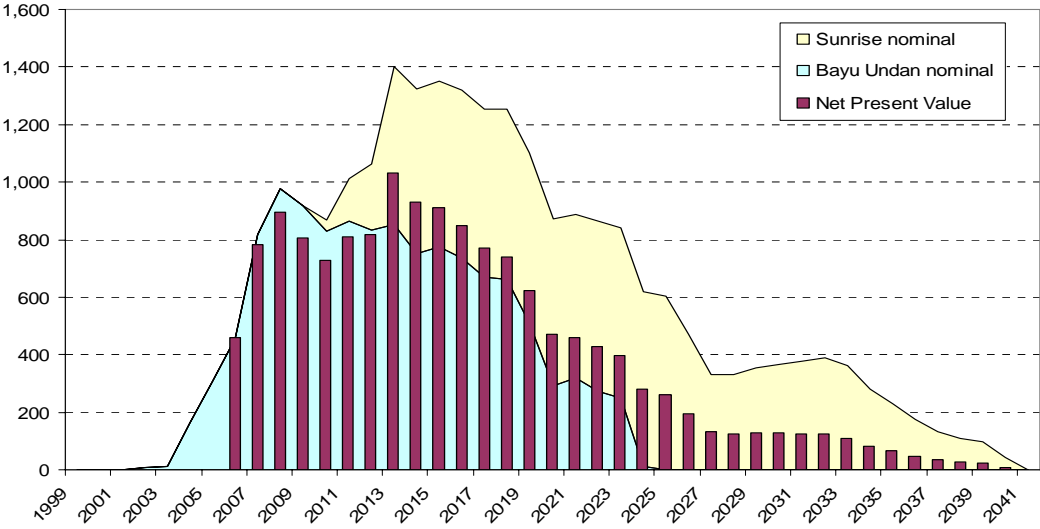
Fakta dan Angka

Profil Produksi Timor-Leste, 1999-2041 (jutaan barrel ekuivalen minyak bumi)*



*Pada tahap ini, profil Sunrise harus dianggap hanya indikatif secara sangat luas.

Profil Pemasukan Minyak bumi Timor-Leste yang Diproyeksikan, 1999-2041 (US\$ juta)**



**Proyeksi-proyeksi sangat peka terhadap asumsi harga minyak, yang dengannya terkait harga LNG

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

10. Catatan Sektor: Tenaga Listrik

Selayang Pandang

Sejak tahun 2002 kemajuan yang pesat telah dicapai dalam usaha memperbaiki layanan pasokan listrik. Namun, kuantitas dan mutu layanan pasokan listrik merosot menyusul krisis pada tahun 2006. Dengan dioperasikannya suatu generator baru di Stasiun Pembangkit Listrik Comoro yang dimulai pada bulan April 2007, keandalan sistem pembangkitan listrik diperkirakan akan membaik secara signifikan. Walaupun begitu, masih banyak sekali yang harus dilakukan guna memperbaiki layanan pasokan listrik, memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kesinambungan keuangan, dan meningkatkan pelistrikan di daerah pedesaan. Pelaksanaan secara tepat waktu dan efektif dari terobosan-terobosan yang sedang berjalan dan yang direncanakan merupakan suatu tantangan, namun penting hasil-hasilnya diperoleh dalam jangka pendek.

Persoalan-persoalan Pokok

- ***Meningkatkan keandalan pasokan listrik di Dili.*** Pelaksanaan reparasi darurat yang direncanakan untuk Stasiun Pembangkit Listrik Comoro, rehabilitasi sistem distribusi listrik dan menjamin mutu dari bahan bakar di stasiun di Dili semuanya akan meningkatkan keandalan.
- ***Memperbaiki pengawasan terhadap kontraktor manajemen.*** Penunjukan kontraktor manajemen yang baru, Manitoba Hydro, sebuah perusahaan Canada, akan berkontribusi terhadap memperbaiki kinerja Electricidade de Timor-Leste (EdTL), perusahaan listrik nasional. Namun pengalaman mengenai kontrak manajemen yang pertama dengan Companhia de Electricidade de Macau (CEM) menunjukkan bahwa Pemerintah perlu memberikan kepada kontraktor-manajemen otonomi yang diperlukan, sementara memastikan adanya pengawasan yang memadai. Pengawasan secara ideal akan mencakup suatu badan dengan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas, serta sistem-sistem untuk menjamin pelaporan kinerja secara teratur dan ketaatan pada syarat-syarat kontrak.
- ***Melaksanakan tindakan-tindakan yang direncanakan menuju kesinambungan keuangan yang lebih besar.*** Pencurian listrik yang luas yang semakin meningkat merupakan suatu masalah utama. Ini menyebabkan biaya listrik meningkat, yang mengharuskan Pemerintah meningkatkan tingkat subsidi yang signifikan guna menutupi defisit di EdTL di TA07. Tindakan-tindakan yang direncanakan untuk memberantas penyambungan-penyambungan liar dan memperbaiki system penagihan uang meliputi tindakan oleh kontraktor dengan bantuan dari kementerian sektor untuk menyelesaikan masalah tidak adanya pembayaran oleh para pelanggan, dan instalasi ulang dari meter-meter pra-bayar berdasarkan standar pencegahan pencurian.

Sektor Listrik

Timor-Leste mempunyai sistem jaringan listrik yang kecil dan terfragmentasi. Dewasa ini, sekitar 43.500 rumah tangga tersambung ke jaringan listrik, yang berarti suatu angka pelistrikan keseluruhan sebesar kira-kira 22%. Stasiun Pembangkit Listrik Comoro di Dili melayani sekitar 26.500 pelanggan di Dili dan sekitarnya, dengan angka pelistrikan sebesar kira-kira 85%. Namun, hanya 5% dari rumah-rumah tangga di pedesaan tersambung ke jaringan listrik.

Pembangkitan listrik di negara ini seluruhnya bergantung pada bahan bakar diesel yang diimpor, yang menjadikannya salah satu sistem pemasokan listrik paling mahal di dunia. Harga listrik yang sekarang diberlakukan hanya menutupi sebagian kecil dari seluruh biaya pembangkitan listrik, yang mengharuskan Pemerintah memberikan subsidi yang besar. Kunci di dalam menyelesaikan masalah biaya tinggi ini adalah dilanjutkannya rencana-rencana menuju diversifikasi pembangkitan listrik di samping bahan bakar diesel, serta sistem penagihan uang masuk yang diperbaiki dan pengurangan konsumsi gelap. Proyek Penuaian Perembesan Gas (Gas Seep Harvesting Project) yang sedang berjalan, dan Proyek Tenaga Air Ira Lalarol, bila berhasil, akan mengurangi dengan tajam biaya pembangkitan listrik.

Sambungan ke jaringan listrik di daerah pedesaan sangat terbatas, namun sudah dibuat rencana untuk memperbaiki pelistrikan di pedesaan. Ibu-ibu kota kabupaten sekarang ini dilayani oleh 60 sub-sistem pembangkit listrik yang kecil yang dikelola masyarakat. Rencana Induk Pelistrikan Daerah Pedesaan yang baru diselesaikan dan pengalaman yang diperoleh dari Proyek Penuaian Perembesan Gas yang sedang berjalan, akan membantu meletakkan dasar untuk meningkatkan pelistrikan pedesaan pada jangka menengah dan panjang. Pilot proyek Penuaian Perembesan Gas akan memasok listrik kepada sekitar 1000 rumah tangga yang sekarang ini tersambung ke jaringan listrik dan kepada kira-kira 2000 rumah tangga baru dan pelanggan komersial di Aliambata, Babulo dan Borolalo.

EdTL secara hukum merupakan bagian dari Pemerintah, namun tidak otonom secara keuangan. EdTL beroperasi di bawah anggaran Pemerintah dan menerima subsidi guna menutupi defisit keuangan baik untuk pengeluaran operasional maupun pengeluaran untuk barang modal. Untuk tahun anggaran 2007, anggaran Pemerintah untuk EdTL berjumlah US 12,4 juta, termasuk sekitar US\$ 8,4 juta untuk bahan bakar yang diimpor dan sisanya sebesar US\$ 4 juta untuk pengeluaran bagi barang modal. Di samping itu, US\$ 1,4 dari anggaran Pemerintah akan menutupi bayaran kepada kontraktor manajemen di EdTL.

Sejak tahun 2002, kapasitas pembangkitan listrik yang diinstalasi telah dipulihkan mendekati tingkat-tingkat sebelum tahun 1999. Usaha restorasi sistem telah bergeser dari pembangunan kembali stasiun pembangkit listrik ke reparasi dan rehabilitasi jaringan distribusi yang rusak. Dipekerjakannya suatu kontraktor manajemen, CEM, telah meningkatkan orientasi dagang EdTL. Namun, suatu tinjauan dari kinerja kontrak manajemen ini oleh seorang konsultan di kementerian struktural menunjukkan bahwa pada pihak Pemerintah, Panitia Pengawasan yang diangkat guna mengawasi pekerjaan CEM tidak menjalankan fungsinya secara memadai dan tidak memberikan pengarahan, dorongan atau bantuan kepada kontraktor

pada tingkat yang diperlukan. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa penting untuk memberikan otonomi manajemen pada tingkat yang diperlukan kepada kontraktor baru.

Sejak krisis tahun 2006, pekerjaan lapangan operasional dan pemeliharaan dari EdTL telah mengalami gangguan. Disamping itu, kontrak dengan CEM diakhiri pada bulan November 2006, walaupun pengerahan kontraktor baru tertunda. Sebagai akibatnya, CEM telah dipertahankan berdasarkan kontrak sementara dengan staf manajerial yang dikurangi. Perkembangan yang negatif ini merupakan faktor terjadinya pemeliharaan yang buruk dan/atau yang terganggu, pengoperasian di bawah tingkat optimal, dan tidak adanya suku cadang, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada kesatuan-kesatuan pembangkit listrik. Sekarang ini, kapasitas pembangkitan listrik operasional di Stasiun Pembangkit Listrik Comoro hanya kira-kira 15 MW, dibanding dengan 29 MW dari kapasitas yang terpasang. Mutu buruk dari layanan listrik dan krisis keamanan telah ikut mengakibatkan peningkatan tajam dalam praktik sambungan liar meter-meter pra-bayar oleh pemakai yang ingin menggunakan listrik secara gratis. Pada gilirannya ini telah mendorong terjadinya pemborosan energi, yang memperparah masalah kekurangan daya listrik yang dialami sekarang selama jam-jam puncak pemakaian. Konsultasi luas dengan para stakeholder di bulan February 2007 lalu, dengan wakil-wakil pemerintah daerah Dili, LSM, ikatan/kelompok wanita, kelompok pengusaha dan penduduk setempat, menegaskan pentingnya Pemerintah untuk menghentikan dan mengembalikan kemerosotan layanan listrik, termasuk menghentikan sambungan liar, yang dapat menyebabkan kebakaran dan kecelakaan.

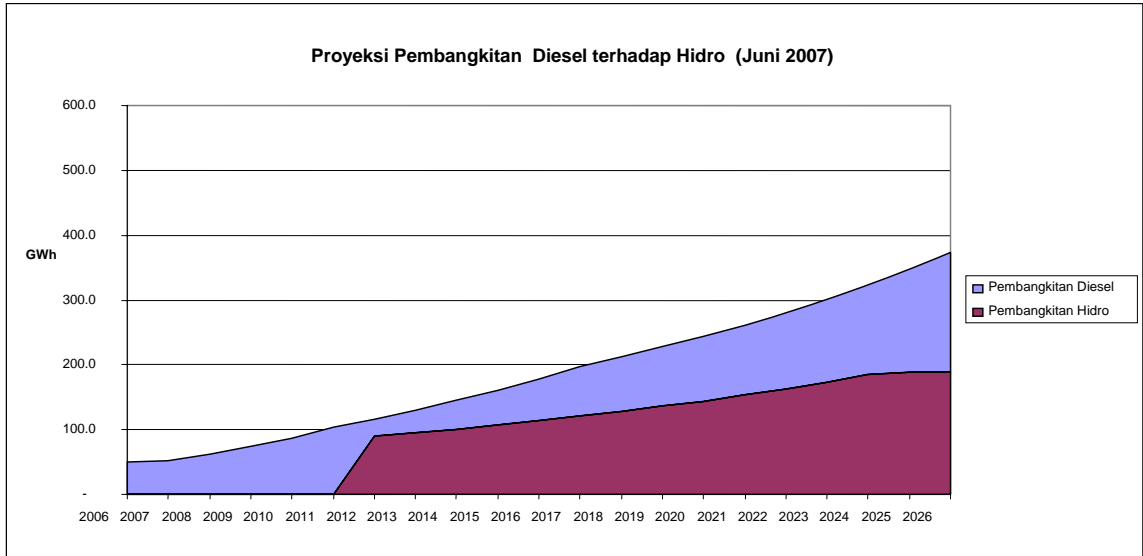
Fakta dan Angka

Kapasitas Pembangkitan Listrik di Dili dengan Angka-angka Pengoperasian pada bulan Juni 2007)

	Make	Year Installed	Nameplate Capacity (KW)	as of June 2007 operating ratings (KW)
1	Mak 1	1985	2,650	1,200
2	Mak 2	1985	2,650	1,200
3	Mak 3	1994	2,940	2,000
4	Niigata 1	1988	4,240	0
5	Niigata 2	2005	4,167	4,000
6	Cummins 8 units	2002	8,040	2,100
7	Caterpillar	2007	4,700	4,600
	TOTAL		29,387	15,100

Stasiun Pembangkit Listrik Air Ira Lalaro

Ira Lalaro diperkirakan memiliki kapasitas angka nominal sebesar 28 MW, sedangkan kapasitas perusahaan diperkirakan sebesar 12.9 MW. Kalau berhasil dilaksanakan, ia diproyeksikan menurunkan biaya pembangkitan listrik secara tajam pada jangka menengah dan panjang untuk negara ini.



Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

11. Catatan Sektor: Pembangunan Sektor Swasta

Selayang Pandang

Memperbaiki iklim Timor-Leste untuk bisnis adalah penting agar dapat terjadi pertumbuhan ekonomi dan tercipta lapangan kerja di sektor swasta. Pada saat ini Timor-Leste menempati urutan kedua terburuk di dunia untuk melakukan bisnis – yaitu di urutan 174 dari 175 negara yang disurvei oleh *Doing Business* dari Bank Dunia/International Finance Corporation. Ada beberapa alasan untuk ini. Banyak prosedur administrasi berbelit-belit dan mahal. Oleh karena pengadilan menangani terlalu banyak kasus, maka hal ini berarti bahwa penyelesaian perselisihan kontrak dan buruh hampir-hampir tidak mungkin. Infrastruktur masih sangat ketinggalan pembangunannya dan biaya masukan bisnis cukup tinggi – listrik termasuk di antara yang paling mahal di dunia untuk pengguna komersial dan pembicaraan telepon kira-kira empat kali lebih mahal dari di Indonesia. Upah kerja beberapa kali lebih tinggi dari di negara lain di wilayah ini. Layanan-layanan pendukung bisnis seperti akunting, audit, dan praktik hukum swasta hampir-hampir tidak ada. Suatu registrasi kredit, yang akan membantu menentukan kelayakan kredit peminjam, masih harus dibuat. Untuk mengatasi situasi ini, tantangannya adalah bagi sektor publik dan swasta untuk bekerja sama guna menyederhanakan peraturan rumit yang tidak perlu dan untuk menetapkan prosedur administratif yang jelas dan efisien. Langkah ini harus disertai peningkatan dalam kapasitas administratif publik dan promosi suatu sikap pelayanan terhadap bisnis di sektor publik.

Persoalan-persoalan Pokok

- ***Menyetujui Undang-Undang Tanah.*** Suatu pasaran untuk tanah yang berfungsi sangat penting bagi pembangunan sektor swasta yang kuat. Mengesahkan undang-undang tanah, yang dirancang pada tahun 2005, akan merupakan langkah pertama di dalam memecahkan situasi tanah di Timor-Leste yang sulit. Dalam pada itu, Direktorat untuk Tanah dan Hak Milik di Kementerian Kehakiman dapat mulai pekerjaan di dalam membangun sebuah kadaster, register pemilikan tanah, dan pengukuran bidang-bidang tanah, walaupun ini akan membutuhkan tenaga tambahan dengan ketrampilan teknis yang memadai.
- ***Mempercepat reformasi lingkungan bisnis guna merangsang investasi dan penciptaan lapangan kerja.*** Mengubah undang-undang yang tidak konsisten dan terlalu rumit akan mengurangi birokrasi yang tidak perlu. Contoh-contoh adalah Undang-undang Masyarakat Komersial (undang-undang perusahaan), Undang-undang Pendaftaran Usaha (pendaftaran perusahaan) dan undang-undang investasi.
- ***Mempermudah prosedur untuk memulai suatu usaha.*** Suatu usul untuk mempermudah prosedur untuk memulai suatu usaha/perusahaan, termasuk terutama penghapusan atau pengurangan yang signifikan dari modal permulaan minimum sebesar US\$ 5.000 yang

diharuskan untuk perseroan terbatas (lebih dari 10 kali penghasilan tahunan rata-rata), telah dipertimbangkan oleh Dewan Menteri pada akhir tahun 2006, namun tidak dilaksanakan.

- ***Memungkinkan pembiayaan mikro.*** Sektor keuangan telah bertumbuh dengan pesat dengan didirikannya tiga bank swasta dan beberapa penyedia pembiayaan mikro. Pemerintah dapat memainkan peranan penting di dalam menciptakan suatu lingkungan yang menunjang bagi badan-badan khusus untuk menyediakan pembiayaan mikro dan jasa kredit bagi penduduk. Langkah-langkah kongkrit dapat meliputi ketentuan untuk mentransfer uang tunai ke seluruh negara. Menerima peraturan yang memadai bagi pembentukan suatu register kredit dan menelusuri opsi-opsi untuk memberikan asuransi, juga dapat membantu. Di lain pihak, Pemerintah harus menghindari memberikan garansi kredit atau mendirikan bank-bank baru. Akses ke modal investasi diperlukan, namun dapat dilayani paling baik oleh bank-bank yang sudah ada dan badan-badan pembiayaan mikro dengan kemampuan teknis untuk menilai nasabah.

Sektor Swasta

Ada kebutuhan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan di bidang peraturan-peraturan untuk sektor swasta. Timor-Leste telah mencapai kemajuan di dalam mengesahkan undang-undang di berbagai bidang yang relevan, termasuk investasi asing dan domestik, pajak dan bea cukai, perusahaan dan pendaftaran, pengawasan perbatasan dan imigrasi, kenotarian, asuransi, perbankan, pembayaran dan devisa, dan perikanan. Namun ada kekhawatiran tentang mutu dari beberapa undang-undang yang ada, dan di beberapa bidang undang-undang yang diperlukan belum disahkan. Konsultasi dengan sektor swasta dan lain-lainnya selama penyusunan perundang-undangan ini tidak memadai. Sebagai akibatnya sebagian besar darinya terlalu rumit dan tidak memperhitungkan kemampuan pelaksanaan yang terbatas dari pihak aparat pemerintah. Menyelesaikan kekurangan-kekurangan ini dalam bidang legislatif menjadi semakin mendesak. Umpamanya, ada soal mendesak untuk memutuskan apakah registrasi harus dilakukan di Kementerian Pembangunan dan Ekonomi atau di Kementerian Kehakiman, dan hal itu perlu dijabarkan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan. Untuk sektor swasta, tidak penting tempat registrasi itu dilakukan, namun sangat penting bahwa prosesnya benar-benar sah dan sederhana: praktik yang sekarang dijalankan merupakan pengaturan yang sementara dan kenyataannya, tidak sah.

Suatu kerangka investasi yang disederhanakan akan membantu membuat Timor-Leste lebih menarik bagi investasi, baik asing maupun domestik. Pada saat ini ada dua undang-undang investasi. Ini dapat dilebur menjadi satu undang-undang yang disederhanakan. Keduanya hampir identik. Kedua-dua undang-undang merinci banyak keringanan yang sulit diselenggarakan. Badan-badan Pemerintah otonom yang melaksanakannya, TradeInvest Timor-Leste (TITL) dan Lembaga bagi Pendukung Kewiraswastaan (IADE), dapat dileburkan dengan mengubah surat keputusan penetapannya. Pemerintah juga dapat menggunakan Dialog Publik Swasta yang direncanakan untuk membina proses penciptaan lingkungan yang lebih baik untuk bisnis.

Registrasi tanah dan pembuatan sertifikat merupakan salah satu dari bidang pokok yang membutuhkan perhatian. Dewasa ini, beberapa bagian dari struktur perundang-undangan tanah telah ditetapkan: (a) sewa-menyewa antara pihak-pihak swasta, dan (b) menyewa milik negara. Suatu lingkungan peraturan yang baik untuk tanah harus memberikan kejelasan tentang akses terhadap tanah, keamanan sertifikat tanah atau hak guna dan pengembangan tanah. Suatu sistem administrasi tanah yang berfungsi mungkin sekali akan menuju ke: (i) keamanan yang diperbaiki hak atas tanah yang mempermudah pemindahan tangan tanah; (ii) suatu pasar kredit yang lebih dikembangkan, sebab hal itu akan mempermudah penggunaan tanah sebagai jaminan; (iii) suatu pasaran yang berkembang untuk tanah; dan (iv) investasi, pengembangan bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang ditingkatkan.

Ada kebutuhan besar yang belum terpenuhi atas layanan penabungan dan, pada tingkat lebih rendah, atas kredit di daerah pedesaan. Untuk mengatasi permintaan yang tidak terpenuhi atas layanan simpanan, Pemerintah dapat mengangkat plafon sebesar satu juta dolar yang sekarang ditetapkan untuk pinjaman di IMfTL (Instituto de Microfinancas de Timor-Leste). IMfTL telah mencapai plafon itu dan tidak dapat lagi menerima lebih banyak tabungan dari nasabah. Anggaran nasional untuk 06/07 meliputi suatu butir anggaran untuk kredit pedesaan, yang dengannya direncanakan untuk mendirikan sebuah bank. Kemungkinan kecil bahwa suatu bank yang didukung Pemerintah dapat mencapai tingkat pembayaran kembali yang memadai, dan ini dapat mengacaukan sektor keuangan. Untuk menjangkau masyarakat pedesaan, ada satu jejaring pembiayaan mikro yang berfungsi dengan baik, Moris Rasik, dengan nasabah-nasabah di seluruh kabupaten, yang mencapai angka tinggi pembayaran kembali. Pengalaman secara global menunjukkan bahwa pengembangan pemberian kredit yang berkesinambungan dilakukan secara lebih efektif oleh para penyedia pembiayaan mikro yang khusus daripada oleh Pemerintah.

Ada sebuah SIP Pembangunan Sektor Swasta, yang disebut “Private Sector Development” yang diperbaharui pada bulan Juli 2007.

Fakta dan Angka

- Komunitas bisnis Timor-Leste sebagian besar terdiri atas perusahaan keluarga yang kecil – 80% dari tenaga kerja terlibat dalam usaha pertanian keluarga.
- 72% dari perusahaan formal mempekerjakan kurang dari 10 pekerja.
- 33% dari penduduk melakukan pekerjaan yang seluruhnya berada di luar perekonomian tunai.
- Tenaga kerja bertambah dengan 16.000 orang setiap tahun, sedangkan hanya ada 40.000 pekerja yang diupah di sektor swasta.
- kebanyakan perusahaan memperoleh modal kerja awal dari sumber pribadi atau keluarga, bukan dari bank.
- 45% dari perusahaan formal dan hampir 90% dari perusahaan bukan formal perkotaan mempunyai omzet kurang dari US\$ 5.000 setahun.
- investor asing telah menunjukkan minat terhadap Timor-Leste namun sejauh ini hanya sedikit investasi yang terwujud dan beberapa investor dini telah menghentikan operasinya.

Timor-Leste

Wilayah: Asia Timur & Pasifik

Penduduk: 975.539

PNB per kapita (US\$): 750,00

Undang-Undang negara: lih. [Law Library](#)



Kemudahan untuk...	Peringkat 2006	Peringkat 2005	Perubahan peringkat
<i>Melakukan Bisnis</i>	174	174	0
Memulai suatu Usaha	160	158	-2
Mengurus Perizinan	173	173	0
Mempekerjakan Pekerja	115	114	-1
Mendaftarkan Milik	172	172	0
Memperoleh Kredit	159	160	+1
Melindungi Investor	142	141	-1
Membayar Pajak	124	119	-5
Berdagang Melintasi Perbatasan	73	66	-7
Melaksanakan Kontrak	175	175	0
Menutup suatu Usaha	151	151	0

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

12. Catatan Sektor: Manajemen Keuangan Publik

Selayang Pandang

Tantangan manajemen keuangan pusat Timor-Leste adalah di dalam mempergunakan anggaran tahunannya. Pada akhir kwartal ketiga TA06/07, pengeluaran tunai hanya US\$ 80,8 juta digunakan dari anggaran pemerintah pusat sebesar US\$ 320 juta, dimana US\$ 15,2 juta berasal dari tahun anggaran sebelumnya. Tingkat eksekusi anggaran investasi masih lemah. Kenaikan pesat dalam pemasukan minyak bumi gagal diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi oleh karena ketidakmampuan Pemerintah untuk menggunakannya melalui anggaran tahunannya. Pelaksanaan anggaran modal yang lemah juga telah mempengaruhi kemampuan Pemerintah secara buruk di dalam menyediakan barang dan jasa, menjalankan proyek pembangunan dan memicu pertumbuhan ekonomi serta mendorong percepatan penciptaan lapangan kerja. Walaupun begitu, sejak kemerdekaan, Timor-Leste telah mencatat kemajuan di dalam membangun sebuah kerangka kelembagaan untuk pengelolaan keuangan publik (PKP), walaupun pelaksanaan kerangka ini masih pada tahap awal. PKP di Timor-Leste ditandai oleh penerapan yang kurang memadai dari peraturan-peraturan, kekurangan dalam jumlah staf yang berkualifikasi dan kurang pemahaman tentang sistem dan proses PKP, baik di Kementerian Perencanaan dan Keuangan dan kementerian-kementerian struktural, yang telah mengekang pengeluaran publik. Sistemnya masih sangat bergantung pada para penasihat internasional.

Persoalan Pokok

- ***Melaksanakan anggaran.*** Langkah-langkah segera yang dapat diambil guna memperbaiki pelaksanaan anggaran dapat meliputi: (i) Komite Pelaksanaan Anggaran yang telah dibentuk di bawah Majelis para Menteri harus difungsikan; (ii) penerapan kembali dari kas kecil di kementerian-kementerian struktural, jawatan-jawatan, dan kabupaten-kabupaten; dan (iii) penerbitan ijin pengeluaran dana secara tepat waktu untuk memenuhi alokasi dana tahunan.⁹
- ***Memperbaiki kapasitas untuk melaksanakan pendelegasian pengadaan yang baru.*** Pemerintah telah mengeluarkan sebuah surat keputusan pada tahun 2006, yang merevisi ambang bagi pendelegasian pengadaan publik kepada kementerian-kementerian yang memenuhi syarat dari US\$ 10.000 menjadi US\$ 100.000. Delapan kementerian struktural sekarang telah mempunyai kuasa pengadaan yang didelegasikan namun mempunyai kapasitas pengelolaan pengadaan dan pengelolaan keuangan yang terbatas. Ini mengekang keefektifan pendelegasian di dalam memperbaiki pelaksanaan anggaran. Lebih banyak pembinaan dari Kementerian Keuangan, dan akses kepada sistem informasi pengelolaan keuangan yang dikomputerisasi, Freebalance, dapat membantu mengatasi masalah ini.

⁹ Aide Memoire Bank Dunia 26 Juli, 2006.

- ***Pendelegasian kontrol internal.*** Di masa lampau ada keengganan untuk mendelegasikan kontrol internal, umpamanya pemisahan dari penyiapan dan verifikasi CPV, dalam pengeluaran publik oleh karena kekhawatiran tentang kemungkinan kebocoran fiskal. Proses yang terlalu disentralisasi menyebabkan tertundanya penggunaan anggaran. Pemerintah mungkin ingin mengimbangi pendelegasian kontrol internal dengan akuntabilitas internal dan eksternal yang diperkuat, termasuk pengawasan legislatif. Kuasa pengadaan dan komitmen dapat didelegasikan kepada kementerian-kementerian struktural, selama pembayaran tetap disentralisasi.

Sektor Pengelolaan Keuangan Publik

Timor-Leste telah mencatat beberapa kemajuan di dalam beberapa bidang pengelolaan keuangan publik. Ini termasuk cakupan anggaran yang lengkap, yaitu mencakup semua pemasukan dan pengeluaran Pemerintah dan kemajuan dalam pelaksanaan dan pemutakhiran sistem informasi pengelolaan keuangan (SIPK) yang disebut *Freebalance*. Pengurusan untuk pemeliharaan disiplin fiskal agregat sudah dilakukan. Pengeluaran-pengeluaran dibiayai oleh anggaran sumber gabungan yang termasuk pemasukan non-minyak dalam negeri, pemasukan minyak, dan hibah dari masyarakat internasional. Pemasukan non-minyak, yang mulai pulih pada tahun 2005, telah mengalami kemunduran karena krisis yang terjadi baru-baru ini. Namun, harga minyak dan gas dunia yang tinggi dan hasil yang meningkat telah menaikkan penghasilan yang dapat diproyeksikan. Dana minyak bumi telah diintegrasikan ke dalam anggaran Pemerintah, dan dikelola secara transparan.

Anggaran pemerintah bersifat komprehensif dan berdasarkan kebijakan, dikaitkan dengan sasaran-sasaran pembangunan nasional. Namun, kelemahan dalam proses formulasi anggaran mengurangi akurasi pengeluaran-pengeluaran yang dianggarkan. Proses anggaran mengharuskan bahwa perkiraan-perkiraan didasarkan atas rencana kegiatan tahunan (RKT) yang didasarkan pada rencana pembangunan nasional (RPN) dan rencana investasi sektor (RIS). Namun, akurasi perkiraan anggaran berkurang oleh karena tidak adanya perencanaan pengeluaran, kapasitas yang lemah dan pengetahuan teknis yang terbatas di dalam penghitungan biaya proyek. Anggaran dialokasikan atas dasar komitmen dan biaya proyek keseluruhan, yang mencakup beberapa tahun dan dimuat di depan dalam alokasi tahunan tunggal. Praktik-praktik ini membesarkan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu tahun fiskal, membengkakkan angka pelaksanaan anggaran, dan akan tertolong kalau ada reformasi yang signifikan. Pemerintah sekarang dalam proses menuju sistem uang tunai, yang memang dianjurkan.

Selama anggaran berjalan, gaji dan upah, pada umumnya dilaksanakan seperti direncanakan, angka-angka pengeluaran atas dasar uang tunai untuk proyek modal pembangunan sangat rendah. Pelaksanaan anggaran berulang telah berjalan seperti direncanakan pada 75,2% pada akhir kwartal ketiga dari TA06/07. Pada akhir kwartal ketiga dari TA06/07, Pemerintah telah menggunakan hanya 2,6% dari anggaran modalnya atas dasar uang tunai, bila dihitung sebagai persentase dari alokasi. Pada TA05/06, hanya 6,9% dari anggaran modal dipakai atas dasar uang tunai.

Praktik-praktik dalam pencatatan transaksi, akunting, dan pelaporan memberikan gambaran yang tidak akurat tentang pelaksanaan anggaran. Informasi keuangan sering dicatat diluar Freebalance pada spreadsheet Excel dan laporan-laporan sering disiapkan pada spreadsheet Excel, bukan dihasilkan secara otomatis dari Freebalance. Pemerintah mungkin ingin mengikuti jejak pengeluaran secara rinci dari anggaran-anggaran yang lalu atas dasar uang tunai untuk meningkatkan akurasi posisi keuangan Pemerintah. Pemerintah juga dapat memastikan bahwa semua pegawai keuangan di kementerian-kementerian struktural yang memperoleh pendelegasian dapat mempunyai akses untuk membaca data-data di Freebalance.

Fakta dan Angka

Tabel 1. Timor-Leste: Keuangan Pemerintah Pusat
(Dalam jutaan dolar Amerika Serikat (US\$), kecuali kalau disebut lain)

	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07 (Q1-Q3)
Anggaran a/	74.27 b/	74.1 b/	78.67 b/	131.05 c/	320.64 c/
Pengeluaran Berjalan (dasar komitmen)	87.45	192.05
Pengeluaran Modal Kapital (dasar komitmen)	43.60	128.59
	Pengeluaran tahun berjalan atas dasar komitmen				
Pengeluaran	..	69.2	73.5	119.2	210.9
Pengeluaran Berjalan	..	59.5	61.5	77.3	114.6
Upah dan gaji	..	23.8	25.1	25.7	24.2
Barang dan jasa	..	29.2	31.2	45.6	66.3
Transfer yang berjalan	..	0.0	0.0	0.0	11.6
Subsidi kepada jawatan-jawatan	..	6.6	5.3	6.0	12.4
Pengeluaran untuk Barang Modal	..	9.7	12.0	41.9	96.4
Modal minor	2.3	6.6	14.3
Modal dan pembangunan	9.0	24.8	77.1
Transfer Modal	..	0.4	0.4	10.5	0.0
Subsidi kepada jawatan-jawatan	..	0.0	0.2	0.0	4.9
	Pengeluaran tahun berjalan atas dasar tunai				
Pengeluaran	68.5	66.9	70.7	93.1	99.7
Pengeluaran dari anggaran yang berjalan	58	55.5	59.1	81.8	80.8
Pengeluaran Berjalan	53.3	53.1	56.4	66.1	75.2
Upah dan gaji	21.6	23.8	25.1	25.7	24.2
Barang dan jasa	25.3	22.8	26.0	34.4	35.3
Transfer yang berjalan	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
Subsidi kepada jawatan-jawatan	6.4	6.6	5.3	6.0	11.8
Pengeluaran untuk Barang Modal	4.7	2.4	2.8	15.6	5.6
Modal minor	3.4	2.9
Modal dan pembangunan	1.7	2.7
Transfer Modal	..	0.4	0.4	10.5	0.0
Subsidi kepada jawatan-jawatan	..	0.0	0.2	0.0	0.0
Pengeluaran dari anggaran-anggaran yg lalu	10.5	11.4	11.5	11.3	15.2

a = Anggaran dialokasikan atas dasar komitmen

b = Sumber untuk TF02-03 sampai TF04-05 adalah akun dan laporan keuangan tahunan, GoTL

c = Sumber IMF, 2007

Sumber untuk lampiran statistik: IMF, 2007; Rujukan: Aide Memoir Bank Dunia Juli 2006, Oktober 2006, Februari 2007; laporan penaksiran PEFA, laporan Staf IMF, pasal IV, 2006.

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

13. Catatan Sektor: Pengelolaan Sektor Publik

Selayang Pandang

Pembangunan suatu tatanan pemerintahan yang efektif, bertanggung jawab, dan transparan sangat penting demi penyampaian layanan dan program secara efektif, dan agar memperoleh kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Tatanan pemerintahan memiliki pengelola-pengelola yang belum berpengalaman, sedikit peraturan, dan kemampuan yang terbatas. Kinerja dapat diperbaiki melalui pelaporan dan pengelolaan yang jelas, struktur karier berdasarkan jasa, perencanaan tenaga kerja, dan kesempatan pendidikan lanjutan. Undang-undang Kepegawaian Negeri (2004) menciptakan suatu dasar hukum yang baik untuk korps pegawai, namun peraturan-peraturan pelaksanaan masih harus disahkan. Undang-undang selanjutnya tentang gaji dan struktur karier dan penilaian staf sudah pada tahap rancangan namun perlu dievaluasi secara menyeluruh guna menjamin bahwa dampaknya kelak akan positif. Kepemimpinan merupakan sesuatu yang sangat penting, begitu juga usaha memotivasi staf dan membangun suatu korps kepegawaian, dan bagi menteri-menteri dan pejabat-pejabat untuk menjadi teladan perilaku dan praktik yang bertanggung jawab. Pemerintah harus menghindari setiap perubahan besar-besaran yang segera agar tidak memperlemah aparat pemerintahan yang sudah lemah.

Persoalan-persoalan Pokok

- ***Telusuri cara-cara untuk memperbaiki penyampaian layanan setempat pada jangka waktu pendek untuk menjamin dan memelihara kepercayaan publik.*** Bila sistem penyampaian layanan keuangan dan layanan lainnya diperkuat, maka hal itu akan membantu untuk memperoleh hasil-hasil. Usulan-usulan desentralisasi yang baru masih perlu disempurnakan, dan perlu diperlakukan dengan hati-hati guna mencegah gangguan selanjutnya atas layanan-layanan.
- ***Kembangkan kemampuan kepemimpinan dan pengelolaan*** agar (i) memusatkan pada hasil-hasil, (ii) menentukan standar untuk penyampaian tugas, (iii) menetapkan pelaporan yang sederhana, teratur, (iv) menentukan standar untuk perilaku tim, (v) memberikan penghargaan kepada staf untuk kinerja yang baik dan memungkinkan pendidikan dan pelatihan lanjutan mereka, (vi) menegur staf untuk pekerjaan yang buruk dan kealpaan.
- ***Laksanakan Undang-undang Kepegawaian Negeri Tahun 2004.*** Ini dapat memperlengkapi pengelola-pengelola dengan alat-alat yang diperlukan guna mengurus stafnya secara wajar. Namun, rancangan peraturan pelaksanaan, dan Surat-surat Keputusan yang lebih baru tentang Pengaturan Karier dan struktur gaji, perlu ditinjau dan diubah sebelum dilaksanakan untuk menjamin bahwa peraturan-peraturan itu sederhana, jelas, konsisten dan bebas dari politisasi.

- ***Selesaikan perencanaan tenaga kerja.*** Perencanaan tenaga kerja yang jelas diperlukan untuk mendukung terbentuknya suatu korps kepegawaian yang efektif. Kesatuan Koordinasi Pembangunan Kapasitas (CDCU – Capacity Development Coordination Unit) sedang menaksir jumlah pegawai yang diperlukan dalam berbagai kategori kecakapan, dan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan, kelebihan pegawai, dan cara-cara untuk memberikan kecakapan-kecakapan yang diperlukan dan memperbaiki produktivitas para penasihat internasional.
- ***Tunjangan sementara untuk pegawai negeri.*** Subsidi biaya hidup “satu-kali” yang dibayarkan kepada pegawai negeri dihentikan pada akhir TF07. Ketentuan sementara dapat dibuat dalam enam bulan ke depan dan anggaran-anggaran tahun kalender guna menghindari merosotnya gaji-gaji sampai keputusan diambil tentang struktur gaji yang tetap.

Sektor Pengelolaan Sektor Publik

Kepegawaian negeri, termasuk pegawai jawatan-jawatan otonom, terdiri atas 25.631 pegawai negeri, termasuk: 17.471 pegawai tetap, 4.034 pegawai sementara, dan 4.126 tenaga lepas.¹⁰

Anggaran untuk gaji dan upah pada TF 2006/2007 merupakan 12,8% dari keseluruhan anggaran negara. Pegawai-pegawai negeri sering tidak memahami dengan jelas tujuan atau fungsi utama jawatan di mana mereka bekerja, mereka diberikan tanggung jawab terbatas, dan hanya mempunyai sedikit insentif non-keuangan untuk memperbaiki kinerjanya. Kealpaan dan keterlambatan masuk kerja sering terjadi. Yang termasuk prioritas tinggi adalah penciptaan komunikasi yang jelas antara menteri-menteri dan pegawai-pegawai negeri, pengembangan pengelola-pengelola yang mampu dan berkomitmen, peraturan-peraturan jelas yang mencakup seluruh kepegawaian negeri, proses yang transparan untuk pembuatan keputusan, penerimaan pegawai, promosi dan pengendalian pengelolaan.

Pengembangan kemampuan kepemimpinan dan pengelolaan diperlukan agar diperoleh hasil-hasil. Penyampaian layanan yang diperbaiki dan pengelolaan sektor publik yang efektif hanya dapat dicapai melalui kepemimpinan, arah tujuan yang jelas, dan komunikasi yang jelas tentang apa yang diharapkan. Para pengelola harus didorong supaya memusatkan perhatian pada hasil-hasil dan menetapkan standar bagi penyampaian layanan yang dapat dipantau melalui suatu sistem pelaporan yang sederhana dan teratur. Memberikan penyuluhan kepada para pegawai tentang Etika Perilaku Pegawai Negeri dan menetapkan standar perilaku juga akan memberikan hasil-hasil yang lebih baik. Juga penting untuk memperkuat kegunaan beberapa ratus penasihat asing dan nasional dengan merumuskan peran, standar perilaku para penasihat, serta memastikan tanggung jawab mereka untuk mencapai hasil.

Undang-undang Kepegawaian Negeri Tahun 2004 memberikan suatu kerangka konstruksi bagi pengembangan, pengelolaan korps pegawai negeri dan pengelolaan sumber daya manusia.

Suatu prioritas yang segera adalah untuk melaksanakan undang-undang ini untuk memberikan para pengelola suatu alat untuk mengelola pegawai mereka dengan wajar a.l. di bidang rekrutmen, promosi, evaluasi performa, dan struktur penghargaan non-finansial. Peraturan pelaksanaan yang diusulkan akan dapat diperbaiki melalui evaluasi dan perubahan sebelum pelaksanaan. Ini meliputi suatu Surat Keputusan (Januari 2007) yang menetapkan suatu pengaturan karier dan struktur gaji

¹⁰ MSA stats at July 2007.

yang akan mengakibatkan kenaikan gaji pegawai negeri sebesar 38%. Surat keputusan ini dan rancangan surat-surat keputusan baru-baru ini tentang rekrutmen dan promosi serta evaluasi performa dapat ditinjau secara bermanfaat guna menjamin bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat dilaksanakan, konsisten dan adil. Di banyak negara, Komisi Layanan Publik yang independen ditugasi untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan ketidakberpihakan dalam penerapan peraturan-peraturan. Mereka juga menyebabkan bahwa menteri-menteri tidak terlibat dalam keputusan-keputusan tentang pegawai negeri. Ada peluang untuk menciptakan suatu Komisi Layanan Publik untuk Timor-Leste. Provedor dapat juga memainkan peranan penting di dalam memberikan kepada para pegawai negeri dan warga negara suatu cara yang tidak berpihak untuk menyatakan keprihatinan atas kesalahan pemerintahan. Publisitas mengenai proses pengaduan dan hasil-hasilnya akan menciptakan suatu motivasi untuk memperbaiki diri.

Dibutuhkan Rencana-rencana untuk meningkatkan Lembaga Nasional Administrasi Publik (INAP) namun dibutuhkan waktu untuk melaksanakannya. Sementara itu, usaha-usaha secara besar-besaran dari pihak donor untuk meningkatkan kemampuan pegawai negeri telah mencapai hasil yang berbeda-beda, oleh karena telah terjadi pengendalian yang terlalu besar atas penggantian tenaga oleh penasihat internasional dan pelatihan di luar tempat kerja. Perlu penekanan yang lebih besar terhadap pelatihan di dalam sistem tempat kerja. Juga dibutuhkan perencanaan tenaga kerja guna menghasilkan jumlah dan jenis personil yang cocok, dengan kecakapan administratif dan teknis yang diperlukan guna memberikan layanan kepada publik. Prakarsa perencanaan tenaga kerja CDCU bertujuan menghadapi tantangan ini. Pada tingkat yang sejajar, suatu Sistem Informasi Pengelolaan Publik (SIPP) yang akan menyediakan data garis bawah esensial yang dibutuhkan untuk mengelola staf dan perencanaan dan performa tenaga kerja secara menyeluruh sedang dikembangkan.

Fakta dan Angka – Profil pegawai¹¹

<i>Lembaga berdaulat</i>	<i>Pegawai tetap</i>	<i>Sementara</i>	<i>Lepas</i>	<i>Penasihat Intl.</i>	<i>Total(Tak termasuk intl.)</i>
Kantor Presiden	111	40	-	6	151
Parlemen Nasional	43	30	-	6	73
Pengadilan	66	68	-		134
Sub-total					358

Jawatan Pemerintah

Kantor Perdana Menteri & Ketua Dewan Menteri	73	97	27	17	197
Kementerian Pertahanan	18	-	-	-	18
Kantor Sekretariat Negara untuk Dewan Menteri	21	3	20		44
Kementerian Administrasi Negara (termasuk admin. Kabupaten)	414	98	1300	7	1812
Kementerian Dalam Negeri (termasuk admin.. PNTL)	661	55	339	15	1055
Kementerian Pembangunan	57	65	62	2	184
Sekretaris Negara untuk Pemuda dan Olahraga	35	21	2	-	58
Kementerian Kehakiman	477	18	107	15	602
Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	316	187	250	21	753
Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	6831	1220	1190	4	9241
Kementerian Kesehatan	1760	602	-	4	2362

¹¹ MoPF Budget Paper No 1, 2006-2007 refers.

Kementerian Negara untuk Reinsersi Masyarakat dan Buruh	105	-	157	5	262
Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama	64	66	-	1	130
Kementerian Perencanaan dan Keuangan	511	62	205	29	778
Kementerian Transportasi dan Komunikasi	140	93	101	2	334
Kementerian Kebijakan Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi	190	27	-	7	217
Kementerian Pekerjaan Umum	189	88	78	6	355
F-FDTL	1435	-	-		1435
PNTL	3500	3	40		3543
Sub-total					23,380

Badan-badan independen:

INAP	29	16	-		45
Kantor Kejaksaan	29	17	8	11	54
Ombudsman untuk Hak Azasi dan Keadilan	12	4	30	3	46
Lembaga Pendidikan Tinggi atau Universitas	-	1006	-		1006
Sub-total					1,151

Badan-badan otonom:

STAE				1(?)	
Direktorat untuk Material	26	14	146	-	186
EDTL	260	15	0	-	275
Direktorat untuk Layanan Penerbangan Sipil	84	4	44	-	132
Otorita Pelabuhan	44	-	20	-	64
Perbankan dan Pembayaran	67	-	-	3	67
Suplai Medis Otonom	-	-	-	-	0
Dinas Penyiaran Publik dari Timor-Leste	-	135	-	2	135
Sub-total					859
TOTAL	17.568	4.054	4.126	166	25.748

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

14. Catatan Sektor: Telekomunikasi

Selayang Pandang

Akses terhadap Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi di Timor Leste bersifat terbatas dan mahal. Hanya 5% dari warga Timor, kebanyakan dari mereka di Dili, yang mempunyai akses terhadap layanan dasar data atau telepon.¹² Akses ke Internet mahal dan kapasitasnya terbatas. Bila dapat diperoleh akses ke infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang mudah tersedia, terjangkau, dan dapat diandalkan, maka hal itu akan berfaedah bagi seluruh perekonomian dan masyarakat. Manfaatnya meliputi biaya yang lebih rendah bagi Pemerintah, dunia usaha, dan rumah-rumah tangga. Suatu manfaat lainnya adalah akses yang lebih baik ke bidang informasi. Ini dapat membantu kaum petani untuk mencari keterangan tentang harga dan ketersediaan barang dan jasa, atau usaha-usaha kecil yang berhubungan dengan pemasok-pemasok. Teknologi komunikasi yang lebih baik dapat menciptakan peluang ekonomi yang baru, seperti yang ditawarkan oleh layanan finansial yang dimungkinkan melalui telepon seluler dan warung internet, serta penciptaan lapangan kerja secara langsung dan tidak langsung. Lagipula, Pemerintah dapat memperoleh pemasukan tambahan dari suatu sektor telekom yang lebih didiversifikasi daripada yang dapat diperolehnya dari satu operator tunggal. Sekarang ini, Timor-Leste tidak memperoleh manfaat-manfaat ini. Banyak pemerintah, termasuk yang di wilayah Pasifik, sedang menghadapi tantangan yang serupa. Reformasi di bidang telekomunikasi dapat mempunyai profil politik yang tinggi oleh karena dampaknya yang langsung terhadap penduduk. Dengan kepemimpinan yang kuat, dan dukungan teknis dari mitra-mitra pembangunan, ada potensi untuk memperoleh manfaat yang segera, walaupun perubahan-perubahan kelembagaan akan memakan waktu.

Persoalan-persoalan Pokok

- ***Mempromosikan suatu strategi pro-miskin/pro-usaha pedesaan.*** Sebagai pemegang saham dan pengatur, Pemerintah dapat memberikan dorongan kuat kepada Timor Telecom agar mengadopsi suatu strategi yang lebih pro-miskin/pro-usaha pedesaan. Langkah-langkah yang segera, dapat meliputi pengenalan akan kartu isi ulang kredit dan isi ulang listrik yang murah, mengurangi biaya pengiriman pesan teks singkat (SMS), pengenalan akan telepon genggam yang murah, dan dimulainya suatu program “telepon desa” guna menyediakan akses publik di daerah pedesaan.
- ***Meningkatkan persaingan.*** Pemerintah dapat memperkenalkan persaingan dalam bidang telekomunikasi, terutama telepon seluler dan layanan internet. Pendekatan yang direkomendasikan adalah dengan melakukan negosiasi ulang atas kontrak Konsesi (BOT) dengan penyedia yang sekarang. Ini akan meliputi pertama-tama persiapan dan adopsi suatu kebijakan teknologi informasi yang baru. Ini dapat diikuti oleh suatu Panitia Acara

¹² Kabel tetap=2.300, pelanggan HP=63.000. Pelanggan Internet berjumlah sekitar 650 orang.

Pemerintah, penyiapan suatu strategi perundingan, dan suatu perjanjian hukum formal dengan Timor Telecom.

- ***Memutakhirkan kerangka hukum.*** Undang-undang telekomunikasi dapat direvisi dan dipermodern. Juga penting untuk mengembangkan peraturan baru di bidang-bidang tertentu, seperti bayaran, spektrum, dan antar-koneksi. Peninjauan dan penyusunan peraturan secara ideal akan memusatkan pada kepentingan konsumen/pengguna, bukan kepentingan operator, dan otorita pengatur (ARCOM) harus diberi kuasa memberlakukannya.
- ***Melakukan investasi dalam suatu “tulang punggung” domestik yang berkecepatan tinggi.*** Perbaikan dalam infrastruktur komunikasi dapat meningkatkan kapasitas menyeluruh dari jaringan telekom. Dua langkah penting adalah pembangunan suatu “tulang punggung” domestik guna menjamin akses ke layanan-layanan di seluruh wilayah dan hubungan internasional biaya yang lebih rendah. Pada waktu yang bersamaan, perlu untuk menetapkan peraturan pengaman untuk memungkinkan penggunaan infrastruktur seperti itu dengan syarat-syarat yang adil dan transparan.

Sektor Telekomunikasi

Struktur pasaran telekomunikasi di Timor-Leste bersifat restriktif, yang menghambat investasi baru. Operator telekomunikasi, Timor Telecom (TT), memegang monopoli untuk 15 tahun dalam bentuk kontrak konsesi “bangun, operasi, transfer” (BOT). Ini suatu instrumen hukum yang tidak lazim bagi suatu ketentuan layanan telekomunikasi. Undang-undang dan peraturan yang ada sekarang menguntungkan kepentingan operator. Peraturan itu juga membatasi peran otorita pengatur dan memberikan sedikit perlindungan kepada konsumen atau bahkan tidak sama sekali. Faktor-faktor ini telah membatasi pengembangan selanjutnya dari sektor ini. Umpamanya, layanan internet sangat terbatas dan mahal. Layanan dial-up yang lambat tersedia di mana ada kabel-kabel tetap, kebanyakan di Dili. Layanan “dedikasi” atau sewa kabel tersedia untuk pengguna besar, namun sangat mahal. Broadband atau internet “kecepatan tinggi” tidak tersedia.

Perjanjian Konsesi BOT memberikan keeksklusifan yang dirumuskan secara luas atas hampir semua layanan telekomunikasi. Namun, kewajiban yang berkaitan dengan mutu pelayanan cukup lemah. Konsesi tersebut bersifat jangka panjang dan tidak mempunyai ketentuan pengakhiran yang wajar. Pemegang konsesi dibebaskan dari pembayaran untuk pemakaian frekuensi sampai akhir masa konsesi, namun dapat “memiliki” nomor-nomor, yang dapat dianggap sebagai sumber daya publik yang langka. Sifat pengaturane BOT, di mana penyedia diharuskan mentransfer aktiva kepada Pemerintah pada akhir masa konsesi, tidak memberikan rangsangan untuk investasi jangka panjang. Ia mendorong operator untuk memaksimalkan laba jangka pendek.

Surat keputusan no. 11 dan 12/2003 tidak cukup memberdayakan lembaga-lembaga yang relevan. Walaupun undang-undang telekomunikasi telah disahkan, ia tidak sepenuhnya diberlakukan. Lagipula, undang-undang organik untuk kementerian sektor yang menetapkan struktur organisasi, fungsi dan proses-proses kementerian tersebut belum disetujui. Dengan

belum adanya undang-undang organik, sulit menerapkan undang-undang telekomunikasi, menyelenggarakan atau mendelegasikan wewenang. Mengenai undang-undang itu sendiri, walaupun mencerminkan praktik peraturan yang baik di banyak bidang, ia cacat dalam bidang-bidang lainnya, seperti perizinan, kewajiban layanan universal, tarif, spektrum radio, media, dan penomoran. Di samping itu, undang-undang itu disahkan setelah konsesi BOT diberikan dan diarahkan pada suatu pasaran monopolistik.

Lembaga-lembaga dewasa ini tidak memiliki kapasitas pemberlakuan. Kementerian sektor bertindak sebagai pembuat kebijakan, dan regulator sektor tersebut, ARCOM, dikaitkan pada Kementerian tsb. Namun, kapasitas regulator dihambat oleh kekurangan kecakapan dan pembiayaan, umpamanya di bidang penggunaan spektrum radio, alokasi nomor, dan bayaran lisensi yang biasanya dipungut pihak regulator.

Ada potensial yang nyata untuk akses yang lebih baik melalui teknologi baru, terutama di bidang telepon seluler (HP) dan bidang internet, dan melalui pasaran yang lebih kompetitif. Biaya akses ke telekomunikasi telah turun di seluruh dunia, dan teknologi baru, terutama di bidang telepon seluler (HP)/internet, membawa alat-alat informasi dan komunikasi lebih dekat kepada penduduk pendesaan. Penstandaran memberikan kesan bahwa, dengan persaingan, terutama untuk layanan telepon seluler, jumlah pelanggan HP dapat mencapai sekurang-kurangnya 200.000 jiwa dalam waktu 2-3 tahun, naik dari jumlah sekarang yang kurang dari 70.000 jiwa. Di negara-negara lain, bahkan *ancaman persaingan* telah menyebabkan para operator yang memegang monopoli untuk menurunkan biaya dan meningkatkan jenis dan mutu layanan.

Fakta dan Angka

Data Komparatif (sumber, ITU 2005, ditambah data operator terakhir yang tersedia).

Susunan pasar: M=monopoli, S=Saingan, SS=saingan sebagian (Penyedia Layanan Internet tidak dapat membangun infrastruktur sendiri).

<i>Negara</i>	<i>Penduduk</i>	<i>Kabel tetap/100</i>	<i>F</i>	<i>HP/100</i>	<i>M</i>	<i>Internet/100</i>	<i>Struktur pasar</i>
Timor-Leste	1.100.000	<0,5	M	5,0	M	<0,5	SS
Samoa	185.000	11,0	M	46,0	S*	4,0	S
Vanuatu	212.000	3,5	M	11,5	M*	3,8	M
Solomon Is	478.000	<0,5	M	1,5	M	<0,5	M
Fiji	848.000	14,0	M	35,0	M*	7,7	S
PNG	6.000.000	<1,0	M	3,0	M	<0,5	SS

Catatan: Persaingan dalam komunikasi HP mungkin sekali akan diperkenalkan di Vanuatu dan Fiji pada tahun 2007. Samoa sudah memperkenalkan persaingan HP pada tahun 2006.

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

15. Catatan Sektor: Transportasi

Selayang Pandang

Investasi di sektor transportasi jalan, penerbangan, dan maritim mempunyai potensi untuk dengan segera menghasilkan manfaat-manfaat pembangunan sosial dan ekonomi yang penting. Namun, keadaan jaringan jalan telah menjadi biang keladi kemacetan dalam bidang pembangunan, bukan suatu mimbar untuk pertumbuhan. Keadaan jaringan jalan pada umumnya buruk, dan ada bagian-bagian yang selalu rusak selama musim hujan, yang mengakibatkan bahwa penduduk pedesaan hanya mempunyai akses terbatas ke kota-kota dan pasar-pasar. Biaya pengoperasian kendaraan cukup tinggi dibanding dengan standar kawasan ini, perjalanan berjalan lambat, dan negara ini terpecah di bidang ekonomi. Namun, telah banyak dilakukan perencanaan strategis transportasi, dan Timor Leste mempunyai suatu rencana investasi sektor jalan 10-tahun bermutu tinggi yang rinci¹³ yang menjadi dasar Program Investasi Sektor Transportasi (SIP – Sector Investment Program). SIP sekarang ini sedang dimutakhirkan dan untuk sementara meliputi investasi transportasi (darat, udara, laut) yang diusulkan dalam Program untuk Pembangunan Nasional yang Dipercepat (PAND – Program for Accelerated National Development)¹⁴. Pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan dalam program transportasi PAND akan menciptakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan dan memberikan peluang untuk melembagakan rancangan dan prosedur konstruksi yang bermutu. Proyek-proyek jalan, penerbangan, dan maritim yang penting sedang menunggu komitmen anggaran. Apakah akan dilakukan komitmen terhadap PAND merupakan suatu persoalan pokok yang dihadapi sektor transportasi, terutama jalan-jalan dan jembatan-jembatan.

Persoalan-persoalan Pokok

- ***Mempercepat pembangunan nasional.*** Keputusan jangka pendek yang paling penting yang dihadapi Pemerintah, untuk sektor jalan, adalah apakah melanjutkan program rehabilitasi jalan nasional 10-tahun (tahun pertamanya sekarang ini sedang dilaksanakan), atau apakah meningkatkan program tersebut dengan menyertakan perbaikan jalan secara luas (bukan hanya rehabilitasi; dan termasuk pembangunan jembatan-jembatan). Kementerian Infrastruktur sudah menerima empat permintaan bagi usulan-usulan untuk jasa konsultan guna menyusun rancangan sementara dan studi kelayakan (berdasarkan aspalan jalan nasional standar dengan lebar tujuh meter di mana dimungkinkan). Pemerintah sedang berada dalam posisi, kalau dikehendaknya, untuk merekrut konsultan untuk pekerjaan ini dalam waktu 2 bulan.
- ***Memperbaiki pelaksanaan anggaran dan mutu pekerjaan.*** Walaupun kementerian-kementerian Pekerjaan Umum (KPU) dan Transportasi dan Komunikasi yang lama telah memperbaiki secara signifikan program modal pada bagian akhir TF07, tidak mungkin

¹³ Disiapkan dengan bantuan ADB TA 3731-TIM, studi kelayakan untuk Proyek Investasi Sektor Jalan.

¹⁴ Lihat rincian proyek NADP yang dimuat di Tabel 1.

meningkatkan secara signifikan laju pekerjaan umum dan memanfaatkan potensi penciptaan lapangan kerja yang diberikannya, tanpa pelaksanaan anggaran yang diperbaiki.

- ***Pemberian pekerjaan kepada pihak luar (outsourcing), kontrak singkat, kontrak besar, dan model-model lainnya untuk mengungkitkan sumber daya kementerian.*** Hanya ada sedikit pengalaman tentang studi kelayakan, rancangan bangunan, dan pekerjaan umum yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta di Timor-Leste. Ini sedang berubah, dan Kementerian Infrastruktur harus sepenuhnya memanfaatkan dukungan pengelolaan proyek dari luar kalangan Pemerintah.
- ***Pendekatan padat karya.*** Sudah ada satu program pemeliharaan jalan yang padat karya, dan dua sedang direncanakan, termasuk perbaikan jalan. Ini dapat berfaedah langsung bagi ribuan penduduk setempat, terutama di daerah pedesaan, dan harus dengan cepat diselenggarakan.

Sektor Transportasi

KPU yang lama telah mempekerjakan lebih dari 50 jasa konsultan dan kontrak pekerjaan umum dengan total nilai sebesar US\$ 28 juta sebelum akhir TF07. Namun masih ada tantangan-tantangan yang mendesak: (a) pekerjaan modal biasanya dimasukkan dalam anggaran tahunan tanpa adanya pemrograman dan definisi proyek yang layak; (b) ini menyebabkan bahwa staf ke menteri harus melakukan tugas yang tidak mungkin untuk menyiapkan dan mengelola kontrak rancangan sementara, kontrak rancangan yang rinci, dan kontrak pekerjaan umum – semuanya dalam setahun; (c) oleh karena peraturan “pakai uangnya atau hilang uangnya”, kementerian-kementerian menyiapkan dan menawarkan atau menunjukkan sumber tunggal kontrak-kontrak yang bersifat sangat kasar dan membuat pemerintah rentan terhadap kemungkinan kehilangan uang dan pekerjaan umum bermutu rendah; dan (d) walaupun begitu, pembayaran-pembayaran aktual tetap rendah dan jumlah-jumlah yang dipindahkan ke anggaran berikut makin bertambah. Butir-butir pekerjaan modal mestinya tidak dianggarkan sampai tahap studi rancangan/kelayakan yang sementara. Di dalam usaha memperbaiki hal ini, Kementerian Infrastruktur dapat sepenuhnya memanfaatkan dukungan pengelolaan proyek dari luar yang ditawarkan.

Kontrak-kontrak “singkat” harus lebih sering digunakan, terutama untuk pemeliharaan jalan, sebagai model pengungkitan sumber-sumber daya Kementerian tsb. Kontrak-kontrak periode dapat dengan mudah dipersiapkan, ditawarkan, dan ditentukan pemenangnya, serta dikelola, yang dapat meliputi seluruh kota atau kabupaten untuk jangka waktu tertentu. Paket-paket juga dapat dikonsolidasikan, misalnya semua jembatan dari jenis dan skala tertentu dapat diberikan sebagai satu kontrak tunggal. Ini tidak membahayakan perusahaan-perusahaan setempat yang selalu dapat disubkontrak guna mengurangi biaya. Model-model lain perlu diuji-cobakan, misalnya kontrak pemeliharaan jalan dengan bantuan berdasarkan hasil (OBA).

Program rehabilitasi jalan pedesaan dan jalan penghubung. Perencanaan strategis, pemrograman dan investasi selama ini dpusatkan hanya pada jalan-jalan nasional dan beberapa jalan kabupaten. Yang sekarang mendesak adalah rehabilitasi jalan-jalan penghubung di pedesaan secara sistematis.

Fakta dan Angka (2005)

Luas wilayah (km persegi)	14.870
Panjang Jaringan Jalan Nasional yang ada dengan 400 jembatan	1.412 km,
Panjang Jaringan Jalan dalam Keadaan Buruk atau Sangat Buruk	1.200-1.300 km
Lebar Aspalan Asli	3,2-4,5 m

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

16. Catatan Sektor: Veteran

Selayang Pandang

Pengakuan dan bantuan untuk kaum veteran perjuangan merupakan suatu bidang di mana tercapai banyak kemajuan sejak tahun 2002. Komisi-komisi di bawah Kantor Presiden mendaftarkan seluruhnya 75.143 veteran, dalam suatu proses yang transparan dan partisipatif. Suatu database yang dapat diandalkan mengenai kaum veteran terdaftar telah dihasilkan. Undang-undang veteran, Estatuto dos Combatentes da Libertacao Nacional (ECLN), yang disahkan pada tahun 2006, pada dasarnya sehat, namun masih dapat disempurnakan melalui amandemen. Pembayaran pensiun veteran dan manfaat lainnya telah tertunda, menunggu persetujuan surat-surat keputusan yang relevan. Namun, Pemerintah telah menyiapkan prosedur administratif yang relevan, buku-buku pedoman, rencana-rencana, dan suatu database pensiun. Pensiun-pensiun dapat segera dibayarkan begitu surat-surat keputusan tersebut disetujui.

Persoalan-persoalan Pokok

- ***Pemindahan database.*** Dewasa ini database kaum veteran ada di Comissão de Homenagem, Supervisão de Registo, e Recurso (CHSRR). Pemindahan database kepada Secretário de Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes de Libertação Nacional (SEAACLN) diperlukan agar Pemerintah dapat mulai memproses pensiun.
- ***Menyetujui surat keputusan.*** Dua surat keputusan yang menetapkan kerangka hukum untuk pembayaran pensiun telah dirancang. Kedua surat keputusan tersebut perlu disetujui agar Pemerintah dapat mulai membayar pensiun.¹⁵
- ***Penguatan kelembagaan.*** Dewasa ini, 17 dari 22 tenaga kerja Direcção Nacional dos Antigos Combatentes de Libertação Nacional (DNACLN) dipekerjakan berdasarkan kontrak sementara, yang menyebabkan bahwa ada kurang investasi dalam pelatihan dan ada risiko kehilangan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan. Memindahkan staf yang mempunyai kemampuan ke kontrak yang permanen akan memperkuat departemen ini.
- ***Mengamandemen undang-undang veteran.*** Dapat diberikan pertimbangan untuk memperkuat skema pensiun veteran melalui amandemen undang-undang tersebut.

¹⁵ (i) Surat keputusan tentang pensiun dan subsidi kepada pejuang-pejuang kemerdekaan nasional dan keluarga-keluarga mereka dan (ii) Surat keputusan Pemerintah yang menetapkan manfaat keuangan di bawah Undang-Undang Pejuang-pejuang Kemerdekaan Nasional.

Sektor Veteran

Seluruhnya 12.002 orang telah dianugerahi medali dalam upacara-upacara pengakuan sejak bulan November 2006. Upacara-upacara itu diselenggarakan oleh CHSRR. Di antaranya, 11.367 dianugerahkan kepada keluarga dari pejuang yang tewas, sedangkan 635 dianugerahkan kepada pejuang yang masih hidup. Upacara-upacara berikutnya direncanakan pada akhir tahun 2007. Ditunjang oleh anggaran Pemerintah, CHSRR diberikan mandat oleh ECLN untuk menyelenggarakan dan mengawasi upacara-upacara tersebut. CHSRR meliputi anggota-anggota yang ditunjuk Parlemen (3), Pemerintah (3), Presiden (3), dan F-FDTL (1). CHSRR dibentuk pada bulan September 2006 dan dapat berjalan selama seluruhnya dua tahun. Menurut hukum, suatu kesempatan registrasi akhir harus dibuka selama satu tahun, yang sekarang ini direncanakan dimulai pada bulan Januari 2008. Registrasi tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah, namun diawasi oleh CHSRR.

Data dari registrasi yang dilaksanakan Comissão para os Assuntos dos Antigos Combatentes - Comissão para os Assuntos dos Veteranos das Falintil (CAAC-CAVF) dan Comissão para os Assuntos dos Quadros da Resistencia (CAQR) telah dikoreksi dan diverifikasi beberapa kali oleh Comissão Consolidação de Dados (CCD), yang ditutup pada bulan Mei 2006. Datanya baik. Namun, ada 10.338 kasus pada tahap tunggu yang datanya hilang atau tidak lengkap. Juga ada 859 kasus "denunciados" di mana tuntutan telah diajukan terhadap perorangan, mempertanyakan hak mereka untuk diakui sebagai veteran. Menurut hukum, kedua golongan untuk kasus harus diselesaikan oleh CHSRR.

Undang-undang veteran meramalkan empat macam pensiun: Subvenção por Dedicção Exclusive, Pensão Especial de Subsistência, Pensão Especial de Reforma, dan Pensão de Sobrevivência. Undang-undang tersebut selama ini ditafsirkan sedemikian rupa sehingga hanya partisipasi purna waktu dalam perjuangan perlawanan, dalam praktik perjuangan bersenjata atau penjara, dihitung untuk tujuan menerima pensiun. Suatu perubahan di mana masa di front klandestin juga dihitung akan sangat meningkatkan kelompok yang memperoleh manfaat, dan implikasi anggaran dari undang-undang tersebut. Pada tahun 2005, 38 orang veteran yang masa perjuangannya panjang mulai menerima subsidi antara US\$ 100 dan US\$ 123 sebulan. Ini akan dihentikan begitu sistem pensiun dimulai.

Dewasa ini hanya 350¹⁶ veteran yang hidup berhak untuk menerima pensiun bulanan. Mereka yang berdinis antara satu sampai delapan tahun hanya berhak mendapat *Subvenção por Dedicção Exclusive*, suatu pembayaran satu kali saja. Mereka yang berdinis 8-14 hanya akan menerima pensiun setelah mereka berumur 55 tahun. Sebaliknya sejumlah 11.829 keluarga dari veteran yang tewas dapat menerima pensiun, tanpa diterapkannya batas usia. Pertimbangan dapat diberikan terhadap penurunan tahun partisipasi yang ditetapkan, menghapus batas usia 55 tahun, dan/atau membuat tingkat pembayaran lebih adil.

Pemerintah telah melakukan persiapan-persiapan yang berarti untuk pembayaran pensiun kaum veteran. Telah dibentuk kesatuan kehadiran publik, kesatuan pensiun dan manfaat, dan kesatuan database. Kesatuan kehadiran publik akan berkantor di masing-masing dari 13 kabupaten untuk menerima permohonan pensiun. Suatu tempat di Dili untuk kesatuan

¹⁶ Semua angka dari Comissão Consolidação de Dados, November 2006 via SEAVAC/DNACLN.

kehadiran publik telah diperoleh dan sedang menunggu rehabilitasi, walaupun dana-dana tidak diobligasikan. US\$ 10 juta telah dimasukkan dalam anggaran TF07 untuk pensiun kaum veteran, namun dana ini tidak dapat diakses sewaktu Pemerintah sedang bekerja tanpa anggaran baru.

Pihak-pihak yang memperoleh manfaatnya telah diidentifikasi dan pembangunan sedang berjalan untuk 100 rumah bagi para veteran yang mengabdikan 15 sampai 24 tahun, tidak mampu bekerja karena cacat, dan sekarang ini tidak mempunyai pemondokan. Tahap pertama dari memorial Taman Pahlawan dekat pangkalan Metinaro F-FDTL telah diselesaikan. Suatu tahap kedua sedang direncanakan dan konsultasi tentang rancangannya sedang berjalan.

Fakta dan Angka

Jumlah seluruh Veteran Terdaftar:	75.143
CAAC-CAVF (Frente Armada):	38.337
CAQR (Frente Clandestina):	36.806
Daftar tunggu:	10.338
Hidup:	56.627
Meninggal:	18.516
Martir (Tewas sebagai akibat partisipasi, keluarga berhak mendapat pensiun):	11.829
Tidak diikutsertakan – partisipasi kurang dari tiga tahun:	7.848
Partisipasi 3 – 8 tahun (baik perjuangan bersenjata maupun klandestin):	27.983
3 – 5 tahun dalam perjuangan bersenjata:	7.901
6 – 8 tahun dalam perjuangan bersenjata:	181
Partisipasi 8 tahun atau lebih (hak mendapat medali menurut hukum):	11.223
8 – 14 tahun dalam perjuangan bersenjata:	193
15 tahun atau lebih dalam perjuangan bersenjata:	157
24 tahun dalam perjuangan bersenjata:	28

Pensiun Veteran seperti Dirumuskan oleh Estatuto dos Combatentes da Libertacao Nacional, Undang-undang No. 3/2006

<u>Judul Pensiun</u>	<u>Kategori seperti Dirumuskan Undang-undang</u>	<u>Maslahat*</u>	<u>Kisaran Pembayaran</u>
Pensão Especial de Reforma (Art. 25)	15 tahun atau lebih	157 jiwa	\$254 - \$407 per bulan
Pensão Especial de Subsistência (Art. 24)	8 - 14 tahun, begitu melampaui usia 55 tahun	193 sekarang 53 di atas usia 55 tahun	\$85 - \$159
Pensão Especial de Subsistência (Art. 24)	Veteran yang cacat	Tidak diketahui jumlah veteran cacat, menunggu perumusan kriteria	\$85/bulan
Subvenção por Dedicación Exclusive (Art. 23)	Veteran yang tidak bergabung dalam dinas kepegawaian – dalam praktik mereka yang melayani 1 – 8 tahun	Kira-kira. 17.905	Pembayaran sekaligus sebesar \$200 per tahun dinas
Pensão de Sobrevivência (Art. 26)	Janda, yatim piatu, orang tua, atau saudara kandung dari yang tewas karena ikut serta dalam perjuangan. Satu masalah pensiun per orang yang tewas	11.829	\$85/bulan

(Sumber data: CCD via DNACLN, November 2006)

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

17. Catatan Sektor: Pengadaan Air dan Sanitasi

Selayang Pandang

Secara global, sektor Pengadaan Air dan Sanitasi (PAS), baik di pedesaan maupun di perkotaan, sarat dengan masalah. Data mengenai lingkup sambungan PAS dan tingkat layanannya tidak dapat diandalkan, dan sensus nasional pada tahun 2004 tidak memuat pertanyaan yang berkaitan dengan PAS. Di seluruh negara, hanya sekitar 13% dari keluarga-keluarga mempunyai sambungan ke rumah, dan 16% dilayani oleh keran komunitas. Perkiraan terbaik untuk pengadaan air pedesaan adalah 30% sambungan (2004). Perkiraan pengadaan air perkotaan berbeda-beda sesuai definisi yang dipakai: misalnya, kalau ukurannya adalah akses terhadap air yang aman yang disalurkan melalui pipa 24 jam terus menerus, maka hanya sekitar 25% dari rumah tangga di Dili dilayani secara memadai. Ada masalah tentang kesediaan membayar, kesediaan untuk menagih, kesulitan teknis memelihara sistemnya, dan pengurusan perusahaan air minum. Perkiraan lingkup sanitasi pedesaan untuk tahun 2004 adalah 19%. Sama seperti di banyak negara lainnya, di Timor-Leste permintaan efektif terhadap sanitasi yang lebih baik biasanya lebih rendah daripada permintaan terhadap persediaan air yang lebih baik. Perubahan dalam pengetahuan, sikap dan praktik dibutuhkan untuk menanamkan faedah-faedah kesehatan yang diperoleh dari persediaan air dan sanitasi yang lebih baik. Pendanaan yang tidak memadai, strategi investasi yang tidak optimal, dan kurangnya sumber daya manusia merupakan halangan pembangunan yang paling penting.

Persoalan-persoalan Pokok

- ***Meningkatkan sumber daya manusia.*** Timor-Leste belum memiliki perancang, insinyur, dan teknisi PAS yang berkualifikasi, terlatih dan berpengalaman dalam jumlah yang cukup untuk dapat mencapai sasaran-sasaran RPN dan SPM (Sasaran-sasaran Pembangunan Milenium). Ini dapat memakan waktu 10-15 tahun, dan sementara itu ahli-ahli dari luar, yang dikontrak Pemerintah, dibutuhkan kalau sasaran hendak dicapai.
- ***Memelihara layanan PAS.*** Sulit memelihara layanan PAS pedesaan maupun perkotaan. Sebagian dari masalahnya adalah bahwa sistem pengadaan air melalui saluran pipa sulit dikelola dan dipelihara, terutama di daerah pedesaan. Sebagian cara pemecahannya adalah dengan merumuskan standar layanan yang jelas dan yang *kena* – tingkat layanan – untuk keadaan geografis dan masyarakat tertentu. Kebijakan tingkat-tingkat layanan telah disiapkan dan sekarang dapat disebar dan diterapkan. Lebih banyak keterlibatan oleh pihak Pemerintah dalam PAS pedesaan, dengan memberikan dukungan teknis, keuangan dan wewenang kepada para pengelola sistem masyarakat, juga dapat membantu memecahkan masalah-masalah tersebut.

- ***Meningkatkan keadaan keuangan yang berkesinambungan.*** Penyelenggaraan pengadaan air di daerah perkotaan merupakan usaha merugi yang makin meningkat. Rencana Pembangunan Nasional, dan pengalaman global, tegas menyatakan bahwa biaya harus diperoleh kembali dari para pelanggan. Ini sulit dalam keadaan sekarang, dan perolehan kembali biaya sepenuhnya masih 10 tahun ke depan. Namun gejala penurunan dalam pemasukan pengadaan air di perkotaan harus dibalikkan dengan meningkatkan pembuatan tagihan dan dan pemungutan tagihan. Undang-undang yang diperlukan sudah ada. Pada tahun 2004 – 2005, Pemerintah telah menyiapkan suatu Kebijakan Sumber Daya Air Nasional, namun tidak pernah disetujui Dewan Menteri.

Sektor PAS

Direktorat Nasional Air dan Sanitasi (DNAS) bertanggung jawab atas pembangunan dan pemberian layanan PAS di seluruh Timor-Leste. DNAS mempunyai 164 jabatan staf permanen yang dialokasikan, dilengkapi dengan 137 jabatan kontrak sementara. Sebagian besar staf dan sumber daya dikerahkan untuk kegiatan pengadaan air di perkotaan. DNAS merupakan suatu jawatan penagihan pemasukan yang ditunjuk, namun bukan suatu “Jawatan Penyimpanan Pemasukan” (seperti EDTL, otorita Pelabuhan, dan Penerbangan) dan harus menyampaikan pungutan-pungutan kepada Otorita Perbankan dan Pembayaran. Direktorat Layanan Perusahaan (CSD) di dalam tubuh Kementerian Kebijakan Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi yang lama, bertanggung jawab memberikan nasihat kepada Menteri tentang kebijakan PAS. Dewasa ini tidak ada penasihat internasional yang didanai donor yang bekerja dengan CSD, yang lebih lagi menghambat kapasitas. CSD juga bertanggung jawab atas pengadaan proyek-proyek PA yang didanai Pemerintah. Sektor PAS di Timor-Leste tidak memiliki undang-undang dan kebijakan tertentu, namun itu bukan hambatan pembangunan yang utama.

Pekerjaan PAS perkotaan DNAS meliputi Dili dan ke- 12 kota distrik lainnya. Dasar aktiva infrastruktur pengadaan air perkotaan DNAS diperkirakan sebesar US\$ 50 juta. US\$ 30 juta telah dikeluarkan untuk sistem air di Dili sejak tahun 2000. Pengelolaan air limbah perkotaan hampir seluruhnya merupakan tanggung jawab swasta; tidak ada sistem pembuangan air atau tangki-tangki masyarakat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah, hanya fasilitas pengolahan kotoran di Tacitolo. DNAS mengelola pengumpulan dan pembuangan limbah padat di Dili. Tidak ada sistem pengadaan air perkotaan yang lengkap di Timor-Leste. Sebagian besar rehabilitasi, termasuk untuk Dili, telah dipusatkan pada produksi air (pembangunan, penyaluran, pengolahan dan penampungan sumber air) dan pendistribusian primer dan sekunder. Pendistribusian tertier (retikulasi) hanya mendapat sedikit perhatian di Dili, misalnya, 50% air hilang melalui kebocoran dan pencurian.

Sangat penting mengurangi kehilangan air dan air non-pemasukan. Ini dapat dicapai dengan memusatkan investasi dengan menggunakan “pendekatan zonal” terhadap perbaikan sistem, dan bukan dengan menyebarkan investasi secara tipis. Suatu pendekatan zonal memusatkan pekerjaan rehabilitasi pada zone hidraulik tunggal yang ditentukan, satu atau beberapa pada saat yang bersamaan. Apabila penyediaan air yang dapat diandalkan sudah seluruhnya dipulihkan dalam satu zone dan para pelanggan puas, maka program investasi berpindah ke zone(-zone) berikut. Program itu berkeliling di kota sampai seluruh jaringan berfungsi dengan baik. Proyek pendekatan zonal pertama bagi Dili sedang dipersiapkan.

Diperkirakan kurang dari seperempat jumlah rumah tangga pedesaan di Timor-Leste mempunyai akses ke air yang aman, sedangkan suatu proporsi yang lebih kecil (19%) mempunyai akses ke fasilitas sanitasi yang memadai atau efektif (ada data yang memberikan kesan bahwa angka ini mungkin lebih rendah, yaitu 13%). Juga ada ketidaktahuan yang luas tentang masalah-masalah kesehatan dan sanitasi di kalangan penduduk pedesaan. Penyakit yang paling umum di antara anak-anak adalah infeksi saluran pernapasan atas yang akut dan penyakit-penyakit diare, yang juga umum di kalangan orang dewasa. Diperkirakan bahwa sejumlah besar anak-anak pedesaan di bawah usia lima tahun meninggal oleh karena tidak tersedianya air minum, lingkungan sanitasi dan kebiasaan sanitasi yang buruk. Geografi

pegunungan, infrastruktur jalan yang buruk, dan siklus tahunan kekeringan makin memperparah masalah-masalah akses di daerah pedesaan. Kaum perempuan pada umumnya merupakan pengumpul, pengangkut, dan konsumen akhir utama dari air. Sekarang ini hanya ada kapasitas terbatas pada pihak Pemerintah untuk merencanakan, mengelola dan menyalurkan persediaan air dan layanan sanitasi di pedesaan.

Rencana Pembangunan Nasional meliputi tujuh sasaran Pengadaan Air dan Sanitasi (PAS) dan 15 indikator performa, termasuk (i) 80% dari penduduk perkotaan dengan akses ke air yang aman yang disalurkan melalui pipa, dan (ii) 80% dari penduduk pedesaan dengan akses ke persediaan air setempat yang aman. Timor-Leste juga telah menandatangani Sasaran-sasaran Pembangunan Milenium (SPM), yang berarti proporsi penduduk dengan akses ke air yang lebih baik ditingkatkan dari 44% menjadi 78%, dan proporsi penduduk dengan sanitasi yang lebih baik dari 19% ditingkatkan menjadi 46% - lihat di bawah untuk lingkup aktual PAS. Program-program PAS Pemerintah dan yang didukung donor diatur oleh Program Investasi Sektor (SIP) dari PAS yang menjabarkan suatu program investasi bergulir lima tahun secara rinci. SIP dari PAS dewasa ini sedang dimutakhirkan.

Rehabilitasi dan perbaikan fasilitas dan layanan PAS sejak tahun 2000 sebagian besar telah didanai donor. Program pekerjaan modal PAS dari Pemerintah sendiri untuk TF2007 seluruhnya berjumlah US\$ 1,79 juta, sekitar US\$ 1,00 juta untuk pengadaan air pedesaan dan sisanya untuk pengadaan air perkotaan. 65% dari alokasi anggaran ini telah diobligasikan, artinya kontrak-kontraknya telah diberikan kepada pihak pelaksana.

Fakta dan Angka

Sasaran-sasaran khusus yang ditetapkan Pemerintah untuk akses ke sanitasi dan persediaan air pedesaan yang memadai dirinci di bawah. Sasaran-sasaran ini didasarkan atas keinginan Pemerintah untuk mencapai Sasaran-sasaran Pembangunan Milenium (SPM) tentang sanitasi dan penyediaan air yang aman.

Sasaran untuk Akses ke Sanitasi dan Persediaan Air di Pedesaan

Indikator	Sasaran 2004	Sasaran 2010	Sasaran 2015	Sasaran 2020
Akses ke air minum yang aman, Penduduk pedesaan (%)	30%	60%	80%	80%
Akses ke air minum yang aman, Penduduk pedesaan (total)	215,528	506,362	759,293	850,867
Akses ke sanitasi, Penduduk pedesaan (%)	19%	50%	80%	80%
Akses ke sanitasi, Penduduk pedesaan (total)	136,501	421,968	759,293	850,867

Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

18. Catatan Sektor: Pemuda

Selayang Pandang

Sektor pemuda, walaupun berpotensi, setepatnya dapat digambarkan sebagai *dalam keadaan krisis*. Sebab itu sangat penting bahwa Pemerintah dan komunitas internasional melakukan suatu investasi strategis yang terpadu dan komprehensif dalam sektor pemuda guna menghentikan keterlibatan dalam tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum, dan untuk memanfaatkan potensi angkatan ini. Kaum pemuda merupakan bagian yang penting dan yang persentasenya bertumbuh di kalangan penduduk. Namun, pengembangan kaum pemuda hanya mendapat sedikit perhatian dari Pemerintah atau komunitas internasional sejak kemerdekaan. Keterlibatan kaum pemuda dalam krisis tahun 2006 dan adegan-adegan kekerasan yang lebih baru telah menyoroti bahaya mengabaikan sektor ini.

Persoalan-persoalan Pokok

- ***Menjaga agar kaum pemuda tetap di sekolah.*** Walaupun generasi sekarang ini merupakan generasi yang paling banyak mengecap pendidikan dari orang Timor, banyak di antara mereka tidak menyelesaikan sekolah. Banyak manfaat diperoleh baik untuk orangnya secara pribadi maupun untuk masyarakat kalau kaum pemuda tetap bersekolah.
- ***Meningkatkan peluang pekerjaan untuk pemuda.*** Angka pengangguran di antara kaum pemuda sangat mengejutkan tingginya. Tanpa pekerjaan tetap, kaum pemuda rentan terhadap manipulasi dan keterlibatan dalam tindakan kekerasan dan tindakan berisiko lainnya.
- ***Menghubungkan pemuda dengan komunitas.*** Banyak pemuda merasa putus hubungan dari keluarga, komunitas dan masyarakat. Ini adalah akibat perubahan sosial yang besar dan melemahnya tatanan sosial selama 35 tahun terakhir.
- ***Memberdayakan pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa.*** Di kalangan kaum pemuda sekarang ini ada perasaan kekecewaan yang kuat terhadap pemerintah dan marginalisasi dari proses pembangunan bangsa.
- ***Memperkuat kendali-kendali formal dan informal pada pemuda*** sangat penting untuk mencegah keterlibatan mereka dalam tindakan kekerasan dan tindakan berisiko lainnya.

Sektor Pemuda

Pemuda yang berusia 15-29 tahun merupakan hampir seperempat dari jumlah penduduk. Jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi 37% pada tahun 2010. Pemuda masa kini

merupakan generasi yang paling banyak mengecap pendidikan dari orang Timor, namun banyak dari mereka tidak menyelesaikan sekolah. 77% menyelesaikan *sebagian* pendidikan dasar, namun hanya 34% menyelesaikan pendidikan SLTP dan 27% menyelesaikan pendidikan SLTA. Mutu pendidikan juga pada umumnya rendah. Angka melek huruf cukup tinggi, yaitu 77%, namun banyak pemuda meninggalkan sekolah tanpa ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan dan luput dari kemiskinan. Pengangguran kaum pemuda sekarang ini diperkirakan sebesar 43% secara nasional dan jumlah yang mengejutkan, yaitu sebesar 58%, ada di Dili. Lihat lampiran untuk ringkasan angka-angka ini.

Di samping faktor ekonomi dan pendidikan, faktor-faktor sosial, politik dan hukum ikut memberikan pengaruh terhadap krisis pemuda sekarang ini. Banyak pemuda mengalami kekerasan rumah tangga, merasa terputus hubungannya dengan komunitas dan sekolah, minum minuman keras secara berlebihan, dan dipandang secara negatif oleh masyarakat. Pemuda masa kini merasa terpinggir dan merasa kecewa. Mereka tidak percaya para penguasa dan generasi yang lebih tua. Mereka tidak mempunyai pendidikan di bidang kewargaan dan peluang untuk terlibat secara bernas dalam proses pembangunan bangsa. Lagipula, ambruknya mekanisme kendali sosial telah mendorong kaum pemuda untuk bertindak secara beringas dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan oportunistik, termasuk kejahatan dan premanisme. Sebab itu tidak mengherankan bahwa pemuda dengan cepat diimplikasikan dalam krisis yang sedang berjalan ini.

Program-program Pemerintah di masa lampau dalam sektor pemuda telah mencatat beberapa kemenangan yang patut dicatat. Respons Pemerintah dan masyarakat internasional terhadap krisis yang dihadapi sekarang telah diberikan dengan cepat dan patut dipuji. Kementerian untuk Reinsersi Buruh dan Masyarakat yang lama (MOLCR) telah merancang suatu Rencana Aksi Nasional tentang penyediaan lapangan kerja untuk pemuda tahun 2007-10. Sekretariat Negara untuk Pemuda menyiapkan suatu rancangan kebijakan pemuda nasional, dan *Compact* pasca-krisis Pemerintah meliputi penyediaan lapangan kerja untuk pemuda dan pengembangan ketrampilan sebagai salah satu temanya. Secara lebih programatis, Pemerintah dan masyarakat internasional melancarkan sejumlah program tunai-untuk-kerja yang terutama berfaedah bagi kaum muda. Program MOLCR/ILO, misalnya, diselenggarakan dari bulan April sampai Desember 2006 dan menghasilkan 465.000 hari kerja, dan memberikan pekerjaan kepada 37.000 people, 44% adalah pemuda, selama masing-masing 15 hari. Sejak kemerdekaan, dan sebelum krisis yang sekarang, Pemerintah dan masyarakat internasional telah mendirikan sejumlah pusat pemuda serta pusat pelatihan kerja. Beberapa organisasi internasional telah menyediakan program makan siang di sekolah guna mendorong partisipasi, dan Pemerintah sedang mempertimbangkan program serupanya sendiri.

Walaupun prakarsa-prakarsa ini pada umumnya bersifat positif, tiga tantangan yang saling terkait secara konsisten telah mengepung sektor pemuda: lingkup, skala dan kesinambungan. Keterlibatan pemuda dalam kekerasan dan gejolak sosial baru-baru ini telah menyoroti kebutuhan untuk memperluas *lingkup* program di sektor pemuda guna menyelesaikan aspek sosial, politik, hukum, serta ekonomi dari krisis pemuda sekarang ini. Berkaitan dengan ini, jumlah besar pemuda dan parahnya krisis sekarang ini telah menggarisbawahi kebutuhan yang mendesak untuk memperluas *skala* program di sektor pemuda. Pada akhirnya, menjamin *kesinambungan* prakarsa-prakarsa dalam sektor pemuda

ternyata hanya khayalan. Umpamanya, banyak pusat pemuda berhenti berfungsi begitu dana donor habis. *Tantangan-tantangan ini disebabkan sejumlah faktor, termasuk kepemimpinan dan koordinasi yang lemah dari sektor pemuda, tidak adanya dana yang dikhususkan yang memadai, serta hambatan-hambatan kapasitas pelaksanaan.*

Hanya suatu pendekatan yang komprehensif—yaitu pendekatan yang memahami masalahnya secara holistik, yang menggabungkan pengalaman lokal dan internasional, dan yang berkomitmen pada suatu strategi jangka panjang—dapat menyelesaikan tantangan-tantangan dan mengatasi krisis pemuda sekarang ini. Perluasan yang cepat dari program penyediaan lapangan kerja padat karya untuk pemuda adalah terutama penting.

Fakta dan Angka

Profil Penduduk

Pemuda merupakan persentase besar penduduk yang makin meningkat.

Total Penduduk	924.642
Pemuda (Total)	225.300 (24%)
Pemuda (15-19)	94.300 (10%)
Pemuda (20-29)	131.000 (14%)

Note: There are slight differences in age categories used in figures and graph

Pendidikan

Kaum pemuda masa kini merupakan generasi yang paling terdidik dari orang Timor, namun banyak tidak menyelesaikan sekolah. Perbedaan Miskin-Tidak-miskin lebih besar dari perbedaan lelaki-perempuan

Duduk di bangku SD	All 77%	34%
Sekolah Lanjutan Tk.Pertama	17%	
Sekolah Lanjutan Tk.Atas	2%	
Pasca-sekolah lanjutan	2%	

Melek Huruf

Angka kebutuhurufan tetap tinggi, walaupun banyak yang menyelesaikan pendidikan sekolah dasar.

Melek huruf pemuda	77%
Melek hrf pemuda (wanita)	76%
Melek hrf pemuda (lelaki)	79%
Perbandingan (Filipina)	97%

Pekerjaan

Pengangguran sangat tinggi, terutama di pusat perkotaan Dili dan Baucau.

Pengangguran Pemuda (Total)	43%
Pengangguran Pemuda (Dili/Baucau)	59%
Pengangguran Pemuda (Pedesaan)	15%

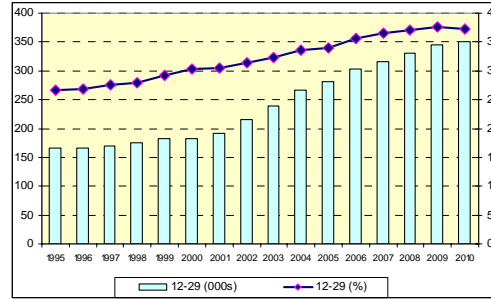
Note: %age for Dili/Baucau and Rural based on the 15-19 youth age group.

Transisi Sekolah-ke-Pekerjaan

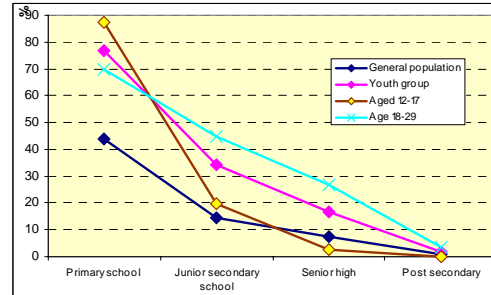
Transisi sekolah-ke-pekerjaan buat kaum pria diperlukan rata-rata lima tahun, dan banyak dari mereka malahan memerlukan waktu lebih lama

Usia transisi	17 years
Waktu transisi (miskin)	5 years
Waktu transisi (ekonomi lebih baik)	7 years

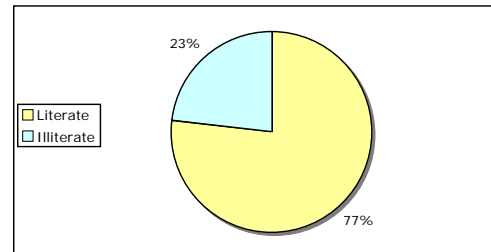
Bagan 1: Segmen pemuda (12-29) dari penduduk (1995-2015)



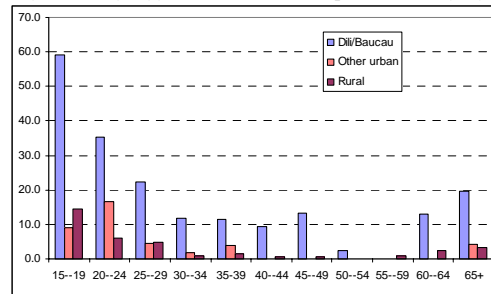
Bagan 2: Tingkat pendidikan menurut kelompok penduduk



Bagan 3: Angka melek huruf pemuda



Bagan 4: Pengangguran menurut kelompok usia dan geografi



Bagan 5: Transisi sekolah-ke-pekerjaan

